

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA
PERIMBANGAN, DAN LUAS WILAYAH TERHADAP
BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KABUPATEN DAN
KOTA DI PULAU SUMATERA**

ABDUL SAMID HIDAYAHTULLOH

8335165058



**Skripsi ini Disusun Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2021**

**THE INFLUENCE OF LOCAL REVENUE, BALANCING
FUNDS, AND TOTAL AREA TO CAPITAL EXPENDITURE
OF CITIES AND DISTRICTS AT SUMATERA ISLAND**

ABDUL SAMID HIDAYAHTULLOH

8335165058



Skripsi is Written as Part of Bachelor Degree in Economics Accomplishment

STUDY PROGRAM S1 OF ACCOUNTING

FACULTY OF ECONOMIC

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2021

ABSTRAK

ABDULSAMID HIDAYAHTULLOH. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal Pemerintah kabupaten dan kota di pulau sumatera Tahun 2017-2019.

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan luas wilayah terhadap belanja modal pemerintah kabupaten dan kota di pulau sumatera tahun 2017-2019. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan populasi seluruh kabupaten dan kota di pulau sumatera, di dalam penelitian ini digunakan metode *purposive sampling* dimana didapat secara keseluruhan 462 sampel. Penelitian ini menggunakan regresi linier berganda untuk menguji hipotesis pada tingkat signifikansi 5%.

Dari hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal. Sementara luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Luas Wilayah dan Belanja Modal Pemerintah Kota dan Kabupaten di seluruh sumatera

ABSTRACT

ABDUL SAMID HIDAYAHTULLOH. *The Influence of Local Revenue, Balancing Funds and total Area on Capital Expenditures of all district and City on the Island of Sumatra in 2017-2019.*

This study aims to examine the effect of local revenue, balance funds and area size on capital expenditures for district and city governments on the island of Sumatra in 2017-2019. This research uses secondary data with the population of all districts and cities on the island of Sumatra. In this study, a purposive sampling method was used where a total of 462 samples were obtained. This study uses multiple linear regression to test the hypothesis at the 5% significance level.

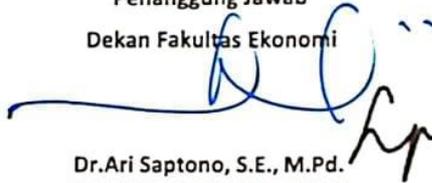
From The results of the analysis carried out in this study, it can be concluded that the local revenue, the balance fund has an effect on capital expenditure. Meanwhile, the area of land has no effect on capital spending.

Keywords: Local Own Revenue, Balancing Fund and total Area and Capital Expenditures for City and district Governments throughout Sumatra

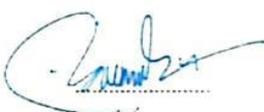
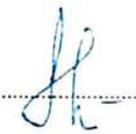
LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Penanggung Jawab
Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. Ari Saptono, S.E., M.Pd.
NIP. 197207152001121001

No	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
1	Dr. Indra Pahala, S.E., M.Si NIP. 197902082008121001 (Ketua)		19 Februari 2021
2	Diah Armeliza., S.E., M.Ak NIP. 197904292005012001 (Sekretaris)		19/02
3	Dr. Rida Prihatni, SE,Akt.,Msi NIP. 197604252001122002 (Penguji Ahli)		19/02
4	Tri Hesti Utamingtyas, SE., M.SA NIP. 1976010720011212001 (Pembimbing 1)		19/02
5	Dwi Handarini, S.Pd, M.Ak. NIP. 198907312015042004 (Pembimbing 2)		19/02

Nama : Abdul Samid Hidayatulloh
No. Registrasi : 8335165058
Program Studi : S1 Akuntansi
Tanggal Lulus : 17 February 2021

PERNYATAAN ORIENTALIS

PERNYATAAN ORIENTALIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana, baik di Universitas Negeri Jakarta maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Skripsi ini belum dipublikasikan, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Negeri Jakarta.

Jakarta, Januari 2021

Yang membuat pernyataan



Abdul Samid Hidayatulloh
No. Reg 8335165058



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
UPT PERPUSTAKAAN

Jalan Rawamangun Muka Jakarta 13220
Telepon/Faksimili: 021-4894221
Laman: lib.unj.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Negeri Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Abdul Samid Hidayatulloh
NIM : 8335165058
Fakultas/Prodi : ~~Ekonomi / Akuntansi~~
Alamat email : samidabdul@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Luas Wilayah Terhadap

Belanja Modal Pada Pemerintah Kota Dan Kabupaten Di Pulau Sumatera

Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini UPT Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta berhak menyimpan, mengalihmediakan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan Universitas Negeri Jakarta, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 1 September 2020
Penulis

(Abdul Samid Hidayatulloh)
nama dan tanda tangan

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Luas Wilayah terhadap Belanja Modal di seluruh Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera tahun 2017-2019” dengan baik.

Skripsi ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Jakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, kritik, saran, dan juga motivasi dari berbagai pihak oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua penulis (alm) H. Hasan Basri bin H. Bawaihi dan Hj. Farida Haryani yang telah memberikan doa, serta dukungan moral maupun materil
2. Keluarga tercinta Yosa Mareta Handayani., ST., MM., Giventi Handi., SE., MH., dan Fivent Handi., SE yang telah memberikan doa, serta dukungan moral maupun materil;
3. Dr. Ari Saptono S.E., M.Pd., Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
4. Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupui S.E., M.Si., Ak., Selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
5. Tri Hesti Utaminingtyas, SE., M.SA., selaku dosen pembimbing 1 dan Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak., selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi ini;

6. Seluruh dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu yang bermanfaat selama penulis menempuh perkuliahan;
7. Seluruh rekan-rekan Akuntansi Alih Program Universitas Negeri Jakarta 2016 terutama Ashari Ramadhan, Irwan Nauli, Hidayaturrahim dan Yunita Sari;
8. Seluruh jajaran pegawai dan unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta khususnya Unit Pelaksana Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPMPTSP) Kec. Tanjung Priok tahun 2020;
9. Rekan-rekan petugas Antar jemput Izin Bermotor (AJIB) DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta wilayah Jakarta Utara.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat dijadikan sebagai suatu pembelajaran dimasa yang akan datang.

Jakarta, Januari 2021



Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORIENTALIS	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	11
BAB II	13
KAJIAN TEORITIS	13
A. Deskripsi Konseptual	13
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	13
2. Otonomi Daerah.....	14
3. Belanja Daerah.....	18
4. Belanja Modal	28
5. Pendapatan Asli Daerah.....	33
6. Dana Perimbangan	37
7. Luas Wilayah.....	39
B. Hasil Penelitian yang Relevan	40
C. Kerangka Teoritik	48
1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal	48
2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal	49
3. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal	51
D. Perumusan Hipotesis	52
BAB III	54
METODOLOGI PENELITIAN	54

A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian	54
B. Metode Penelitian	54
C. Populasi dan Sampel	54
D. Operasionalisasi Variabel Penelitian	55
1. Variabel Dependen	55
2. Variabel Independen	56
E. Teknik Analisis Data	58
1. Statistik Deskriptif	58
2. Uji Asumsi Klasik	59
3. Pengujian Hipotesis	63
BAB IV	68
HASIL DAN PEMBAHASAN	68
A. Deskripsi Data	68
1. Hasil Pemilihan Sampel	68
2. Analisis Deskriptif	69
B. Uji Asumsi Klasik	71
1. Uji Normalitas	71
2. Uji Multikolinearitas	75
3. Uji Autokolerasi	76
4. Uji Heterokedasitas	77
5. Uji Regresi Linier Berganda	80
C. Uji Hipotesis	83
1. Uji Statistik T (Parsial)	83
2. Uji F Kelayakan Model	85
3. Uji R² (Determinasi)	87
D. Pembahasan	88
BAB V	94
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	94
A. Kesimpulan	94
B. Implikasi	95
C. Saran	97
LAMPIRAN- LAMPIRAN	97
DAFTAR PUSTAKA	136

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II. 1 : KERANGKA PEMIKIRAN	52
GAMBAR VI. 1: GAMBAR ANALISIS GRAFIK.....	74
GAMBAR VI. 2: GAMBAR ANALISIS GRAFIK P-PLOT	75
GAMBAR VI. 3: UJI SCATTERPLOT.....	79

DAFTAR TABEL

TABEL VI. 1 JUMLAH SAMPEL PENELITIAN.....	68
TABEL VI. 2 STATISTIK DESKRIPTIF.....	69
TABEL VI. 3 UJI KOLGOMOROV SMIRNOV	73
TABEL VI. 4 UJI MULTIKOLINEARITAS	76
TABEL VI. 5 UJI DURBIN – WATSON.....	77
TABEL VI. 6 UJI GLEJSER.....	80
TABEL VI. 7 UJI REGRESI LINIER BERGANDA.....	81
TABEL VI. 8 UJI STATISTIK T.....	84
TABEL VI. 9 UJI STATISTIK F.....	86
TABEL VI. 10 UJI R ²	87
TABEL VI. 11 PERBANDINGAN PAD DAN BELANJA MODAL TAHUN 2017,2018 & 2019.....	88
TABEL VI. 12 PERBANDINGAN DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL	90
TABEL VI. 13 TABEL PERBANDINGAN LUAS WILAYAH DAN BELANJA MODAL.....	93

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: DAFTAR SAMPEL.....	98
LAMPIRAN 2:REKAP DATA PENDAPATAN ASLI DAERAH	100
LAMPIRAN 3: REKAP DATA DANA PERIMBANGAN	112
LAMPIRAN 4: REKAP DATA LUAS WILAYAH	124
LAMPIRAN 5: REKAP DATA BELANJA MODAL	136

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini berimplikasi pada daerah-daerah baik itu kabupaten, kota maupun provinsi untuk memiliki hak, kewenangan dan kewajiban otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemerintah daerah (Pemda) juga memiliki kewenangan dalam mengontrol terlaksananya anggaran daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di bawah pengawasan pemerintah pusat

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim dalam Arwati dan Hadiati 2013:498).

Pemerintah pusat juga tidak serta merta melepaskan kewenangannya terhadap daerah otonom berdasarkan UU No. 33 tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antar Daerah, hal ini Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar susunan pemerintahan. dana perimbangan juga mampu meningkatkan efisiensi pengeluaran pemerintah dengan cara menyerahkan sebagian dari kewenangannya di bidang pengelolaan keuangan yang nantinya dengan manfaat yang dihasilkan dapat bermanfaat bagi suatu daerah yang bersangkutan serta dapat mengurangi ketimpangan dalam pembagian keuangan nasional.

Adanya otonomi daerah diharapkan semakin meningkatnya pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik sehingga mampu menarik investor untuk melakukan investasi di daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan mampu membangun daerah secara optimal serta memacu pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat (Jaya dan Dwirandra, 2014:80).

Perkembangan pelaksanaan otonomi atau desentralisasi memberikan kesempatan bagi kabupaten untuk memperluas potensi (Irwan, 2011: 122). Pemerintah Daerah menyusun anggaran yang kemudian dijadikan pedoman dalam menjalankan berbagai aktivitasnya yang

dianggarkan dalam APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (Sulistiyowati, 2011:2).

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2010, belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Pemerintah Daerah tidak hanya diuntut untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang di miliki, namun juga harus bisa memposisikan belanja modal yang jumlahnya harus lebih besar untuk pembangunan pada sektor yang produktif dalam APBD, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD dalam bentuk belanja modal untuk memenuhi sarana prasarana dan infrastruktur daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjalankan pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik ini dapat dilakukan dan di perbaiki dengan cara meningkatkan kualitas pelayanan, yakni dapat upaya meminimilasi kesenjangan antara tingkat layanan dengan harapan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran belanja modal dengan baik karena dengan mengalokasikan belanja modal maka akan di ketahui variabel–variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pajak daerah,

retribusi daerah, dan dana perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2005 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan pengertian dari Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan maksud pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi, serta pengertian dari Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan khusus, kebutuhan khusus yang dimaksud yaitu kebutuhan yang tidak bisa diperkirakan dengan menggunakan dana alokasi umum dan kebutuhan yang merupakan kebutuhan komitmen atau prioritas nasional.

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. pada Kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Sumber Pendapatan Asli Daerah terbesar adalah pajak daerah dan retribusi daerah. untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan di peroleh pajak yang cukup besar, tetapi untuk daerah berkembang, pemerintah daerah hanya memungut pajak dalam jumlah yang

terbatas, hal ini juga terjadi pada pendapatan retribusi daerah yang besaran retribusi yang di terima perdaerah sangat bervariasi atau berbeda beda tergantung dari potensi dari daerah tersebut.

Pembentukan otonomi daerah juga bertujuan untuk meningkatkan daya guna penyelenggaraan pemerintah daerah serta memaksimalkan potensi wilayah atau daerah tersebut, agar daerah tersebut dapat mendapatkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang maksimal. yang nantinya hasil PAD tersebut akan di gunakan untuk pembangunan daerah untuk menjamin sumber keuangan daerah otonom.

Pemerintah daerah merupakan satuan pemerintahan yang terdiri dari tingkat Provinsi, Tingkat kota, dan Tingkat Kabupaten. Pemerintah Daerah tingkat provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang adalah Satuan pemerintah tertinggi dalam tingkatan pemerintahan daerah, yang mana pengalokasian APBD yang di porsikan lebih besar di bandingkan tingkat kota, dan tingkat kabupaten.

belanja modal pemerintah daerah antar provinsi berbeda. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu Pendapatan Asli daerah, Dana Perimbangan dan Luas wilayah.

Fenomena yang terjadi bahwa otonomi daerah memberikan kebebasan pada pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri, namun pada kenyataan yang terjadi di lapangan pemerintah daerah kurang siap dalam mengelola keuangan daerahnya, dapat di lihat dari sedikitnya pengalokasian dana ke post belanja modal. Di lansir dari

bisnis.tempo.co Untuk belanja di Pemerintah Provinsi selama 2018 yaitu 26% dari total belanja Rp 349,6 triliun, digunakan untuk pegawai 22% untuk barang dan jasa, serta 17% untuk belanja modal. Kondisi di kabupaten kota lebih buruk lagi. Dari belanja Rp 804,2 triliun, 40% habis untuk gaji pegawai. 24% untuk belanja barang dan jasa serta 20 % untuk belanja modal.

Dalam contoh lain di beritakan dari metro.tempo.co ada pemangkasan anggaran untuk revitalisasi sungai di DKI Jakarta, dan juga kurangnya penyerapan anggaran dalam hal pengadaan tanah atau pembebasan tanah untuk Waduk Dan Sungai. yaitu dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 850 Miliar yang terserap Hanya Rp 350 Miliar di tahun 2019, hal ini sangat berdampak negatif terhadap masyarakat, dengan tidak tercapainya anggaran untuk pembebasan tanah untuk waduk dan sungai, ini dapat dibuktikan pada awal tahun Januari 2020 Provinsi DKI Jakarta di landa banjir yang sangat besar.

Menurut kajian ekonomi yang dilakukan Bank Indonesia (BI) Pada tahun 2016 di Sumatera Utara “Berdasarkan jenisnya, belanja pegawai kembali menempati urutan pertama sebesar 24,1% dari seluruh anggaran belanja, diikuti oleh anggaran belanja barang dan jasa (16,5%) dan belanja modal (16,1%). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan belanja modal yang berdampak langsung kepada pertumbuhan ekonomi daerah. Dan Pendapatan daerah untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 ditargetkan akan mencapai Rp12,1

triliun meningkat tajam (21,0%) dibandingkan P-APBD 2016 yang sebesar Rp10,06 triliun. Peningkatan target penerimaan daerah tersebut akan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD, pangsa 40,5%) dan Dana Perimbangan (pangsa 59,5%) yang masing-masing mengalami peningkatan sebesar 5,0% dan 41,8%. Sementara Lain-lain pendapatan daerah yang sah persentasenya menurun menjadi sebesar 0,1%” hal ini berarti PAD dan Dana Perimbangan memberikan efek langsung terhadap Belanja Modal.

Pulau Sumatera Merupakan Pulau terbesar ketiga di Indonesia, dan pulau ini juga merupakan pulau dengan jalur strategis perdagangan Internasional dan juga dekat dengan ibukota negara. Banyak Proyek Strategis Nasional yang di bangun di pulau sumatera, seharusnya penggunaan pos belanja modal tinggi. Berdasarkan Beritasumut.com Tahun 2018 ini setidaknya ada 17 Proyek Strategis Nasional yang ada di Sumut yang turut menjadi perhatian Pemprov Sumut. Kepala Bappeda Sumut menjelaskan, 17 proyek strategis nasional tersebut dibagi dalam Proyek Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol, Proyek Pembangunan Infrastruktur Sarana dan PraSarana Kereta Api Antar Kota, Proyek Pembangunan Pelabuhan Baru dan Pengembangan Kapasitas, Proyek Pipa Gas/Terminal LPG, Proyek Penyediaan Infrastruktur Air Minum, Proyek Bendungan, Pembangunan Kawasan Industri Prioritas/Kawasan Ekonomi Khusus, Pariwisata, dan Proyek Pembangunan Smelter. Sedangkan berdasarkan sda.pu.go.id Sumatera Selatan memiliki 13 proyek pembangunan infrastruktur nasional yang saat ini tengah dikerjakan yakni pembangunan

Bendungan Tiga hadji di OKU Selatan, progres pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Api-api (KEK TAA) dan Pelabuhan Tanjung Carat, pembangunan Institut Olahraga Indonesia, serta pembangunan RSUD Provinsi Sumsel, Tol Palindra, Tol Pematang Panggang-Kayu Agung, Tol Palembang-Tanjung Api api, Tol Kayu Agung-Palembang-Betung, Kereta Api Prabumulih-Kertapati, Kereta Api Simpang TAA, Kereta Api Tanjung Enim-TAA, Kereta Api Palembang-Jambi, serta light rail transit (LRT). dari 13 proyek pembangunan infrastruktur nasional yang saat ini tengah dikerjakan, sembilan diantaranya tidak ada kendala dan sudah berjalan sesuai target yang ditetapkan Gubernur Sumatera selatan berharap ada solusi dari presiden terkait proyek yang masih terkendala. Sebagai contoh pembangunan RSUD Provinsi Sumsel, secara keseluruhan bisa diselesaikan pada 2018. Bahkan, 2017 sudah bisa beroperasi, meski pembangunan belum 100 persen selesai. Progres saat ini, pembangunan fisik menggunakan APBD Rp49,5 miliar sampai selesai 2017. Kebutuhan alat kesehatan (alkes) totalnya mencapai Rp900 miliar yang dipenuhi dari APBD Sumsel di 2017 sebesar Rp98 miliar dan proyeksi dari APBD pada 2018 sebesar Rp100 miliar. masih diperlukan anggaran Rp800 miliar untuk alkes. Dengan adanya kenaikan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan yang dialokasikan ke belanja modal untuk membangun program prioritas nasional diharapkan pemerintah kabupaten dan kota Sumatera dapat memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat sehingga masyarakat akan mampu untuk mengembangkan potensi daerahnya.

Penelitian yang dilakukan Putra (2018), Panji (2014), dan Mawarni (2013), PAD mempunyai Hubungan Positif dan signifikan terhadap Belanja

Modal, peningkatan PAD akan Meningkatkan Alokasi Belanja Modal sehingga mampu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik. sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Nufus (2017) PAD berpengaruh Negatif terhadap Belanja Modal, ini bermakna bahwa PAD lebih banyak dihabiskan oleh pemerintah daerah untuk belanja lainnya, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa. Menurut Priyatna (2019) yang meneliti pengaruh PAD dan Dana Perimbangan membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal hal ini berarti tambahan PAD tidak membuat alokasi belanja modal bertambah. Namun hasil berbeda yang di dapat dari penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018), bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Nugraeni (2011) dan Mawarni (2013), Dana Perimbangan yang meningkat akan mampu menunjang belanja modal yang belum dapat dilakukan oleh daerah, ini dikarenakan keterbatasan anggaran kemampuan masing masing daerah tentunya berbeda, setiap daerah apabila menjalankan pembangunan dengan dana PAD saja akan menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin tinggi. Maka dari itu melalui dana perimbangan pemerintah pusat melaksanakan desentralisasi fiskal, yang nantinya pemerintah daerah dalam melakukan tambahan belanja bersumber dari dana perimbangan tersebut.

Menurut Priatna (2019) yang meneliti pengaruh PAD dan Dana Perimbangan membuktikan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh

terhadap Belanja Modal, hal ini berarti tambahan Dana Perimbangan tidak membuat alokasi belanja modal bertambah.

Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2016) dan Meianto (2014) menyatakan, Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa makin luas suatu daerah maka membutuhkan sarana dan prasarana penunjang untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Hal berbeda yang di dapatkan dari penelitian yang dilakukan oleh erlis (2010) luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modal dengan pertimbangan luas wilayah.

Berdasarkan Uraian di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Pulau Sumatera tahun 2017-2019”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan, maka permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal?
3. Bagaimana Pengaruh Luas Wilayah terhadap Belanja Modal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan sejumlah masalah yang telah dikemukakan pada rumusan masalah di atas, maka dapat ditarik tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja modal.
2. Menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap belanja modal.
3. Menguji pengaruh Luas Wilayah terhadap belanja modal.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentunya memiliki serangkaian manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Untuk menerapkan ilmu yang didapat, serta melatih proses berpikir secara ilmiah, khususnya dalam bidang pemerintah daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan koreksi dalam belanja modal pemerintah daerah serta memberikan informasi mengenai pentingnya pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan luas wilayah sebagai bahan dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat di kembangkan oleh peneliti lain sebagai acuan referensi lebih lanjut mengenai pengaruh PAD, Dana Perimbangan, dan luas wilayah terhadap belanja modal.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Deskripsi Konseptual

1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Dalam teori keagenan (Jensen dan Meckling, 1976) menyatakan hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih (prinsipal) melimpahkan wewenang kepada orang lain (agen) untuk kepentingan mereka. Prinsipal pendelegasikan pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan kepada agen, dimana wewenang dan tanggung jawab agen maupun prinsipal diatur dalam kontrak kerja atas persetujuan bersama.

Teori keagenan ini telah dipraktekkan oleh pemerintahan daerah di Indonesia. Apalagi sejak otonomi dan desentralisasi diberikan kepada pemerintah daerah. Penyusunan APBD yang dibuat antara eksekutif (agen) dan legislatif (prinsipal) berpedoman pada kebijakan umum APBD dan Plafon Anggaran. Pihak eksekutif membuat rancangan APBD yang kemudian diserahkan kepada legislatif untuk dipelajari dan dibahas bersama-sama sebelum ditetapkan sebagai Perda. Dalam perspektif keagenan, APBD merupakan bentuk kontrak yang dijadikan alat oleh legislatif untuk mengawasi pelaksanaan anggaran oleh eksekutif (Widiagma, 2007).

Dalam rancangan APBD khususnya terkait dengan anggaran belanja modal yang disepakati antara kedua belah pihak, pihak legislatif

(prinsipal). senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama karena disini pihak legislatif mempunyai fungsi pengawasan. Setiap bentuk pelanggaran yang terkait dengan kontrak kerja sama dapat menimbulkan permasalahan antara eksekutif dan legislatif. Ketika permasalahan ini muncul maka yang dirugikan yakni masyarakat.

Dalam Hubungan antara teori keagenan dengan penelitian ini adalah pemerintah yang bertindak sebagai agen (pengelola pemerintahan) yang harus menetapkan strategi tertentu agar dapat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sebagai pihak prinsipal.

Masyarakat sebagai principal telah memberikan sumber daya kepada pemerintah melalui kewajiban pajak dan retribusi atau biaya lainnya yang di pungut oleh pihak pemerintah, oleh karena itu pemerintah dalam hal ini penyelenggara negara atau daerah wajib melayani masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat umum dari pengelolaan dana agar dapat berguna dan memfasilitasi kehidupan masyarakat.

2. Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum

yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni:

- a. Undang-undang Dasar Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
- b. Ketetapan MPR-RI Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah: Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang
Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 juga di jelaskan bahwa ada 3 dasar sistem yang dilakukan dalam otonomi daerah yang diatur dalam pasal 1 ayat 7,8 dan 9 yang terdiri dari:

a. Desentralisasi

Adalah Penyerahan wewenang atau kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem NKRI.

b. Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

c. Tugas pembantuan

Adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sedangkan pada UU No. 32 Tahun 2004 juga disebutkan bahwa produk hukum atau produk peraturan yang dapat di tetapkan daerah sesuai dengan pasal 1 ayat 10 dan 11 adalah:

a. Peraturan daerah

Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

b. Peraturan kepala daerah

Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.

Pedoman pemerintahan diatur dalam pasal 20 UU No. 32 Tahun 2004, penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada asas umum penyelenggaraan negara yang terdiri atas sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum ialah asas yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b. Asas tertip penyelenggara ialah asas menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara negara.
- c. Asas kepentingan umum ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- d. Asas keterbukaan ialah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggara negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- e. Asas proporsionalitas ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- f. Asas profesionalitas ialah asas yang mengutamakan keadilan yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- g. Asas akuntabilitas ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Asas efisiensi dan efektifitas ialah asas yang menjamin terselenggaranya kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya tersedia secara optimal dan bertanggung jawab “efisiensi = ketepatangunaan, kedayagunaan, efektivitas = berhasil guna”.

3. Belanja Daerah

Berdasarkan UU No 33 Tahun 2004 Belanja daerah meliputi semua pengeluaran uang dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan PMK No 101 2011 Klasifikasi Belanja digolongkan menjadi

a. Belanja Pegawai

Kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, dan pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Belanja Pegawai digunakan untuk:

- 1) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada pembayaran Gaji Pegawai Negeri meliputi PNS dan TNI/POLRI
- 2) Belanja Gaji Dokter Pegawai Tidak Tetap
- 3) Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Pembayaran Gaji Pejabat Negara
- 4) Belanja Uang Makan PNS
- 5) Belanja Uang Lauk Pauk TNI/POLRI
- 6) Belanja Uang Tunggu dan Pensiun Pegawai Negeri dan Pejabat Negara yang disalurkan melalui PT. Taspen dan PT. ASABRI
- 7) Belanja Asuransi Kesehatan Pegawai Negeri yang disalurkan melalui PT. ASKES
- 8) Belanja Uang Lembur PNS
- 9) Belanja Pegawai Honorer yang diangkat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi unit organisasi pemerintah
- 10) Pembayaran Tunjangan Sosial bagi Pegawai Negeri melalui unit organisasi/Lembaga/Badan tertentu
- 11) Pembayaran uang vakasi
- 12) Pembayaran tunjangan khusus merupakan pembayaran kompensasi kepada Pegawai Negeri yang besarnya ditetapkan oleh Presiden/Menteri Keuangan

13) Belanja pegawai transito merupakan alokasi anggaran belanja pegawai yang direncanakan akan ditarik/dicairkan namun database pegawai pada Kementerian Negara/Lembaga berkenaan menurut peraturan perundang-undangan belum dapat direkam pada Aplikasi Belanja Pegawai Satuan Kerja (Satker) karena belum ditetapkan sebagai Pegawai Negeri pada Satker berkenaan

14) Pembayaran untuk Uang Duka Wafat/Tewas yang besarnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Belanja Barang

Pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan.

1) Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Jenis pengeluaran terdiri dari antara lain.

a) Belanja keperluan perkantoran

b) Belanja pengadaan bahan makanan

- c) Belanja penambah daya tahan tubuh
 - d) Belanja bahan
 - e) Belanja pengiriman surat dinas
 - f) Honor yang terkait dengan operasional Satker
 - g) Belanja langganan daya dan jasa (ditafsirkan sebagai Listrik, Telepon, dan Air) termasuk atas rumah dinas yang tidak berpenghuni
 - h) Belanja biaya pemeliharaan gedung dan bangunan (ditafsirkan sebagai gedung operasional sehari-hari berikut halaman gedung operasional
 - i) Belanja biaya pemeliharaan peralatan dan mesin (ditafsirkan sebagai pemeliharaan aset yang terkait dengan pelaksanaan operasional Satker sehari-hari) tidak termasuk biaya pemeliharaan yang dikapitalisasi
 - j) Belanja sewa gedung operasional sehari-hari satuan kerja
 - k) Belanja barang operasional lainnya yang diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar lainnya
- 2) Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

- a) Honor yang terkait dengan output kegiatan
- b) Belanja operasional terkait dengan penyelenggaraan administrasi kegiatan di luar kantor, antara lain biaya paket rapat/pertemuan, ATK, uang saku, uang transportasi lokal, biaya sewa peralatan yang mendukung penyelenggaraan kegiatan berkenaan
- c) Belanja jasa konsultan
- d) Belanja sewa yang dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja
- e) Belanja jasa profesi
- f) Belanja biaya pemeliharaan non kapitalisasi yang dikaitkan dengan target kinerja
- g) Belanja jasa
- h) Belanja perjalanan
- i) Belanja barang penunjang kegiatan dekonsentrasi
- j) Belanja barang penunjang kegiatan tugas pembantuan
- k) Belanja barang fisik lain tugas pembantuan
- l) Belanja barang non operasional lainnya terkait dengan penetapan target kinerja tahun yang direncanakan

- 3) Belanja barang Badan Layanan Umum (BLU) merupakan pengeluaran anggaran belanja operasional BLU termasuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai BLU
- 4) Belanja barang untuk masyarakat atau entitas lain merupakan pengeluaran anggaran belanja negara untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada masyarakat atau entitas lain yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria kegiatan bantuan sosial.

c. Belanja Modal

Pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan pemerintah.

1) Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/ pembelian/ pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual)

4) Belanja Modal jalan, irigasi, dan jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

5) Belanja modal lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/ pembelian barang – barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan diserahkan kepada masyarakat.

6) Belanja Modal BLU

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

d. Belanja Bunga Utang

Pembayaran kewajiban atas penggunaan pokok utang (*principal outstanding*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan ketentuan dan persyaratan dari utang yang sudah ada dan perkiraan utang baru, termasuk untuk biaya terkait dengan pengelolaan utang. Belanja Bunga Utang meliputi:

- 1) Pembayaran kewajiban pemerintah atas bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN), bunga Obligasi Negara, Imbalan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), Bunga Pinjaman Program, Bunga Pinjaman Proyek, dan bunga Utang Luar Negeri melalui penjadualan kembali pinjaman.
- 2) Pembayaran kewajiban pemerintah atas diskon SPN dan diskon Obligasi Negara.
- 3) Pembayaran *Loss on Bond Redemption*. Digunakan untuk mencatat beban yang timbul dari selisih clean price yang dibayar pemerintah pada saat pembelian kembali *SUN (buyback)* dengan *carrying value SUN*.
- 4) Pembayaran diskon SBSN
- 5) Denda merupakan pembayaran imbalan bunga atas kelalaian pemerintah membayar kembali pengembalian kelebihan pajak (restitusi), pengembalian kelebihan bea dan cukai serta imbalan bunga atas pinjaman perbankan dan bunga dalam negeri jangka pendek lainnya.

e. Belanja Subsidi

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga untuk memproduksi, menjual, mengeksport, atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Belanja subsidi diberikan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

1) *Energy*

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak (BBM) jenis tertentu, *liquefied petroleum gas* (LPG) konsumsi rumah tangga dan usaha mikro serta tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

2) *Non Energy*

Alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan.

f. *Belanja Hibah*

Merupakan belanja pemerintah pusat dalam bentuk transfer uang/barang kepada pemerintah negara lain, organisasi internasional, BUMN/D, dan pemerintah daerah yang bersifat sukarela, tidak wajib, tidak mengikat, dan tidak perlu dibayar kembali serta tidak terus menerus dan dilakukan dengan naskah perjanjian antara pemberi hibah dan penerima hibah dengan pengalihan hak dalam bentuk uang, barang, atau jasa.

Termasuk dalam belanja hibah adalah pinjaman dan/atau hibah luar negeri yang diteruskan hibahkan ke daerah.

g. Belanja Bantuan Sosial

Transfer uang atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Pusat/Daerah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial.

h. Belanja Lain-Lain

Pengeluaran negara untuk pembayaran atas kewajiban pemerintah yang tidak masuk dalam kategori belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bunga utang, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial serta bersifat mendesak dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4. Belanja Modal

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) tahun 2010, pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

Menurut Halim (2007) Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Menurut Mardiasmo (2009) Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin untuk biaya operasional dan pemeliharanya.

a. Jenis-Jenis Belanja Modal

Dalam SAP tahun 2010, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama, diantaranya adalah:

1) Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan, penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurugan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai.

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin, serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksud dalam kondisi siap pakai.

5) Belanja Modal Fisik Lainnya

Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/ peningkatan pembangunan/pembuatan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan irigasi dan jaringan. Termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang

kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku, dan jurnal ilmiah.

b. Peran Belanja Modal

Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah dimana dijadikan salah satu indikator produktifitas dari penggunaan anggaran oleh pemerintah daerah dalam rangka pembelian, pengadaan atau pembangunan aset tetap dan aset lainnya baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk meningkatkan fasilitas publik semakin meningkat fasilitas publik maka akan membuat semakin baik pula kinerja keuangan pemerintah daerah. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 53 menyatakan bahwa Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam Belanja Modal hanya sebesar harga beli/bangun aset.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam

bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Anggaran Belanja Modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Setiap tahun biasanya dilaksanakan pengadaan aset tetap oleh pemerintah daerah sesuai dengan prioritas anggaran dan pelayanan publik yang memberikan dampak jangka panjang secara finansial.

Dapat disimpulkan bahwa belanja modal adalah belanja yang dikeluarkan untuk mendapatkan sarana dan prasarana yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dapat dipelihara. Melihat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat lima kategori utama belanja modal, yaitu Tanah, Peralatan & Mesin, Gedung & Bangunan, Jalan irigasi & jaringan dan modal fisik lainnya.

5. Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa Pendapatan asli daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan daerah, dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana pembiayaan pembangunan daerah. pada kenyataannya belum cukup memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama sumber pendapatan asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004).

Dengan demikian Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan yang asli berasal dari potensi daerah. Pemerintah daerah dapat menggali sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut secara optimal.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 26, kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari empat yaitu:

a) Pajak Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah (Siahaan, 2010). Mardiasmo (2011) berpendapat bahwa "Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah".

Menurut Resmi (2011) "Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (Pajak Provinsi) maupun pajak II (Pajak Kabupaten/Kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing". Berdasarkan tiga pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

1) Pajak Provinsi

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor
- (2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- (4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Permukaan Air

2) Pajak Daerah Kabupaten

- (1) Pajak Hotel
- (2) Pajak Restoran
- (3) Pajak Reklame
- (4) Pajak Hiburan
- (5) Pajak Penerangan Jalan
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- (7) Pajak Parkir
- (8) Pajak Air Tanah
- (9) Pajak Sarang Burung Walet
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

b) Retribusi Daerah

Retribusi daerah pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah, bahkan untuk beberapa daerah penerimaan retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Dalam istilah asing retribusi disebut sebagai *user charge*, *user face*, atau *charging for service*. Retribusi daerah memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dinikmati pembayar retribusi.

1) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik negara/BUMN, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

2) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang berasal dari lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah antara lain:

- (1) Hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan

- (2) Jasa giro
- (3) Pendapatan bunga
- (4) Tuntutan ganti rugi
- (5) Komisi
- (6) Potongan
- (7) Keuntungan selisih kurs
- (8) Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- (9) Pendapatan denda pajak dan retribusi
- (10) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- (11) Pendapatan atas fasilitas sosial dan fasilitas umum
- (12) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

6. Dana Perimbangan

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik (Widjaja, 2002).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Dana perimbangan dalam UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.33 Tahun 2004 adalah terdiri dari (a) Dana Bagi Hasil (b) Dana Alokasi Umum (c) Dana Alokasi Khusus.

Tujuan dari dana perimbangan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan pusat dan daerah, serta untuk meratakan tiap daerah agar tidak yang tertinggal. Dana perimbangan meliputi:

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

DBH merupakan dana APBN yang disalurkan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah sebagai pelaksanaan desentralisasi. DBH bersumber dari pajak dan Sumber Daya Alam yang termasuk penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pertambangan gas bumi, serta DBH dari sumber daya alam berasal dari kehutanan, (UU No.33 Th.53 2004 tentang perimbangan keuangan antara pusat dan pemerintah daerah pasal 11 tentang bagi hasil :273)

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan daerah sebagai penyedia layanan dasar untuk masyarakat, juga sebagai salah satu penerimaan umum APBD. DAU juga berfungsi mendanai pengeluaran sebagai terlaksananya desentralisasi yang ditetapkan di suatu wilayah (HAW. Wijaya 2005). Untuk kabupaten dan provinsi, DAU yang ditetapkan sebesar 90% dan

10% dan dihitung sesuai jumlah perkalian DAU seluruh bobot daerah di Indonesia (Bratakusumah dan solihin, 2001).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK digunakan untuk mendanai investasi pengadaan serta meningkatkan sarana prasarana dengan umur minimal tiga tahun (HAW, Wijaya. 2005). Namun, daerah bersangkutan harus menyediakan biaya minimal 10% dari DAK yang di alokasikan APBD. Dananya sebagai dana pendamping terkecuali untuk daerah yang berkemampuan fiskal tidak memadai.

7. Luas Wilayah

Luas Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Putra, 2011). Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per satuan wilayah, semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Pemerintah daerah dituntut untuk membangun berbagai fasilitas layanan publik seperti Rumah Sakit/Puskesmas, Gedung Sekolah, jalan-jalan kota yang memudahkan mobilitas masyarakat. Jadi semakin luas daerah yang perlu dibangun maka semakin besar belanja modal yang harus dianggarkan.

Menurut Peraturan menteri dalam Negeri no.72 tahun 2019 luas wilayah merupakan wilayah darat daerah provinsi dan kabupaten kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, di dalam peraturan menteri no. 72 tahun 2019 ini juga menjelaskan bahwa luas wilayah di ukur dalam satuan KM².

B. Hasil Penelitian yang Relevan

Putra (2018), Universitas Udayana dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten karangasem.

Panji (2014), Universitas Udayana dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PAD pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai variabel pemoderasi”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di Bali.

Mawarni (2013), Universitas Syah Kuala dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi Daerah (Studi pada kabupaten dan kota di Aceh)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di Aceh.

Nufus (2013), Universitas Syah Kuala dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Dana Otonomi Khusus sebagai pemoderasi pada kabupaten dan kota di Aceh”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD berpengaruh negatif terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di Aceh, sementara Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten dan kota di Aceh.

Priatna (2019), Universitas Bale Bandung dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal pemerintah daerah kabupaten Bandung (studi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten Bandung, sementara Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal pemerintah kabupaten Bandung

Nugraeni (2011), Universitas PGRI Yogyakarta dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap Belanja Modal”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Meianto (2014), STIE Palembang dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan luas wilayah terhadap Belanja Modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Selatan”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Wibisono (2016), Universitas Merdeka Madiun dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, SilPA, dan Luas Wilayah terhadap alokasi anggaran Belanja Modal”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD dan Luas Wilayah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Erlis (2010), Universitas Bung Karno dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan SilPA terhadap Belanja Modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi (studi pada kabupaten/kota hasil pemekaran daerah di pulau Sumatera)”. Hasil dari penelitian tersebut yaitu PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Sementara Luas Wiayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota hasil pemekaran di pulau Sumatera.

TABEL II 1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Jurnal	Judul	Metode	Hasil
1	Putra (2018) E-Jurnal Ekonomi Pebangunan Universitas Udayana Vol. 7, No. 10	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali.	Populasi: Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Sampel: Kabupaten Karangasem di provinsi Bali Variabel Dependen: Belanja modal	1. PAD berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal 2. Dana perimbangan

No	Jurnal	Judul	Metode	Hasil
	ISSN 2303-0178		Variabel Independen: PAD, Dana perimbangan	berpengaruh signifikan positif terhadap belanja modal
2	Panji (2014) E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 1, No 7 ISSN 2302-8556	Pengaruh PAD pada belanja modal dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi	Populasi: Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Bali Sampel: Seluruh Kabupaten dan Kota di provinsi Bali Variabel Dependen: Belanja modal Variabel Independen: PAD, Pertumbuhan Ekonomi	1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
3	Mawarni (2013) Jurnal Akuntansi Universitas Syah Kuala	Pengaruh PAD dan DAU terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi	Populasi: Seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh sebanyak 23	1. PAD mempunyai hubungan positif dan signifikan

No	Jurnal	Judul	Metode	Hasil
	Vol 2, No. 2 ISSN 2302-0164	Daerah (Studi pada kabupaten dan kota di Aceh)	Sampel: Kabupaten dan Kota di provinsi Aceh yang memenuhi criteria sebanyak 21. Variabel Dependen: Belanja modal Variabel Independen: PAD, DAU	terhadap belanja modal
4	Nufus (2017) Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) Universitas Syah Kuala Vol. 2, No. 3 E-ISSN 2581-1002	Pengaruh pendapatan sendiri dan dana perimbangan terhadap belanja modal dengan dana otonomi khusus sebagai pemoderasi pada kabupaten dan kota di Aceh	Populasi: Seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh Sampel: Seluruh Kabupaten dan Kota di Aceh Variabel Dependen: Belanja modal Variabel Independen: PAD, dana perimbangan, dana otonomi khusus.	1. PAD berpengaruh signifikan dan negatif terhadap belanja modal 2. Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal

No	Jurnal	Judul	Metode	Hasil
5	Priatna (2019) Jurnal Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bale Bandung Vol 3, No 2 ISSN: 2087 - 4742	Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten bandung (studi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung)	Populasi: Laporan keuangan tahunan BKD kabupaten bandung Sampel: Laporan keuangan tahunan BKD kabupaten bandung selama 10 tahun 2007-2016 Variabel Dependen: Belanja modal Variabel Independen: PAD, dana perimbangan.	1. PAD mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal 2. Dana perimbangan mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap belanja modal
6	Nugraeni (2011) Universitas PGRI Yogyakarta	Pengaruh DAU, DAK, PAD terhadap belanja modal	Populasi: Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia	1. Dana Perimbangan berpengaruh positif dan

No	Jurnal	Judul	Metode	Hasil
	Vol. 8, No. 2 ISSN: 1410 – 2420		Sampel: 295 Kabupaten dan Kota di Indonesia Variabel Dependen: Belanja modal Variabel Independen: PAD, dana perimbangan.	signifikan terhadap belanja modal
7	Meianto (2014) Jurnal Akuntansi STIE Palembang Vol. 12, No. 2	Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pendapatan asli daerah, dan luas wilayah terhadap belanja modal pada kabupaten dan kota di Sumatera Selatan	Populasi: Seluruh kabupaten kota Sumatera Selatan Sampel: 15 kabupaten dan kota Sumatera Selatan Variabel Dependen: Belanja modal Variabel Independen: DAU,DAK,PAD, luas wilayah	1. PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal 2. luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap luas wilayah
8	Wibisono (2016)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU,	Populasi: Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur	1. PAD berpengaruh positif dan

No	Jurnal	Judul	Metode	Hasil
	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Akuntansi Universitas Merdeka Madiun Vol. 5, No. 2 ISSN : 230- 4747	SilPA, dan luas wilayah terhadap alokasi belanja modal	Sampel: Seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2014 Variabel Dependen: Belanja modal Variabel Independen: Pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, SilPA, dan luas wilayah	signifikan terhadap belanja modal 2. Luas wilayah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal
9	Erlis (2010) Jurnal Akuntansi Universitas Bung Hatta Vol. 4, No. 1	Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan SilPA terhadap belanja modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi (studi pada kabupaten/kota hasil pemekaran daerah di pulau Sumatera)	Populasi: seluruh kabupaten/ kota di Sumatera Sampel: 77 kabupaten/kota hasil pemekaran wilayah di sumatera Variabel Dependen: Belanja modal	1. PAD memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal 2. Luas wilayah tidak berpengaruh

No	Jurnal	Judul	Metode	Hasil
			Variabel Independen: pertumbuhan ekonomi, Silpa, PAD, DAU.	terhadap belanja modal

Sumber : Data diolah penulis 2021

C. Kerangka Teoritik

1. Pengaruh PAD terhadap Belanja Modal

Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pemerintah Daerah tidak hanya di tuntutan untuk mengoptimalkan potensi pendapatan daerah yang di miliki, namun juga harus bisa memposisikan belanja modal yang jumlahnya harus lebih besar untuk pembangunan pada sektor yang produktif dalam APBD, Pemerintah Daerah mengalokasikan dana APBD dalam bentuk belanja modal untuk memenuhi sarana prasarana dan infrastruktur daerah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah daerah dalam melaksanakan dan menjalankan pelayanan publik.

Penelitian yang dilakukan Putra (2018), Panji (2014), dan Mawarni (2013) PAD mempunyai Hubungan Positif dan signifikan terhadap Belanja Modal peningkatan PAD akan Meningkatkan Alokasi Belanja Modal, sehingga mampu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana publik, sedangkan Penelitian yang dilakukan oleh Nufus (2017) PAD berpengaruh Negatif terhadap Belanja Modal. Menurut Priyatna (2019) yang meneliti pengaruh PAD dan Dana Perimbangan membuktikan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal hal ini berarti tambahan PAD tidak membuat alokasi belanja modal bertambah.

Perbedaan hasil penelitian dikarenakan sampel yang berbeda, sumber PAD terbesar adalah pajak daerah dan retribusi daerah. Untuk daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai, akan di peroleh pajak yang cukup besar, tetapi untuk daerah berkembang, pemerintah daerah hanya memungut pajak dalam jumlah yang terbatas, hal ini juga terjadi pada pendapatan retribusi daerah yang besaran retribusi yang di terima perdaerah sangat bervariasi atau berbeda beda tergantung dari potensi dari daerah tersebut.

2. Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal

Dana Perimbangan yang meningkat akan mampu menunjang belanja modal yang belum dapat dilakukan oleh daerah karena keterbatasan anggaran kemampuan setiap daerah tentunya berbeda, setiap daerah apabila menjalankan pembangunan dengan dana PAD

saja akan menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin tinggi. maka dari itu melalui dana perimbangan pemerintah pusat melaksanakan desentralisasi fiskal, yang nantinya pemerintah daerah dalam melakukan tambahan belanja bersumber dari dana perimbangan tersebut.

Dana perimbangan dalam UU No.25 Tahun 1999 dan UU No.33/2004 adalah terdiri dari (a) Dana Bagi Hasil (b) Dana Alokasi Umum (c) Dana Alokasi Khusus.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Nugraeni (2011) dan Mawarni (2013) Dana Perimbangan yang meningkat akan mampu menunjang belanja modal yang belum dapat dilakukan oleh daerah karena keterbatasan anggaran kemampuan masing masing daerah tentunya berbeda, setiap daerah apabila menjalankan pembangunan dengan dana PAD saja akan menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin tinggi, maka dari itu melalui dana perimbangan pemerintah pusat melaksanakan desentralisasi fiskal, yang nantinya pemerintah daerah dalam melakukan tambahan belanja bersumber dari dana perimbangan tersebut. Menurut Priatna (2019) yang meneliti pengaruh PAD dan Dana Perimbangan membuktikan bahwa Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal hal ini berarti

tambahan Dana Perimbangan tidak membuat alokasi belanja modal bertambah.

Penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018) dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian Nugraeni (2011) dan Mawarni (2013). Menurut Priatna (2019) yang meneliti pengaruh PAD dan Dana Perimbangan membuktikan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini berarti tambahan Dana Perimbangan tidak membuat alokasi belanja modal bertambah.

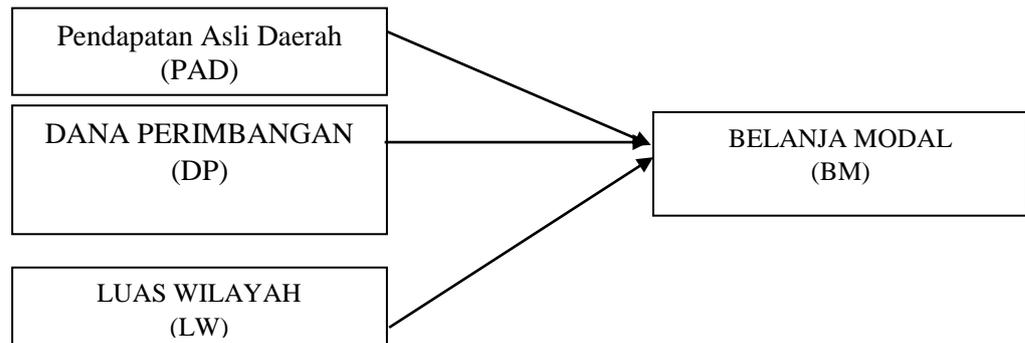
3. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Luas Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Putra, 2011). Penelitian yang dilakukan oleh Wibisono (2016) dan Meianto (2014) Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa makin luas suatu daerah maka membutuhkan sarana dan prasarana yang menunjang untuk memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Erlis (2010) luas wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah tidak mengalokasikan belanja modal dengan pertimbangan luas wilayah.

Berdasarkan penjelasan yang dilakukan oleh beberapa penelitian, maka peneliti menyimpulkan bahwa semua variabel tersebut

berhubungan, hal ini dapat dilihat dari gambar kerangka berpikir berikut ini:

**GAMBAR II. 1
KERANGKA PEMIKIRAN**



Sumber: data diolah oleh penulis 2021

D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan uraian kerangka teori di atas maka dapat dibuat perumusan hipotesis sebagai berikut:

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah atau PAD yang meningkat dan dialokasikan ke belanja modal akan memberikan manfaat untuk meningkatkan penyediaan fasilitas publik melalui pembangunan saran dan prasarana terutamanya pembangunan infrastruktur.

H1: PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Transfer APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berupa belanja modal. Semakin tinggi Alokasi Transfer APBN Kepada APBD dalam Dana Perimbangan diharapkan membuat pemerintah daerah memprioritaskannya untuk Belanja Modal karena berkaitan dengan pelayanan publik.

H2: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Belanja Modal

Luas wilayah merupakan variabel yang mencerminkan kebutuhan atas penyediaan sarana dan prasarana per-satuan wilayah, semakin besar luas wilayah suatu daerah pemerintahan maka semakin banyak juga sarana dan prasarana yang harus disediakan pemerintah daerah agar tersedia pelayanan publik yang baik. Pemerintah sebaiknya menciptakan fasilitas publik yang memadai sesuai dengan luas wilayah maka pemerintah perlu menganggarkan jumlah belanja modal yang sesuai agar tercipta fasilitas publik disetiap wilayah.

H3: Luas Wilayah berpengaruh terhadap Belanja Modal

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Objek dari penelitian ini adalah variabel bebas (independen) yaitu PAD, Dana Perimbangan, dan Luas Wilayah terhadap variabel terikat (dependen) yaitu belanja modal. Data untuk penelitian ini adalah data laporan tahunan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal dari Kemenkeu.go.id dan data Luas Wilayah dari BPS.go.id. tahun 2017-2019.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji variabel bebas atau independen yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan dan luas wilayah. Dengan melakukan pengujian terhadap variabel terikat atau dependent yaitu alokasi anggaran belanja modal.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2009). Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah tingkat Kota dan Kabupaten di Pulau Sumatera yang berjumlah 154 Kota/Kabupaten. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah Kota dan

Kabupaten di pulau sumatera pada tahun 2017–2019. Data sampel diambil dengan menggunakan *purposive sampling* dengan kriteria yaitu:

1. Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di pulau sumatera yang dapat di akses laporan keuangannya secara konsisten dari tahun 2017-2019.
2. Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di pulau sumatera yang mendapatkan Dana Perimbangan secara konsisten dari tahun 2017-2019.
3. Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di pulau sumatera Kabupaten yang dapat di akses Data Luas Wilayahnya.

D. Operasionalisasi Variabel Penelitian

Seperti yang sudah disebutkan di atas bahwa penelitian ini menggunakan data sekunder. yang bersumber dari bps.go.id, Peraturan Menteri dalam Negeri no. 72 tahun 2019 tentang kode wilayah dan kewilayahan dan Jendral Perimbangan Keuangan kementrian Keuangan Republik Indonesia di www.kemenkeu.go.id. Data tersebut disusun mulai tahun 2017 sampai tahun 2019, yang kemudian dimasukkan ke dalam beberapa variabel. Adapun variabel yang digunakan adalah:

1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang tidak bebas, terikat dan mempengaruhi setiap variabel bebas atau variabel independen (Sekaran, 2017). Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal.

a) Definisi Konseptual

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) 2010, pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset.

b) Definisi Operasional

Dalam SAP 2010, belanja modal terdiri dari beberapa jenis belanja modal 5 (lima) yang dikategori utama yaitu Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Modal Fisik Lainnya. Data Belanja Modal akan diperoleh dari DJPK kemenkeu.go.id.

Dalam penelitian ini data di sajikan menggunakan aplikasi SPSS dan penulis mentransformasikan data dengan logaritma natural (Ln), hal ini dilakukan untuk menyamakan *range* agar data tidak terlalu jauh antar satu variabel.

2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang terjadi karena perubahan dan menimbulkan variabel terikat atau variabel dependen (sekaran, 2017). Berikut Variabel adalah variabel Independen:

a) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

1) Definisi Konseptual

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18, PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini data pendapatan asli daerah (PAD) di sajikan menggunakan aplikasi SPSS dan penulis mentransformasikan data dengan logaritma natural (\ln), yang mana dilakukan juga dalam penelitian oleh mawarni (2013).

b) Dana Perimbangan (DP)

1) Definisi Konseptual

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

2) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini data dana perimbangan (DP) dihitung dengan menggunakan logaritma natural (\ln) yang mana dilakukan juga dalam penelitian oleh mawarni (2013),

c) Luas Wilayah (LW)

1) Definisi Konseptual

Luas Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (Putra, 2011).

2) Definisi Operasional

Dalam penelitian ini data Luas wilayah di dihitung dengan menggunakan logaritma natural (Ln) yang mana dilakukan juga dalam penelitian oleh erlis (2013) yang menggunakan data luas wilayah dalam satuan KM^2 dengan Logaritma Natural.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis kuantitatif menggunakan teknik perhitungan statistic. Dalam menganalisis data, peneliti menyusun data-data dari masing-masing variabel berdasarkan data panel (*pooled data*) dengan menggunakan SPSS.

1. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah analisis statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2009). Uji statistik deskriptif adalah metode

statistik yang menggambarkan sifat-sifat data. Kegiatan statistik di sini berupa kegiatan pengumpulan data, penyusunan data dan penyajian data dalam bentuk-bentuk tabel, grafik-grafik, maupun diagram-diagram (Noegroho, 2016).

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan grafik *normal probability plot*, Uji Histogram serta pengujian *one sample kolmogorov smirnov*, yaitu untuk membandingkan antara distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Uji normalitas pada data merupakan salah satu cara untuk menguji pada sebuah model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Model regresi yang baik adalah data yang berdistribusi normal atau mendekati normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid atau jumlah sampel kecil. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji dengan rumus Kolmogorov-Smirnov SPSS. Dengan plot ini masing-masing pengamatan dipasangkan dengan nilai harapan pada distribusi normal. Bila titik-titik menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah diagonal berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Dasar pengambilan keputusan uji Kolmogorov-Smirnov SPSS, yaitu:

- 1) Data berdistribusi normal, jika nilai sig(signifikan) $>0,05$

2) Data berdistribusi tidak normal, jika nilai sig(signifikan) $<0,05$

b. Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2018), tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas. Uji multikolinieritas merupakan uji untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam satu model. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak ada korelasi antara variabel independen. Apabila sebagian atau seluruh variabel independen berkorelasi kuat berarti terjadi multikolinearitas. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance (tolerance value)* dan nilai *Variance Inflation Faktor (VIF)*. Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Semua variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan regresi harus mempunyai *tolerance* di atas 10%. Pada umumnya VIF lebih besar dari 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolinieritas dengan variabel bebas lainnya. Oleh sebab itu, ketentuan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* $>0,1$ dan nilai VIF <10

c. Uji Heterokedastisitas

Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas, pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat pola penyebaran grafik plot, cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam data yang akan kita olah menurut Imam Gazhali (2011:139), yaitu dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik penyebaran *scatterplot* dengan analisis:

- 1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan adanya heteroskedastisitas
- 2) Jika tidak ada pola tertentu, serta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk menguatkan pengujian heteroskedastisitas dilakukan uji statistik Glejser dilakukan dengan mengabsolutkan nilai residual hasil regresi, setelah itu dilakukan regresi ulang dengan nilai absolut residual sebagai variabel dependen dan hasilnya dapat dilihat melalui tabel *coefficients*.

Jika hasil signifikansi berada di atas 5% maka dapat disimpulkan bahwa varabel-variabel tersebut sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi antar variabel pada suatu periode dengan periode lainnya. apabila terjadi korelasi maka pada model regresi tersebut ada autokorelasi. Menurut (Ghozali, 2018). Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas masalah autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin – Watson *DW test*). Uji Durbin Watson dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai taksiran faktor gangguan yang berurutan.

TABEL III. 1
Pengambilan keputusan Autokorelasi

No	Ho	Keputusan	Jika
1	Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
2	Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
3	Tidak ada autokorelasi negative	Tolak	$4 - d_u < d < 4$
4	Tidak ada autokorelasi negative	No Decision	$4 - d_l \leq d \leq 4 - d_u$
5	Tidak ada autokorelasi positif/negative	Diterima	$d_u < d < 4 - d_u$

e. Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik analisis yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa variabel independen secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri terhadap variabel dependen. Hubungan fungsional antara satu variabel independen dapat dilakukan dengan regresi berganda dan menggunakan data panel. Model Persamaan regresi menggunakan spss adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 PAD + \beta_2 DP + \beta_3 LW + e$$

Dimana:

Y = Belanja Modal (BM)

α = Konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = Koefisien regresi dari variabel independen

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DP = Dana Perimbangan

LW = Luas Wilayah

e = standar eror

3. Pengujian Hipotesis

a. Penetapan Hipotesis

Hipotesis yang di uji pada penelitian ini terkait dengan pengaruh variabel Independen terhadap variabel dependen. Rancangan yang dapat diambil di awali dengan menetapkan hipotesis nol (H_0) yang dimaksudkan dalam penelitian ini sebagai petunjuk bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan sedangkan hipotesis alternatif (H_a)

yang dimaksudkan sebagai petunjuk bahwa adanya pengaruh yang signifikan, berikut adalah penetapan hipotesis :

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

H0₁: Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Ha₁: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

2) Dana Perimbangan (DP)

H0₂: Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Ha₂: Dana Perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.

3) Luas Wilayah (PAD)

H0₃: Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Ha₃: Luas Wilayah berpengaruh terhadap belanja modal.

b. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji T)

Menurut (Ghozali, 2011) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Langkah yang digunakan untuk menguji hipotesis ini adalah dengan menentukan *level of significance*-nya yaitu sebesar 5 % atau $(\alpha) = 0,05$.

- 1) Jika signifikan $t < 0,05$ maka hipotesis (H_a) diterima dan hipotesis (H_0) ditolak yang ini berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- 2) Jika signifikan $t \geq 0,05$ maka hipotesis (H_a) ditolak dan hipotesis (H_0) diterima). Hal ini berarti secara parsial variabel independen tersebut tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

c. Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model yang menunjukkan apakah model regresi *Goodness Of fit* untuk diolah lebih lanjut. Uji kelayakan model pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat (Kuncoro, 2007:98) Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Ketentuan penerimaan atau penolakan hipotesis adalah sebagai berikut: (1) Jika nilai signifikansi $F > 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan tidak layak. (2) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$ maka model penelitian dapat dikatakan layak.

d. Adjusted R²

Koefisien determinasi (*Adjusted R²*) menunjukkan suatu proporsi dari variabel independen yang dapat menerangkan variabel dependen dengan persamaan regresi berganda. Nilai *Adjusted R²* memiliki kisaran 0 sampai dengan 1. Hal ini menunjukkan seberapa besar proporsi variabel-variabel independen yang dapat menerangkan variabel dependennya. Jika nilai variabel mendekati 1 maka variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dengan lebih baik.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

1. Hasil Pemilihan Sampel

Penelitian ini membahas mengenai hubungan variabel independen, dengan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Luas wilayah dan variabel dependen, belanja modal. Populasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah seluruh Kabupaten dan Kota di semua Provinsi di Pulau Sumatera periode 2017-2019. Untuk menentukan sampel penelitian, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria yang dimaksud diantaranya dapat dilihat pada tabel IV.1.

TABEL VI. 1
Jumlah Sampel Penelitian

Keterangan	Jumlah
Kabupaten dan kota di Pulau Sumatera	154
laporan keuangan pemerintah kabupaten dan kota di sumatera yang tidak dapat di akses 2017-2019	(0)
Pemerintah kota dan kabupaten di sumatera yang tidak mendapatkan dana perimbangan	(0)
Pemerintah Kota dan kabupaten yang data luas wilayahnya tidak bisa di akses	(0)
Total Kabupaten dan kota di pulau sumatera yang tidak lengkap data variabel yang diteliti	(0)
Jumlah tahun yang menjadi sampel penelitian	3
Total Jumlah observasi secara keseluruhan (3 tahun x 154 kabupaten dan kota)	462

Sumber : Data diolah peneliti, 2021

2. Analisis Deskriptif

Hasil statistik deskriptif dalam penelitian ini dilakukan setelah melakukan regresi terhadap data penelitian yang mengalami bentuk transformasi data. Analisis data yang dilakukan tersebut terkait dengan informasi mengenai nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi. Statistik deskriptif variabel-variabel penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.2.

TABEL VI. 2
Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LN_BM	462	25.07	27.74	26.2396	.47951
LN_PAD	462	23.64	28.24	25.3395	.77584
LN_DP	462	26.78	28.79	27.4712	.36891
LN_LW	462	3.14	9.82	7.3935	1.45740
Valid N (listwise)	462				

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Tabel IV.2 memberikan informasi mengenai masing-masing variabel independen dan dependen yang akan diuji dalam penelitian ini. Selanjutnya standar deskriptif masing-masing variabel dapat dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Modal

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Belanja Modal. Berdasarkan data rupiah penuh yang dihitung menggunakan Logaritma Natural laporan keuangan yang diperoleh dari *website* kementerian keuangan, menunjukkan bahwa rata-rata tingkat belanja modal pemerintah daerah Kabupaten dan Kota di pulau Sumatera selama periode 2017-2019 adalah sebesar 26.23. Tingkat belanja modal terendah terjadi pada Kabupaten Sawah Lunto tahun 2017 yaitu sebesar 25.07. Sedangkan yang terbesar terjadi pada Kota Palembang tahun 2019 yaitu sebesar 27.74.

b. PAD

Variabel independen yang pertama adalah PAD. Berdasarkan data rupiah penuh yang diperoleh dari laporan DJPK kementerian keuangan dihitung menggunakan Logaritma Natural, dapat dilihat bahwa rata-rata Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera adalah 25,33, Kabupaten dan kota yang memiliki Pendapatan Asli Daerah terendah adalah Kabupaten Nias Barat tahun 2019 yaitu sebesar 23,64 Sedangkan kota yang memiliki PAD terbesar adalah Kota Medan tahun 2019 yaitu sebesar 28,24

c. Dana Perimbangan

Variabel independen yang selanjutnya adalah Dana Perimbangan. Berdasarkan data rupiah penuh yang diperoleh dari laporan DJPK kementerian keuangan dihitung menggunakan Logaritma Natural, dapat dilihat bahwa rata-rata Dana Perimbangan adalah 27,47. Kabupaten dan

kota yang memiliki Dana Perimbangan terendah adalah Kabupaten Pakpak Bharat tahun 2018 yaitu sebesar 26,78. Sedangkan kabupaten dan kota yang memiliki nilai terbesar adalah Kabupaten bengkalis tahun 2019 yaitu sebesar 28,74.

d. Luas Wilayah

Variabel independen yang selanjutnya adalah luas wilayah. Berdasarkan data luas wilayah yang diperoleh dari *website* BPS yang dihitung menggunakan Logaritma Natural, menunjukkan bahwa rata-rata luas wilayah daerah Kabupaten Kota di Pulau Sumatera selama periode 2017-2019 adalah sebesar 7,39. Kabupaten dan Kota yang memiliki luas wilayah terkecil adalah Kota Padang Panjang yaitu seluas 3,14. Sedangkan Kabupaten dan Kota yang memiliki luas wilayah terluas adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebesar 9,82.

B. Uji Asumsi Klasik

Seperti yang sudah di jelaskan di bab III, bahwa dalam uji asumsi klasik, normalitas data dapat diuji dengan 5 uji yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokolerasi, uji heterokedasitas dan Analisis Regresi Linier Berganda.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dalam model ini untuk melihat apakah *error term* dalam model mengikuti distribusi normal atau tidak. Pada awal penelitian dengan menggunakan data asli didapatkan bahwa data mengalami masalah pada uji asumsi klasik, sehingga

dilakukan pengujian ulang dengan mentransformasikan data ke dalam logaritma natural.

Normalitas data merupakan syarat pokok yang harus dipenuhi dalam analisis parametik. Untuk yang menggunakan analisis parametik seperti analisis perbandingan dua rata-rata, analisis variansi satu arah, korelasi maka perlunya dilakukan uji normalitas data terlebih dahulu untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Syarat yang harus dipenuhi adalah data berdistribusi normal (Priyatno, 2017). Hasil pengujian uji normalitas disajikan sebagai berikut.

a. Analisis Kolmogorov – Smirnov

Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan uji dengan rumus Kolmogorov-Smirnov SPSS. Dasar pengambilan keputusan uji Kolmogorov-Smirnov SPSS, yaitu:

- 1) Data berdistribusi normal, jika nilai $\text{sig}(\text{signifikan}) > 0,05$
- 2) Data berdistribusi tidak normal, jika nilai $\text{sig}(\text{signifikan}) < 0,05$

TABEL VI. 3
Uji Kolmogorov Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		462
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,34675154
Most Extreme Differences	Absolute	,040
	Positive	,040
	Negatif	-,025
Test Statistic		,040
Asymp. Sig. (2-tailed)		,081 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

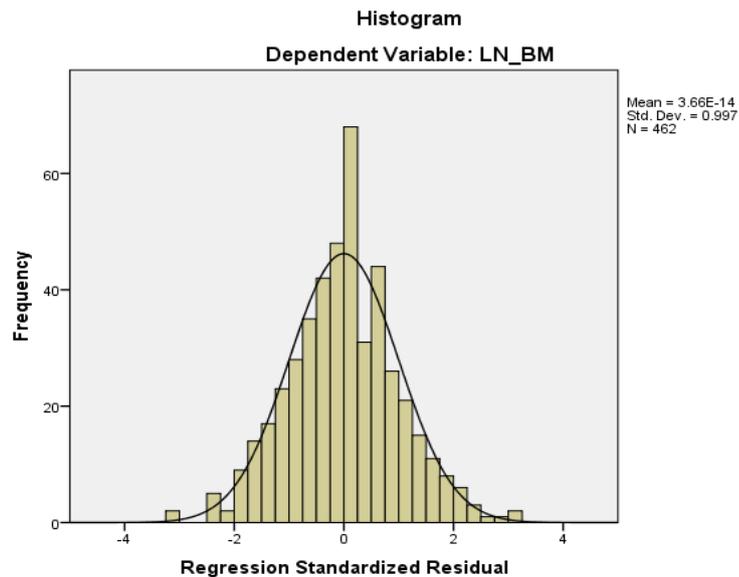
Dari tabel IV.3 Uji Kolmogorov-Smirnov, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi Asymp. Sig (2-tailed) yaitu sebesar 0,081, nilai tersebut di atas 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa data residual terdistribusi secara normal. Dari uji di atas, menunjukkan bahwa data telah terdistribusi secara normal sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Histogram

Model regresi penelitian ini terlihat terdistribusi normal pada gambar IV.1 terlihat bahwa grafik histogramnya menunjukkan pola

distribusi normal atau tepat di tengah. Terlihat bahwa tidak terjadi kemencengan/ tidak seimbang.

GAMBAR VI. 1
Gambar Analisis Grafik

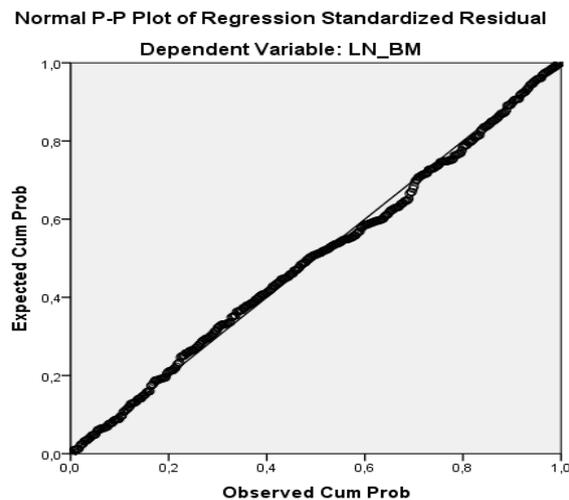


Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

c. Uji Normalitas dengan Analisis Grafik

Untuk memastikan bahwa data yang digunakan dalam penelitian berdistribusi normal maka dilakukan uji Normal Probability Plot.

GAMBAR VI. 2
Gambar Analisis Grafik P-Plot



Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Pada gambar IV.2 dapat dilihat pola penyebarannya yaitu data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Oleh karena itu menunjukkan data terdistribusi secara normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Berdasarkan uji normalitas yang dilakukan analisis kolgomorov – Smirnov dan analisis grafik menunjukkan bahwa data variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolonieritas merupakan uji untuk mengetahui apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi atau hubungan antar variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain dalam satu model. Model regresi dapat dikatakan baik apabila tidak ada korelasi antara variabel independen.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari nilai *tolerance* (*tolerance value*) dan nilai *Variance Inflation Faktor*(VIF). Ketentuan tidak terjadi multikolinieritas apabila nilai *tolerance* >0,1 dan nilai VIF<10.

TABEL VI. 4
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	LN_PAD	,471	2,125
	LN_DP	,369	2,708
	LN_LW	,628	1,593

a. Dependent Variable: LN_BM

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Tabel IV.4 menunjukkan nilai *tolerance* untuk semua variabel lebih dari 0,10. Artinya, tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95%. Hal ini diperkuat dengan nilai VIF untuk semua variabel independen yang kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabelin dependen didalam model regresi tidak memiliki masalah multikorelasi.

3. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah ada atau tidak korelasi antar variabel pada suatu periode dengan periode lainnya. Jika terjadi korelasi maka dalam model regresi tersebut ada autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang

bebas masalah autokorelasi. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan Uji Durbin – Watson (*DW test*). Uji Durbin Watson dihitung berdasarkan jumlah selisih kuadrat nilai taksiran faktor gangguan yang berurutan

TABEL VI. 5
Uji Durbin – Watson
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,691 ^a	,477	,474	,34789	1,884

a. Predictors: (Constant), LN_LW, LN_PAD, LN_DP

b. Dependent Variable: LN_BM

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Berdasarkan tabel IV.5 dapat dilihat dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data(n) = 462, serta k=3 (adalah jumlah variabel independen) diperoleh nilai dL sebesar 1,83820 dan nilai dU sebesar 1.85567 sehingga nilai 4-dL= 2,1618 dan 4-dU= 2,14433 terletak diantara dU dan 4-dU ($1,85567 < dw < 2,187$) yang berarti model regresi terbebas dari masalah autokorelasi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini sudah memenuhi asumsi autokorelasi.

4. Uji Heterokedasitas

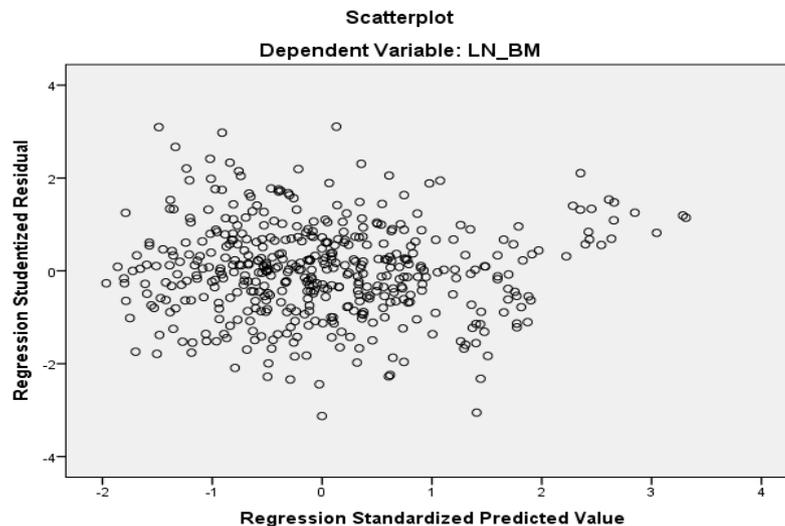
Uji heteroskedastisitas merupakan salah satu uji yang bertujuan untuk menguji ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain sama, maka hal tersebut adalah homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Uji

heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi penyimpangan variabel bersifat konstan atau tidak. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini dapat digunakan grafik plot dan uji glejser. Residual dapat dikatakan homoskedastisitas (tidak terjadi heteroskedastisitas) apabila signifikansi di atas 0,05

a. Uji Grafik *Scatterplot*

Uji Grafik *Scatterplot* dalam pengujian heteroskedastisitas melihat ada tidaknya pola tertentu yang teratur pada titik-titik yang tersebar dalam gambar, seperti bergelombang, melebar kemudian menyempit, dst. Jika ditemukan suatu pola tertentu, berarti data dalam model regresi mengalami masalah heteroskedastisitas. Berikut merupakan hasil Uji Grafik *Scatterplot*:

GAMBAR VI. 3
Uji Scatterplot



Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2020

Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini disebabkan karena tidak adanya suatu pola tertentu yang teratur yang tergambar pada hasil pengujian tersebut.

b. Uji Glejser

Uji statistik Glejser dilakukan dengan mengabsolutkan nilai residual hasil regresi, setelah itu dilakukan regresi ulang dengan nilai absolut residual sebagai variabel dependen dan hasilnya dapat dilihat melalui tabel *coefficients*.

Jika hasil signifikansi berada di atas 5% maka dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel tersebut sudah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Berikut adalah tabel hasil uji Glejser.

Tidak adanya suatu pola tertentu yang teratur yang tergambar pada hasil pengujian tersebut.

TABEL VI. 6
Uji GLEJSER
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,060	,925		-,065	,949
	LN_PAD	,005	,019	,017	,252	,801
	LN_DP	,008	,046	,013	,173	,863
	LN_LW	-,002	,009	-,011	-,184	,854

a. Dependent Variable: abs_res

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Berdasarkan tabel IV.6 diketahui bahwa nilai signifikansi variable PAD sebesar 0,801, Dana Perimbangan sebesar 0,863, dan Luas Wilayah sebesar 0,854 seluruh variabel X memiliki nilai sig > 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastitas nilai residual dari setiap variabel dalam penelitian ini memiliki signifikansi di atas 0,05 sehingga memenuhi asumsi homoskedasitas atau bebas dari heteroskedasitas.

5. Uji Regresi Linier Berganda

Setelah variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini terbebas dari masalah uji asumsi klasik, selanjutnya dapat melakukan analisis regresi linier berganda yang bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan luas wilayah terhadap belanja modal. Rumus dari

analisis berganda dalam penelitian ini, dapat dituliskan sebagai berikut:

$$BM = \alpha + (\beta_1.PAD) + (\beta_2.DP) + (\beta_3.LW) + e$$

Keterangan:

BM : Belanja Modal

α : Konstanta

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DP : Dana Perimbangan

LW : Luas Wilayah

e : Error

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang telah dilakukan diperoleh hasil sebagai berikut:

TABEL VI. 7
Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	3,421	1,463		2,338	,020
	LN_PAD	,073	,030	,118	2,394	,017
	LN_DP	,758	,072	,583	10,492	,000
	LN_LW	,019	,014	,058	1,354	,176

a. Dependent Variable: LN_BM

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Berdasarkan hasil analisis regresi berganda yang disajikan dalam tabel IV.7 di atas maka dapat dituliskan model regresi sebagai berikut:

$$BM = 3,421 + (0,073.PAD) + (0,758.DP) + (0,019.LW) + e$$

Dari persamaan di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Konstanta sebesar 3,421, artinya jika PAD, Dana Perimbangan, Luas Wilayah, tetap bernilai (konstan), maka belanja modal bernilai 3.421.
- b) Nilai koefisien variabel Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,073 mempunyai arti jika variabel independen lain bernilai konstan dan variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 1% maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,073. Koefisien bertanda Positif yang berarti terjadi hubungan Positif dan apabila pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan Semakin Bertambah.
- c) Nilai koefisien variabel dana perimbangan sebesar 0,758 mempunyai arti jika variabel independen lain bernilai konstan dan variabel Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan 1% maka belanja modal akan bertambah sebesar 0,0758. Koefisien bertanda Positif yang berarti terjadi hubungan Positif dan apabila pendapatan asli daerah, maka belanja modal akan semakin bertambah.
- d) Nilai koefisien variabel luas wilayah sebesar 0,019, artinya ketika variabel luas wilayah meningkat 1% maka variabel belanja modal akan bertambah sebesar 0,019. Koefisien bertanda positif yang

berarti, terjadi hubungan positif dan apabila luas wilayah bertambah maka belanja modal juga akan semakin bertambah

C. Uji Hipotesis

Uji hipotesis merupakan suatu metode pengambilan keputusan yang berdasarkan dari analisis data. Uji hipotesis bisa dilakukan dengan menggunakan 3 uji yaitu uji T, uji F dan uji R^2

1. Uji Statistik T (Parsial)

Seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya, uji statistik t dilakukan untuk menguji pengaruh variabel independen secara parsial atau terpisah terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Uji t bertujuan memberikan gambaran sejauh mana pengaruh satu variabel independen dengan variabel dependen. Pengukuran yang dipakai adalah dengan menggunakan perbandingan t_{tabel} dan t_{hitung} . Jika $t_{tabel} > t_{hitung}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak atau bila $t_{tabel} < t_{hitung}$ maka **H_a diterima dan H_0 ditolak** dengan derajat kepercayaan 0,05 atau 5% dan t_{tabel} dengan 462 dan 3 variabel sebesar 1,659. Berikut adalah tabel hasil dari uji t yang dapat dilihat pada tabel IV.8

TABEL VI. 8
Uji Statistik T
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	T	Sig.
1	(Constant)	3,421	1,463		2,338	,020
	LN_PAD	,073	,030	,118	2,394	,017
	LN_DP	,758	,072	,583	10,492	,000
	LN_LW	,019	,014	,058	1,354	,176

a. Dependent Variable: LN_BM

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Berdasarkan hasil pengujian dapat diperoleh hasil:

1) Pengujian Hipotesis 1

Dengan derajat kepercayaan sebesar 5%, variabel PAD berpengaruh secara signifikan secara statistik terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,96516 < 2,394$). Untuk uji signifikansi konstanta dan variabel independen, dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,017 < \alpha(0,050)$ **Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0 ditolak dan H_{a1} diterima.** Dengan demikian ketika PAD mengalami peningkatan maka nilai belanja modal akan semakin meningkat.

2) Pengujian Hipotesis 2

Dengan derajat kepercayaan sebesar 5%, variabel Dana Perimbangan berpengaruh secara tidak signifikan dengan arah Positif secara statistik terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai $t_{tabel} < t_{hitung}$ ($1,96516 < 10,492$). Untuk uji signifikansi

konstanta dan variabel independen, dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,00 < \alpha (0,050)$ **Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0_2 ditolak dan H_{a2} diterima.** Dengan demikian ketika Dana Perimbangan mengalami peningkatan maka nilai belanja modal akan semakin signifikan.

3) Pengujian Hipotesis 3

Dengan derajat kepercayaan sebesar 5%, variabel Dana Perimbangan berpengaruh secara tidak signifikan secara statistik terhadap belanja modal. Hal ini dapat dilihat dari hasil nilai $t_{tabel} > t_{hitung}$ ($1,96516 > 1,354$). Untuk uji signifikansi konstanta dan variabel independen, dari tabel di atas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,176 > \alpha (0,050)$ **Maka dapat diambil kesimpulan bahwa H_0_3 diterima dan H_{a3} ditolak.** Dengan demikian luas wilayah tidak mempengaruhi belanja modal.

2. Uji F Kelayakan Model

Uji kelayakan model dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Pengujian ini menggunakan uji statistik F yang terdapat pada tabel Anova.

Hasil pengujian statistik F yang dilakukan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel IV.9.

TABEL VI. 9
Uji Statistik F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	50,569	3	16,856	139,279	,000 ^b
	Residual	55,429	458	,121		
	Total	105,998	461			

a. Dependent Variable: LN_BM

b. Predictors: (Constant), LN_LW, LN_PAD, LN_DP

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Pengambilan keputusan pada uji statistik F dapat dilihat dari perbandingan nilai F_{tabel} dan F_{hitung} . Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, dilihat bahwa F_{hitung} yang dihasilkan adalah sebesar 139.279. Sedangkan F_{tabel} dihitung berdasarkan pada tabel F dengan nilai $df_1 = 3$ variabel (jumlah variabel-1) dan $df_2 = 459$ ($n-k-1$), dimana n sebesar 462 adalah jumlah observasi dan $k = 3$ adalah jumlah variabel independen). Dengan demikian, dengan tingkat signifikansi 5%, didapatkan nilai F_{tabel} sebesar 2,62.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar $139,279 > F_{tabel}$ sebesar 2,62. Jadi, Hal ini berarti model yang digunakan pada penelitian ini adalah layak (fit).

Hal tersebut dibuktikan juga dengan nilai signifikansi yang dihasilkan dari tabel di atas sebesar 0,000 yang lebih kecil dari derajat kepercayaan sebesar 0,05 atau 5%.

3. Uji R² (Determinasi)

Koefisien determinasi (R²) pada dasarnya bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen untuk menerangkan variabel dependen. Berikut merupakan tabel hasil pengujian koefisien determinasi:

TABEL VI. 10
Uji R²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,691 ^a	,477	,474	,34789

a. Predictors: (Constant), LN_LW, LN_PAD, LN_DP

Sumber: SPSS 22, data diolah oleh peneliti 2021

Berdasarkan Tabel Uji R² tersebut, dapat dilihat bahwa besarnya R² adalah 0,477. Hal ini berarti 47,7% variabel dependen yaitu belanja modal, dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen yang masuk dalam model regresi pendapatan asli daerah, dana perimbangan, luas wilayah. Sedangkan sisanya sebesar 52,3% (100%-47,7%) dijelaskan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

D. Pembahasan

1. Pengaruh Pendapatan Asli daerah Terhadap Belanja Modal

Pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal karena pendapatan asli daerah merupakan komponen penerimaan yang paling penting bagi setiap daerah hal ini dikarenakan suatu daerah dapat dikatakan berhasil apabila mampu untuk menggali potensi pendapatan dari dalam daerah tersebut dengan mandiri, dengan adanya pendapatan asli daerah yang mana pemerintah daerah memperoleh dana dari PAD dapat alokasikan atau dianggarkan dalam pemenuhan pembangunan infrastruktur daerah dan pengadaan aset tetap dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat umum, sedangkan pada penelitian ini pemerintah daerah dalam hal belanja modal sangat berpengaruh dan mempertimbangkan penerimaan pendapatan asli daerah, sehingga pendapatan asli daerah tersebut mengalami peningkatan akan berbanding berbanding lurus dengan belanja modal.

TABEL VI. 11
Perbandingan PAD dan Belanja Modal tahun 2017,2018 & 2019

	PAD 2017	BM 2017	PAD 2018	BM 2018	PAD 2019	BM 2019
Kab. Aceh Barat	Rp161.742.858.644	Rp313.210.843.762	Rp150.499.049.236	Rp192.424.908.404	Rp153.799.291.478	Rp263.508.924.061
Kota Palembang	Rp1.091.704.605.855	Rp857.095.134.848	Rp953.302.082.628	Rp851.367.126.024	Rp1.081.114.690.868	Rp1.115.910.029.299
Kota Pangkal Pinang	Rp173.947.112.861	Rp107.105.745.023	Rp167.131.991.666	Rp173.681.140.534	Rp155.116.318.111	Rp149.642.796.105

Sumber: Laporan DJPK, data diolah oleh peneliti 2021

Pendapatan asli daerah sangat mempengaruhi Belanja Modal di kabupaten dan kota di pulau Sumatera Indonesia. Hal ini terlihat pada tabel IV.12, terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan pendapatan

asli daerah dari tahun sebelumnya dan belanja modal pun akan ikut mengalami penurunan. Pendapatan asli daerah ini merupakan salah satu indikator keberhasilan suatu daerah dalam hal pendapatan dan kemandirian dalam mengembangkan sumber pendapatan daerahnya. Dengan demikian semakin tingginya pendapatan asli daerah biasanya semakin tinggi pula tingkat pembangunan dan kesejahteraan sosial di daerah tersebut. Sebaliknya apabila pendapatan asli daerah mengalami penurunan maka pemerintah daerah akan mengalihkan pendapatannya ke post anggaran yang lain yang di anggap prioritas dan *urgent* karena anggaran yang di sediakan sangatlah terbatas.

Hasil ini didukung dengan penelitian Putra (2018), Panji (2013), Mawarni (2014) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap anggaran belanja modal, dimana pendapatan asli daerah merupakan salah satu komponen dalam menentukan tingkat belanja modal daerah.

Penelitian ini sesuai dengan teori federalism fiskal (Hayek, 1976), dimana dalam teori tersebut terjadi pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah diberikan kekuasaan untuk mengelola sendiri kegiatan pemerintahan salah satunya dalam aspek fiskal, tentunya kegiatan pemerintah daerah ini mendapat pengawasan dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dapat memaksimalkan sumber penerimaan daerah dalam rangka menjalankan roda pemerintahan. Salah satunya yaitu pembangunan infrastruktur.

2. Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal

Dana Perimbangan merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari Transfer pemerintah pusat ke daerah yang bersumber dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) untuk menunjang dan membantu pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam rangka otonomi daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berupa belanja modal.

Dari hasil penelitian yang di hasilkan yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh Terhadap belanja modal pemerintah kabupaten dan kota dipulau sumatera, hal ini dapat ditunjukkan oleh tabel berikut;

TABEL VI. 12
Perbandingan Dana Perimbangan dan Belanja Modal
Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten dan Kota	Tahun	Dana Perimbangan	Belanja Modal
Kab. Musi Banyuasin	2017	Rp 2.284.442.011.973	Rp 699.529.017.374
Kab. Musi Banyuasin	2018	Rp 2.399.445.440.610	Rp 871.952.810.972
Kab. Musi Banyuasin	2019	Rp 3.103.333.197.302	Rp 1.102.419.234.360

Sumber; DJPK, Data diolah penulis 2021

Dapat dilihat dari tabel IV.12, data ini merupakan sampel yang penulis uji yang menunjukkan informasi kenaikan dana perimbangan dari tahun ke tahun yang mempengaruhi belanja modal, dapat kita lihat dana perimbangan mempengaruhi belanja modal di kabupaten bengkalis, tahun 2017 kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp. 2.284.442.011.973, hal ini mempengaruhi dari belanja modal pada tahun yang sama yaitu tahun 2017 sebesar Rp. 699.529.017.374, dan

seterusnya di tahun 2018 kabupaten musibanyuasin mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp. 2.399.445.440.610, dan mempengaruhi belanja modal pada tahun yang sama yaitu sebesar Rp. 871.952.810.972, dan seterusnya pada tahun 2019 Kabupaten Musi Banyuasin mendapatkan dana perimbangan sebesar Rp. 3.103.333.197.302, dan mempengaruhi belanja modal pada tahun yang sama sebesar Rp. 1.102.419.234.360.

Dengan Semakin tinggi Alokasi Transfer APBN Kepada APBD dalam Dana Perimbangan diharapkan membuat pemerintah daerah memprioritaskannya untuk Belanja Modal karena berkaitan dengan pelayanan publik.

Dana Perimbangan yang meningkat akan mampu menunjang belanja modal yang belum dapat dilakukan oleh daerah karena keterbatasan anggaran dan kemampuan setiap daerah tentunya berbeda dalam hal pendapatan asli daerah, setiap daerah apabila menjalankan pembangunan dengan dana PAD saja akan menyebabkan ketimpangan antar daerah semakin tinggi. maka dari itu melalui dana perimbangan pemerintah pusat melaksanakan desentralisasi fiskal, yang nantinya pemerintah daerah dalam melakukan tambahan belanja bersumber dari dana perimbangan tersebut.

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Putra (2018), Nufus (2017), Priatna (2019), Nugraeni (2011) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal. Karena dengan dana perimbangan yang tinggi ini akan menjadi

sebuah bantuan pemerintah pusat ke daerah untuk menutupi biaya dari belanja modal. Dengan adanya dana perimbangan ini pemerintah daerah menjalankan semua kegiatan dan anggaran dalam rangka pemenuhan belanja modal.

3. Pengaruh Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Daerah yang memiliki luas wilayah yang besar dalam prinsipnya akan membutuhkan belanja modal yang besar karena kebutuhan infrastruktur di wilayah tersebut juga tinggi, hal ini untuk menunjang pelayanan dan kegiatan atau kebutuhan masyarakat secara umum, hal ini juga untuk menghindari kesenjangan taraf hidup masyarakat serta pembangunan wilayah. Kelancaran kegiatan aktivitas masyarakat membutuhkan kondisi sarana infrastruktur yang baik. Sehingga luas wilayah sangat berhubungan dengan belanja modal.

Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa luas wilayah bukan menjadi faktor yang membuat belanja modal yang semakin besar, hal ini di karenakan sumber dana anggaran yang dihasilkan untuk belanja modal sangatlah terbatas, jadi pemerintah kabupaten dan kota harus menetapkan belanja modal berdasarkan skala prioritas dan faktor lain nya seperti politik, sosial dan ekonomi.

Dari hasil penelitian yang di hasilkan yang menunjukkan bahwa Dana Perimbangan berpengaruh Terhadap belanja modal pemerintah kabupaten dan kota dipulau sumatera, hal ini dapat ditunjukkan oleh tabel berikut;

TABEL VI. 13
Tabel Perbandingan Luas Wilayah dan Belanja Modal
Kabupaten Bengkulu dan Kabupaten Musi Banyuasin

Kabupaten/kota	Tahun	Luas wilayah(KM ²)	Tahun	Belanja Modal
Kab. Bengkulu	2019	6975,41	2019	Rp 1.108.175.580.894,99
Kab. Ogan Komering Ilir	2019	18359,04	2019	Rp 626.423.290.261,00

Sumber data: Permendagri no.72 tahun 2019 dan DJPK, Data diolah Penulis 2021

Dari tabel IV.13 dapat dilihat dari perbandingan bahwa luas wilayah bukan lah penentu dan pertimbangan dari pemerintah kabupaten kota untuk memenuhi kebutuhan belanja modal, dapat dilihat data dari kabupaten Bengkulu yang luas wilayah nya yang hanya seluas 6.975,41 KM² mampu untuk menganggarkan belanja modal sebesar Rp 1.108.175.580.894, di bandingkan dengan kabupaten Ogan Komering Ilir yang mempunyai wilayah yang lebih luas yaitu seluas 18.359 KM² hanya dapat menganggarkan belanja modal sebesar Rp 626.423.290.261. hal ini tentu menunjukkan bahwa perbedaan luas wilayah tidak mempengaruhi belanja modal, hal ini di karenakan potensi keuangan, pembiayaan daerah, dan kepentingan politik, sosial dan ekonomi setiap daerah itu berbeda.

Hasil ini didukung oleh penelitian Erlis (2010), dengan hasil Luas Wilayah tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal kabupaten/kota hasil pemekaran di pulau Sumatera.

BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan mengacu pada perumusan serta tujuan penulisan, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengaruh yang signifikan pendapatan asli daerah dengan belanja modal. Hal ini mengindikasikan semakin besar pendapatan asli daerah disuatu wilayah maka semakin meningkat tingkat belanja modalnya.
2. Terdapat pengaruh yang signifikan antara dana perimbangan dengan belanja modal. Hal ini mengindikasikan semakin besar dana perimbangan yang diterima disuatu wilayah maka semakin besar tingkat belanja modalnya.
3. Tidak terdapat pengaruh antara luas wilayah dengan belanja modal. Hal ini mengindikasikan bahwa besarnya luas wilayah maka tidak akan mempengaruhi besarnya belanja modalnya.

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dikemukakan implikasi secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal

Pemberian hak, kewajiban, wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan atau biasa disebut otonomi daerah, merupakan kesempatan baik bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam menjalankan kewenangan yang menjadi hak daerah, termasuk dalam hal pengelolaan pendapatan asli daerah. Implementasi dari pendapatan asli daerah sendiri dapat dilihat dari tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola dan memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah, pendapatan asli daerah merupakan sumber yang harus diutamakan dari sumber pendanaan yang lainnya, karena dengan pendapatan asli daerah yang maksimal maka akan menambah sumber pembiayaan daerah dalam hal belanja modal secara mandiri. Belanja modal yang tinggi diharapkan akan meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemenuhan infrastruktur yang merata dan serta menggerakkan perekonomian masyarakat.

2. Pengaruh Dana perimbangan Terhadap Belanja Modal

Dana Perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari Transfer APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada

daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat berupa belanja modal. Semakin tinggi Alokasi Transfer APBN Kepada APBD dalam Dana Perimbangan diharapkan membuat pemerintah daerah memprioritaskannya untuk Belanja Modal karena dengan belanja modal yang tinggi pemerintah daerah dapat membangun infrastruktur yang layak untuk masyarakat berkaitan dengan pelayanan publik dan serta dapat meningkatkan nilai investasi didalam daerah itu sendiri

3. Pengaruh luas Wilayah Terhadap Belanja Modal

Luas wilayah memiliki pengaruh terhadap belanja modal pemerintah daerah kabupaten dan kota. Semakin luasnya suatu wilayah pada daerah harus diimbangi dengan fasilitas publik dan infrastruktur daerah. Kegiatan perekonomian masyarakat ditunjang oleh fasilitas yang baik sehingga roda perekonomian masyarakat dapat meningkat. Jika roda perekonomian di daerah mengalami peningkatan maka penerimaan daerah bisa mengalami peningkatan.

Dari hasil penulisan tiga variabel di atas dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan di era otonomi daerah seperti sekarang ini. Sehingga pemerintah daerah tidak salah dalam menentukan langkah untuk perkembangan daerahnya ke depan. Pembangunan infrastruktur dan fasilitas-fasilitas publik yang baik akan membawa dampak yang positif terhadap kualitas pelayanan publik serta perkembangan di daerah tersebut.

C. Saran

Untuk penelitian yang lebih baik, maka saran yang bisa penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya menambah luas tahun pengamatan lebih dari 3 tahun untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal
2. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya juga meneliti variabel lain seperti tingkat investasi daerah dan indeks pertumbuhan ekonomi sehingga dapat menghasilkan penelitian yang utuh. Hal ini didasarkan bahwa variabel penelitian ini pengaruhnya terhadap belanja modal sebesar 47,7% sehingga masih ada 52,3% variabel lain yang mungkin dapat berpengaruh terhadap belanja modal
3. Bagi pemerintah daerah, sebaiknya mengoptimalkan pengelolaan belanja modalnya agar bisa membawa dampak yang positif terhadap masyarakat dan kualitas pelayanannya.
4. Bagi pemerintah daerah, sebaiknya melakukan evaluasi terhadap belanja sehingga porsi belanja modal memiliki porsi yang besar dibandingkan porsi belanja yang lainnya.

LAMPIRAN- LAMPIRAN

LAMPIRAN 1: DAFTAR SAMPEL

N0	KABUPATEN DAN KOTA	N0	KABUPATEN DAN KOTA
1	Kab. Aceh Barat	78	Kab. Ogan Komering Ilir
2	Kab. Aceh Barat Daya	79	Kab. Ogan Komering Ulu
3	Kab. Aceh Besar	80	Kab. OKU Selatan
4	Kab. Aceh Jaya	81	Kab. OKU Timur
5	Kab. Aceh Selatan	82	Kab. Padang Lawas
6	Kab. Aceh Singkil	83	Kab. Padang Lawas Utara
7	Kab. Aceh Tamiang	84	Kab. Padang Pariaman
8	Kab. Aceh Tengah	85	Kab. Pakpak Bharat
9	Kab. Aceh Tenggara	86	Kab. Pasaman
10	Kab. Aceh Timur	87	Kab. Pasaman Barat
11	Kab. Aceh Utara	88	Kab. Pelalawan
12	Kab. Agam	89	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir
13	Kab. Asahan	90	Kab. Pesawaran
14	Kab. Bangka	91	Kab. Pesisir Barat
15	Kab. Bangka Barat	92	Kab. Pesisir Selatan
16	Kab. Bangka Selatan	93	Kab. Pidie
17	Kab. Bangka Tengah	94	Kab. Pidie Jaya
18	Kab. Banyuasin	95	Kab. Pringsewu
19	Kab. Batanghari	96	Kab. Rejang Lebong
20	Kab. Batubara	97	Kab. Rokan Hilir
21	Kab. Belitung	98	Kab. Rokan Hulu
22	Kab. Belitung Timur	99	Kab. Samosir
23	Kab. Bener Meriah	100	Kab. Sarolangun
24	Kab. Bengkalis	101	Kab. Seluma
25	Kab. Bengkulu Selatan	102	Kab. Serdang Bedagai
26	Kab. Bengkulu Tengah	103	Kab. Siak
27	Kab. Bengkulu Utara	104	Kab. Sijunjung
28	Kab. Bintan	105	Kab. Simalungun
29	Kab. Bireun	106	Kab. Simeulue
30	Kab. Bungo	107	Kab. Solok
31	Kab. Dairi	108	Kab. Solok Selatan
32	Kab. Deli Serdang	109	Kab. Tanah Datar
33	Kab. Dharmasraya	110	Kab. Tanggamus
34	Kab. Empat Lawang	111	Kab. Tanjung Jabung Barat
35	Kab. Gayo Lues	112	Kab. Tanjung Jabung Timur
36	Kab. Humbang Hasundutan	113	Kab. Tapanuli Selatan
37	Kab. Indragiri Hilir	114	Kab. Tapanuli Tengah
38	Kab. Indragiri Hulu	115	Kab. Tapanuli Utara
39	Kab. Kampar	116	Kab. Tebo
40	Kab. Karimun	117	Kab. Toba Samosir

41	Kab. Karo	118	Kab. Tulang Bawang
42	Kab. Kaur	119	Kab. Tulang Bawang Barat
43	Kab. Kepahiang	120	Kab. Way Kanan
44	Kab. Kepulauan Anambas	121	Kota Banda Aceh
45	Kab. Kepulauan Mentawai	122	Kota Bandar Lampung
46	Kab. Kepulauan Meranti	123	Kota Batam
47	Kab. Kerinci	124	Kota Bengkulu
48	Kab. Kuantan Singingi	125	Kota Binjai
49	Kab. Labuhanbatu	126	Kota Bukit Tinggi
50	Kab. Labuhanbatu Selatan	127	Kota Dumai
51	Kab. Labuhanbatu Utara	128	Kota Gunungsitoli
52	Kab. Lahat	129	Kota Jambi
53	Kab. Lampung Barat	130	Kota Langsa
54	Kab. Lampung Selatan	131	Kota Lhokseumawe
55	Kab. Lampung Tengah	132	Kota Lubuk Linggau
56	Kab. Lampung Timur	133	Kota Medan
57	Kab. Lampung Utara	134	Kota Metro
58	Kab. Langkat	135	Kota Padang
59	Kab. Lebong	136	Kota Padang Panjang
60	Kab. Limapuluh Kota	137	Kota Padangsidempuan
61	Kab. Lingga	138	Kota Pagar Alam
62	Kab. Mandailing Natal	139	Kota Palembang
63	Kab. Merangin	140	Kota Pangkal Pinang
64	Kab. Mesuji	141	Kota Pariaman
65	Kab. Muara Enim	142	Kota Payakumbuh
66	Kab. Muaro Jambi	143	Kota Pekanbaru
67	Kab. Mukomuko	144	Kota Pematangsiantar
68	Kab. Musi Banyuasin	145	Kota Prabumulih
69	Kab. Musi Rawas	146	Kota Sabang
70	Kab. Musi Rawas Utara	147	Kota Sawahlunto
71	Kab. Nagan Raya	148	Kota Sibolga
72	Kab. Natuna	149	Kota Solok
73	Kab. Nias	150	Kota Subulussalam
74	Kab. Nias Barat	151	Kota Sungai Penuh
75	Kab. Nias Selatan	152	Kota Tanjung Balai
76	Kab. Nias Utara	153	Kota Tanjung Pinang
77	Kab. Ogan Ilir	154	Kota Tebing Tinggi

LAMPIRAN 2:Rekap data Pendapatan Asli Daerah

Nama Kabupaten dan Kota	Tahun	PAD	Ln PAD
Kab. Aceh Barat	2017	Rp 161.742.858.643,95	25,80927
Kab. Aceh Barat	2018	Rp 150.499.049.235,64	25,73722
Kab. Aceh Barat	2019	Rp 153.799.291.478,27	25,75891
Kab. Aceh Barat Daya	2017	Rp 91.571.494.831,20	25,24039
Kab. Aceh Barat Daya	2018	Rp 83.468.426.211,06	25,14773
Kab. Aceh Barat Daya	2019	Rp 90.348.940.272,37	25,22695
Kab. Aceh Besar	2017	Rp 145.464.468.479,16	25,7032
Kab. Aceh Besar	2018	Rp 159.480.163.137,63	25,79519
Kab. Aceh Besar	2019	Rp 169.896.999.689,45	25,85846
Kab. Aceh Jaya	2017	Rp 52.599.500.273,85	24,68597
Kab. Aceh Jaya	2018	Rp 58.624.901.408,09	24,79443
Kab. Aceh Jaya	2019	Rp 72.776.854.246,39	25,01066
Kab. Aceh Selatan	2017	Rp 140.875.267.831,74	25,67114
Kab. Aceh Selatan	2018	Rp 32.923.827.546,93	24,21746
Kab. Aceh Selatan	2019	Rp 139.976.611.272,05	25,66474
Kab. Aceh Singkil	2017	Rp 43.441.129.848,31	24,49467
Kab. Aceh Singkil	2018	Rp 45.289.515.136,55	24,53634
Kab. Aceh Singkil	2019	Rp 45.264.588.433,92	24,53579
Kab. Aceh Tamiang	2017	Rp 116.246.212.753,70	25,47898
Kab. Aceh Tamiang	2018	Rp 139.261.841.911,61	25,65962
Kab. Aceh Tamiang	2019	Rp 128.905.940.324,92	25,58235
Kab. Aceh Tengah	2017	Rp 163.000.739.413,09	25,81702
Kab. Aceh Tengah	2018	Rp 150.818.710.372,27	25,73934
Kab. Aceh Tengah	2019	Rp 170.961.167.591,14	25,8647
Kab. Aceh Tenggara	2017	Rp 60.053.234.222,18	24,8185
Kab. Aceh Tenggara	2018	Rp 80.263.476.272,42	25,10858
Kab. Aceh Tenggara	2019	Rp 117.628.924.350,95	25,4908
Kab. Aceh Timur	2017	Rp 152.401.172.879,82	25,74978
Kab. Aceh Timur	2018	Rp 169.455.864.158,29	25,85586
Kab. Aceh Timur	2019	Rp 185.148.022.039,99	25,94442
Kab. Aceh Utara	2017	Rp 202.091.566.054,51	26,03199
Kab. Aceh Utara	2018	Rp 231.848.856.926,46	26,16935
Kab. Aceh Utara	2019	Rp 279.567.720.149,97	26,35651
Kab. Bener Meriah	2017	Rp 82.038.407.023,70	25,13045
Kab. Bener Meriah	2018	Rp 59.409.524.055,07	24,80772
Kab. Bener Meriah	2019	Rp 86.415.549.452,45	25,18243

Kab. Bireun	2017	Rp	192.939.858.236,27	25,98564
Kab. Bireun	2018	Rp	179.476.248.778,22	25,91331
Kab. Bireun	2019	Rp	156.528.834.490,69	25,77651
Kab. Gayo Lues	2017	Rp	60.312.455.602,47	24,8228
Kab. Gayo Lues	2018	Rp	48.758.464.134,18	24,61014
Kab. Gayo Lues	2019	Rp	51.415.803.751,47	24,66321
Kab. Nagan Raya	2017	Rp	74.051.054.126,89	25,02802
Kab. Nagan Raya	2018	Rp	97.118.515.691,03	25,2992
Kab. Nagan Raya	2019	Rp	87.625.375.251,38	25,19634
Kab. Pidie	2017	Rp	267.608.101.034,43	26,31279
Kab. Pidie	2018	Rp	237.201.958.015,66	26,19218
Kab. Pidie	2019	Rp	243.230.774.790,47	26,21728
Kab. Pidie Jaya	2017	Rp	47.409.466.844,99	24,58209
Kab. Pidie Jaya	2018	Rp	57.432.814.784,97	24,77388
Kab. Pidie Jaya	2019	Rp	68.830.728.478,21	24,95492
Kab. Simeulue	2017	Rp	61.095.183.851,33	24,8357
Kab. Simeulue	2018	Rp	63.146.021.911,26	24,86872
Kab. Simeulue	2019	Rp	79.466.327.068,60	25,0986
Kota Banda Aceh	2017	Rp	270.170.805.366,08	26,32232
Kota Banda Aceh	2018	Rp	246.272.150.484,71	26,2297
Kota Banda Aceh	2019	Rp	235.123.074.164,05	26,18337
Kota Langsa	2017	Rp	120.138.956.032,87	25,51191
Kota Langsa	2018	Rp	121.316.713.328,93	25,52167
Kota Langsa	2019	Rp	115.244.246.710,49	25,47032
Kota Lhokseumawe	2017	Rp	62.986.260.103,85	24,86618
Kota Lhokseumawe	2018	Rp	65.618.966.777,60	24,90713
Kota Lhokseumawe	2019	Rp	61.442.558.519,86	24,84137
Kota Sabang	2017	Rp	55.081.057.066,02	24,73207
Kota Sabang	2018	Rp	57.188.076.200,36	24,76961
Kota Sabang	2019	Rp	59.329.692.603,26	24,80638
Kota Subulussalam	2017	Rp	56.519.514.115,17	24,75785
Kota Subulussalam	2018	Rp	36.348.719.461,44	24,31642
Kota Subulussalam	2019	Rp	51.810.001.542,58	24,67085
Kab. Asahan	2017	Rp	123.687.304.878,59	25,54102
Kab. Asahan	2018	Rp	142.972.039.820,99	25,68591
Kab. Asahan	2019	Rp	149.647.050.441,83	25,73155
Kab. Batubara	2017	Rp	66.944.796.374,52	24,92713
Kab. Batubara	2018	Rp	64.385.292.862,07	24,88815
Kab. Batubara	2019	Rp	129.221.846.896,99	25,5848

Kab. Dairi	2017	Rp	128.489.751.331,88	25,57911
Kab. Dairi	2018	Rp	128.489.751.331,88	25,57911
Kab. Dairi	2019	Rp	74.360.339.717,75	25,03219
Kab. Deli Serdang	2017	Rp	849.286.151.151,13	27,46766
Kab. Deli Serdang	2018	Rp	729.648.594.488,68	27,31583
Kab. Deli Serdang	2019	Rp	825.375.281.296,75	27,4391
Kab. Humbang Hasundutan	2017	Rp	85.598.357.027,01	25,17293
Kab. Humbang Hasundutan	2018	Rp	92.735.853.812,93	25,25302
Kab. Humbang Hasundutan	2019	Rp	73.757.931.630,04	25,02405
Kab. Karo	2017	Rp	157.866.720.976,13	25,78502
Kab. Karo	2018	Rp	159.189.197.472,28	25,79336
Kab. Karo	2019	Rp	117.683.657.832,91	25,49127
Kab. Labuhanbatu	2017	Rp	124.674.017.375,34	25,54897
Kab. Labuhanbatu	2018	Rp	162.794.472.016,74	25,81575
Kab. Labuhanbatu	2019	Rp	175.335.685.316,71	25,88997
Kab. Labuhanbatu Selatan	2017	Rp	84.964.450.591,63	25,1655
Kab. Labuhanbatu Selatan	2018	Rp	52.209.768.574,26	24,67854
Kab. Labuhanbatu Selatan	2019	Rp	75.687.647.545,04	25,04988
Kab. Labuhanbatu Utara	2017	Rp	52.690.086.354,20	24,68769
Kab. Labuhanbatu Utara	2018	Rp	57.010.690.545,81	24,7665
Kab. Labuhanbatu Utara	2019	Rp	70.122.562.532,08	24,97351
Kab. Langkat	2017	Rp	139.717.647.855,00	25,66289
Kab. Langkat	2018	Rp	136.680.578.541,45	25,64091
Kab. Langkat	2019	Rp	167.523.076.879,63	25,84439
Kab. Mandailing Natal	2017	Rp	80.581.688.937,02	25,11254
Kab. Mandailing Natal	2018	Rp	84.809.923.496,46	25,16368
Kab. Mandailing Natal	2019	Rp	98.758.815.327,80	25,31595
Kab. Nias	2017	Rp	95.726.167.744,20	25,28476
Kab. Nias	2018	Rp	88.754.606.114,77	25,20914
Kab. Nias	2019	Rp	107.639.139.179,52	25,40205
Kab. Nias Barat	2017	Rp	36.239.996.547,90	24,31343
Kab. Nias Barat	2018	Rp	40.193.008.207,19	24,41696
Kab. Nias Barat	2019	Rp	18.411.235.998,10	23,63623
Kab. Nias Selatan	2017	Rp	18.450.266.700,07	23,63834
Kab. Nias Selatan	2018	Rp	19.605.734.782,42	23,69909
Kab. Nias Selatan	2019	Rp	25.664.883.761,35	23,96839
Kab. Nias Utara	2017	Rp	20.107.246.942,72	23,72435
Kab. Nias Utara	2018	Rp	50.395.504.636,01	24,64317
Kab. Nias Utara	2019	Rp	57.961.363.629,78	24,78304

Kab. Padang Lawas	2017	Rp	46.509.729.525,21	24,56293
Kab. Padang Lawas	2018	Rp	47.455.308.607,49	24,58305
Kab. Padang Lawas	2019	Rp	52.067.312.090,78	24,6758
Kab. Padang Lawas Utara	2017	Rp	74.524.919.692,80	25,0344
Kab. Padang Lawas Utara	2018	Rp	74.306.097.499,89	25,03146
Kab. Padang Lawas Utara	2019	Rp	42.929.111.657,99	24,48282
Kab. Pakpak Bharat	2017	Rp	29.320.487.446,76	24,10155
Kab. Pakpak Bharat	2018	Rp	20.061.207.922,74	23,72205
Kab. Pakpak Bharat	2019	Rp	33.915.957.645,18	24,24715
Kab. Samosir	2017	Rp	72.228.748.254,50	25,0031
Kab. Samosir	2018	Rp	47.446.623.389,36	24,58287
Kab. Samosir	2019	Rp	60.497.449.963,09	24,82587
Kab. Serdang Bedagai	2017	Rp	103.711.290.228,63	25,36488
Kab. Serdang Bedagai	2018	Rp	194.382.972.213,04	25,9931
Kab. Serdang Bedagai	2019	Rp	143.144.170.557,19	25,68712
Kab. Simalungun	2017	Rp	252.663.015.526,86	26,25532
Kab. Simalungun	2018	Rp	164.107.850.129,30	25,82379
Kab. Simalungun	2019	Rp	191.940.130.095,11	25,98045
Kab. Tapanuli Selatan	2017	Rp	104.722.613.704,70	25,37458
Kab. Tapanuli Selatan	2018	Rp	140.044.217.233,81	25,66522
Kab. Tapanuli Selatan	2019	Rp	167.458.157.940,03	25,844
Kab. Tapanuli Tengah	2017	Rp	72.710.308.590,53	25,00975
Kab. Tapanuli Tengah	2018	Rp	76.660.883.410,33	25,06266
Kab. Tapanuli Tengah	2019	Rp	88.441.123.323,37	25,2056
Kab. Tapanuli Utara	2017	Rp	162.441.906.092,95	25,81359
Kab. Tapanuli Utara	2018	Rp	105.656.762.964,31	25,38346
Kab. Tapanuli Utara	2019	Rp	113.990.759.581,50	25,45938
Kab. Toba Samosir	2017	Rp	54.840.823.646,03	24,7277
Kab. Toba Samosir	2018	Rp	52.298.960.803,40	24,68024
Kab. Toba Samosir	2019	Rp	68.046.526.605,06	24,94346
Kota Binjai	2017	Rp	139.217.621.697,48	25,6593
Kota Binjai	2018	Rp	135.870.920.432,89	25,63497
Kota Binjai	2019	Rp	108.954.526.370,00	25,4142
Kota Gunungsitoli	2017	Rp	29.769.903.264,10	24,11676
Kota Gunungsitoli	2018	Rp	29.456.354.562,94	24,10618
Kota Gunungsitoli	2019	Rp	32.209.121.388,86	24,19552
Kota Medan	2017	Rp	1.739.756.922.633,50	28,18477
Kota Medan	2018	Rp	1.636.204.514.683,53	28,1234
Kota Medan	2019	Rp	1.829.665.882.248,31	28,23515

Kota Padangsidempuan	2017	Rp	109.640.419.280,55	25,42047
Kota Padangsidempuan	2018	Rp	75.063.575.092,73	25,0416
Kota Padangsidempuan	2019	Rp	87.432.283.185,14	25,19413
Kota Pematangsiantar	2017	Rp	105.445.993.204,20	25,38146
Kota Pematangsiantar	2018	Rp	137.052.839.192,78	25,64363
Kota Pematangsiantar	2019	Rp	125.018.502.647,54	25,55173
Kota Sibolga	2017	Rp	103.672.203.938,17	25,3645
Kota Sibolga	2018	Rp	81.245.733.811,60	25,12074
Kota Sibolga	2019	Rp	69.312.217.832,16	24,96189
Kota Tanjung Balai	2017	Rp	65.108.266.615,52	24,89932
Kota Tanjung Balai	2018	Rp	74.435.277.571,86	25,0332
Kota Tanjung Balai	2019	Rp	63.721.315.844,82	24,87778
Kota Tebing Tinggi	2017	Rp	113.222.874.687,17	25,45262
Kota Tebing Tinggi	2018	Rp	114.048.354.142,71	25,45989
Kota Tebing Tinggi	2019	Rp	105.239.918.351,52	25,37951
Kab. Agam	2017	Rp	161.539.091.438,87	25,80801
Kab. Agam	2018	Rp	99.684.205.378,01	25,32527
Kab. Agam	2019	Rp	123.658.588.901,53	25,54079
Kab. Dharmasraya	2017	Rp	98.937.393.386,70	25,31775
Kab. Dharmasraya	2018	Rp	110.208.800.135,38	25,42564
Kab. Dharmasraya	2019	Rp	78.882.919.152,49	25,09123
Kab. Kepulauan Mentawai	2017	Rp	67.862.676.598,42	24,94075
Kab. Kepulauan Mentawai	2018	Rp	45.358.184.273,56	24,53786
Kab. Kepulauan Mentawai	2019	Rp	40.203.645.065,98	24,41722
Kab. Limapuluh Kota	2017	Rp	119.771.917.448,64	25,50886
Kab. Limapuluh Kota	2018	Rp	73.440.842.296,03	25,01975
Kab. Limapuluh Kota	2019	Rp	85.168.153.332,25	25,16789
Kab. Padang Pariaman	2017	Rp	141.310.805.691,52	25,67423
Kab. Padang Pariaman	2018	Rp	84.502.722.191,02	25,16005
Kab. Padang Pariaman	2019	Rp	101.607.521.617,01	25,34438
Kab. Pasaman	2017	Rp	142.748.233.335,93	25,68435
Kab. Pasaman	2018	Rp	100.067.231.369,65	25,32911
Kab. Pasaman	2019	Rp	98.595.691.294,01	25,31429
Kab. Pasaman Barat	2017	Rp	158.920.863.868,99	25,79167
Kab. Pasaman Barat	2018	Rp	158.872.998.659,25	25,79137
Kab. Pasaman Barat	2019	Rp	104.071.607.688,23	25,36835
Kab. Pesisir Selatan	2017	Rp	176.902.866.674,05	25,89887
Kab. Pesisir Selatan	2018	Rp	123.906.524.443,36	25,54279
Kab. Pesisir Selatan	2019	Rp	134.804.594.146,43	25,62709

Kab. Sijunjung	2017	Rp	107.915.719.073,07	25,40462
Kab. Sijunjung	2018	Rp	79.055.940.215,38	25,09342
Kab. Sijunjung	2019	Rp	83.906.454.917,50	25,15297
Kab. Solok	2017	Rp	113.269.815.423,73	25,45304
Kab. Solok	2018	Rp	68.301.516.506,08	24,9472
Kab. Solok	2019	Rp	74.595.911.758,82	25,03535
Kab. Solok Selatan	2017	Rp	75.505.887.736,93	25,04748
Kab. Solok Selatan	2018	Rp	60.545.296.360,43	24,82666
Kab. Solok Selatan	2019	Rp	67.842.785.844,03	24,94046
Kab. Tanah Datar	2017	Rp	172.812.022.623,56	25,87547
Kab. Tanah Datar	2018	Rp	115.914.187.914,65	25,47612
Kab. Tanah Datar	2019	Rp	129.785.828.001,89	25,58915
Kota Bukit Tinggi	2017	Rp	102.375.931.332,69	25,35192
Kota Bukit Tinggi	2018	Rp	101.936.792.226,61	25,34762
Kota Bukit Tinggi	2019	Rp	111.896.596.611,05	25,44084
Kota Padang	2017	Rp	548.653.179.266,03	27,03073
Kota Padang	2018	Rp	487.937.882.411,61	26,91345
Kota Padang	2019	Rp	546.108.570.689,61	27,02608
Kota Padang Panjang	2017	Rp	88.837.033.624,67	25,21007
Kota Padang Panjang	2018	Rp	79.752.372.829,53	25,10219
Kota Padang Panjang	2019	Rp	77.323.150.456,49	25,07126
Kota Pariaman	2017	Rp	30.881.846.112,42	24,15343
Kota Pariaman	2018	Rp	32.213.303.036,69	24,19565
Kota Pariaman	2019	Rp	36.665.174.233,13	24,32509
Kota Payakumbuh	2017	Rp	116.596.479.804,00	25,48198
Kota Payakumbuh	2018	Rp	103.244.423.500,00	25,36037
Kota Payakumbuh	2019	Rp	104.070.234.422,00	25,36833
Kota Sawahlunto	2017	Rp	62.459.787.921,37	24,85779
Kota Sawahlunto	2018	Rp	47.227.132.335,45	24,57823
Kota Sawahlunto	2019	Rp	57.170.993.865,09	24,76931
Kota Solok	2017	Rp	41.852.774.058,12	24,45742
Kota Solok	2018	Rp	40.742.809.270,40	24,43055
Kota Solok	2019	Rp	41.651.875.802,05	24,45261
Kab. Bengkulu	2017	Rp	271.865.595.908,08	26,32857
Kab. Bengkulu	2018	Rp	319.280.511.092,11	26,48934
Kab. Bengkulu	2019	Rp	226.245.884.732,22	26,14489
Kab. Indragiri Hilir	2017	Rp	214.785.344.624,85	26,0929
Kab. Indragiri Hilir	2018	Rp	157.482.353.687,31	25,78258
Kab. Indragiri Hilir	2019	Rp	153.746.222.014,66	25,75857

Kab. Indragiri Hulu	2017	Rp	159.665.857.817,46	25,79635
Kab. Indragiri Hulu	2018	Rp	111.900.731.074,40	25,44088
Kab. Indragiri Hulu	2019	Rp	118.978.915.053,47	25,50221
Kab. Kampar	2017	Rp	316.432.572.651,11	26,48038
Kab. Kampar	2018	Rp	229.958.839.237,67	26,16117
Kab. Kampar	2019	Rp	262.882.861.942,62	26,29497
Kab. Kepulauan Meranti	2017	Rp	80.941.082.098,16	25,11699
Kab. Kepulauan Meranti	2018	Rp	68.006.356.887,21	24,94287
Kab. Kepulauan Meranti	2019	Rp	79.075.541.783,96	25,09367
Kab. Kuantan Singingi	2017	Rp	108.028.330.072,33	25,40566
Kab. Kuantan Singingi	2018	Rp	93.227.855.867,66	25,25831
Kab. Kuantan Singingi	2019	Rp	78.575.317.037,02	25,08732
Kab. Pelalawan	2017	Rp	181.808.597.388,70	25,92622
Kab. Pelalawan	2018	Rp	136.697.900.750,86	25,64104
Kab. Pelalawan	2019	Rp	155.693.478.613,31	25,77116
Kab. Rokan Hilir	2017	Rp	175.970.132.714,94	25,89358
Kab. Rokan Hilir	2018	Rp	108.053.525.787,27	25,40589
Kab. Rokan Hilir	2019	Rp	116.551.567.672,15	25,4816
Kab. Rokan Hulu	2017	Rp	199.642.462.770,33	26,01979
Kab. Rokan Hulu	2018	Rp	85.734.030.158,19	25,17452
Kab. Rokan Hulu	2019	Rp	160.217.013.093,08	25,7998
Kab. Siak	2017	Rp	267.443.708.495,90	26,31217
Kab. Siak	2018	Rp	290.637.100.257,42	26,39534
Kab. Siak	2019	Rp	264.366.914.897,60	26,3006
Kota Dumai	2017	Rp	265.472.760.817,81	26,30478
Kota Dumai	2018	Rp	279.654.914.441,64	26,35682
Kota Dumai	2019	Rp	291.620.030.783,75	26,39872
Kota Pekanbaru	2017	Rp	697.466.656.719,96	27,27072
Kota Pekanbaru	2018	Rp	592.707.161.811,78	27,10797
Kota Pekanbaru	2019	Rp	710.129.196.650,75	27,28871
Kab. Batanghari	2017	Rp	87.929.338.842,96	25,1998
Kab. Batanghari	2018	Rp	98.808.531.271,98	25,31645
Kab. Batanghari	2019	Rp	91.567.449.214,50	25,24034
Kab. Bungo	2017	Rp	183.133.678.700,00	25,93348
Kab. Bungo	2018	Rp	133.848.451.058,56	25,61997
Kab. Bungo	2019	Rp	140.327.484.503,26	25,66724
Kab. Kerinci	2017	Rp	85.760.743.968,69	25,17483
Kab. Kerinci	2018	Rp	80.481.173.935,14	25,11129
Kab. Kerinci	2019	Rp	85.903.587.127,65	25,17649

Kab. Merangin	2017	Rp	86.702.264.468,71	25,18575
Kab. Merangin	2018	Rp	89.304.559.027,72	25,21532
Kab. Merangin	2019	Rp	106.160.970.249,67	25,38822
Kab. Muaro Jambi	2017	Rp	77.926.789.368,63	25,07904
Kab. Muaro Jambi	2018	Rp	90.305.498.362,69	25,22646
Kab. Muaro Jambi	2019	Rp	93.794.601.240,03	25,26437
Kab. Sarolangun	2017	Rp	85.185.129.614,17	25,16809
Kab. Sarolangun	2018	Rp	118.828.593.871,64	25,50095
Kab. Sarolangun	2019	Rp	94.621.365.980,58	25,27315
Kab. Tanjung Jabung Barat	2017	Rp	98.779.362.060,27	25,31615
Kab. Tanjung Jabung Barat	2018	Rp	101.773.750.562,52	25,34602
Kab. Tanjung Jabung Barat	2019	Rp	120.220.481.667,74	25,51259
Kab. Tanjung Jabung Timur	2017	Rp	76.775.700.725,42	25,06415
Kab. Tanjung Jabung Timur	2018	Rp	49.607.102.060,03	24,6274
Kab. Tanjung Jabung Timur	2019	Rp	53.919.302.033,20	24,71075
Kab. Tebo	2017	Rp	68.406.126.027,81	24,94873
Kab. Tebo	2018	Rp	76.160.028.617,97	25,0561
Kab. Tebo	2019	Rp	83.236.373.472,25	25,14495
Kota Jambi	2017	Rp	397.327.847.289,10	26,70803
Kota Jambi	2018	Rp	338.891.882.592,96	26,54895
Kota Jambi	2019	Rp	393.429.595.383,99	26,69817
Kota Sungai Penuh	2017	Rp	31.420.979.313,39	24,17074
Kota Sungai Penuh	2018	Rp	34.184.049.669,28	24,25502
Kota Sungai Penuh	2019	Rp	34.900.741.628,35	24,27577
Kab. Banyuasin	2017	Rp	125.984.368.887,92	25,55942
Kab. Banyuasin	2018	Rp	140.602.072.489,75	25,6692
Kab. Banyuasin	2019	Rp	200.616.348.310,39	26,02466
Kab. Empat Lawang	2017	Rp	68.806.714.653,58	24,95457
Kab. Empat Lawang	2018	Rp	32.217.492.488,71	24,19578
Kab. Empat Lawang	2019	Rp	41.672.141.481,16	24,4531
Kab. Lahat	2017	Rp	113.749.228.687,81	25,45726
Kab. Lahat	2018	Rp	112.571.296.475,37	25,44685
Kab. Lahat	2019	Rp	141.161.144.249,35	25,67317
Kab. Muara Enim	2017	Rp	226.929.233.264,54	26,1479
Kab. Muara Enim	2018	Rp	232.468.708.584,45	26,17202
Kab. Muara Enim	2019	Rp	303.296.321.151,66	26,43798
Kab. Musi Banyuasin	2017	Rp	209.410.035.753,13	26,06756
Kab. Musi Banyuasin	2018	Rp	210.238.037.283,12	26,07151
Kab. Musi Banyuasin	2019	Rp	286.594.847.515,54	26,38134

Kab. Musi Rawas	2017	Rp	151.594.082.635,49	25,74447
Kab. Musi Rawas	2018	Rp	106.289.385.325,54	25,38943
Kab. Musi Rawas	2019	Rp	128.563.715.132,68	25,57969
Kab. Musi Rawas Utara	2017	Rp	57.580.992.080,00	24,77646
Kab. Musi Rawas Utara	2018	Rp	30.141.830.709,51	24,12918
Kab. Musi Rawas Utara	2019	Rp	37.574.950.356,98	24,3496
Kab. Ogan Ilir	2017	Rp	95.711.837.735,00	25,28461
Kab. Ogan Ilir	2018	Rp	55.362.963.113,45	24,73718
Kab. Ogan Ilir	2019	Rp	86.150.568.157,79	25,17936
Kab. Ogan Komering Ilir	2017	Rp	222.961.997.724,44	26,13027
Kab. Ogan Komering Ilir	2018	Rp	235.946.143.259,17	26,18687
Kab. Ogan Komering Ilir	2019	Rp	195.401.652.977,59	25,99832
Kab. Ogan Komering Ulu	2017	Rp	172.013.164.446,13	25,87084
Kab. Ogan Komering Ulu	2018	Rp	156.622.053.791,34	25,7771
Kab. Ogan Komering Ulu	2019	Rp	145.563.548.512,85	25,70388
Kab. OKU Selatan	2017	Rp	89.506.598.777,46	25,21758
Kab. OKU Selatan	2018	Rp	42.993.134.751,66	24,48431
Kab. OKU Selatan	2019	Rp	57.669.139.990,39	24,77799
Kab. OKU Timur	2017	Rp	77.706.784.295,93	25,07621
Kab. OKU Timur	2018	Rp	85.235.157.420,53	25,16868
Kab. OKU Timur	2019	Rp	99.017.727.658,01	25,31856
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2017	Rp	56.934.787.815,97	24,76517
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2018	Rp	74.392.980.925,08	25,03263
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2019	Rp	84.794.229.883,15	25,16349
Kota Lubuk Linggau	2017	Rp	115.521.939.795,78	25,47273
Kota Lubuk Linggau	2018	Rp	105.606.815.786,70	25,38299
Kota Lubuk Linggau	2019	Rp	100.950.256.993,95	25,33789
Kota Pagar Alam	2017	Rp	65.538.892.445,17	24,90591
Kota Pagar Alam	2018	Rp	73.600.344.354,05	25,02192
Kota Pagar Alam	2019	Rp	60.064.187.982,36	24,81868
Kota Palembang	2017	Rp	1.091.704.605.854,80	27,71876
Kota Palembang	2018	Rp	953.302.082.627,74	27,5832
Kota Palembang	2019	Rp	1.081.114.690.868,43	27,70901
Kota Prabumulih	2017	Rp	119.192.660.726,34	25,50401
Kota Prabumulih	2018	Rp	90.910.521.066,19	25,23314
Kota Prabumulih	2019	Rp	100.975.564.957,57	25,33814
Kab. Bengkulu Selatan	2017	Rp	58.483.913.137,99	24,79202

Kab. Bengkulu Selatan	2018	Rp	67.243.733.479,88	24,93159
Kab. Bengkulu Selatan	2019	Rp	80.219.973.578,21	25,10804
Kab. Bengkulu Tengah	2017	Rp	23.684.806.983,38	23,8881
Kab. Bengkulu Tengah	2018	Rp	23.500.020.785,63	23,88027
Kab. Bengkulu Tengah	2019	Rp	23.036.859.909,48	23,86036
Kab. Bengkulu Utara	2017	Rp	70.272.813.710,19	24,97565
Kab. Bengkulu Utara	2018	Rp	117.688.313.638,27	25,49131
Kab. Bengkulu Utara	2019	Rp	71.754.871.935,36	24,99652
Kab. Kaur	2017	Rp	38.132.955.374,08	24,36434
Kab. Kaur	2018	Rp	37.085.958.440,71	24,3365
Kab. Kaur	2019	Rp	56.458.111.323,26	24,75676
Kab. Kepahiang	2017	Rp	30.212.642.457,48	24,13153
Kab. Kepahiang	2018	Rp	34.444.903.015,92	24,26263
Kab. Kepahiang	2019	Rp	36.278.690.193,33	24,3145
Kab. Lebong	2017	Rp	19.882.768.462,46	23,71312
Kab. Lebong	2018	Rp	35.309.104.726,71	24,28741
Kab. Lebong	2019	Rp	26.217.410.222,96	23,98969
Kab. Mukomuko	2017	Rp	80.932.143.144,33	25,11688
Kab. Mukomuko	2018	Rp	85.747.717.510,44	25,17468
Kab. Mukomuko	2019	Rp	80.762.260.921,51	25,11478
Kab. Rejang Lebong	2017	Rp	113.019.795.249,28	25,45083
Kab. Rejang Lebong	2018	Rp	84.508.249.814,81	25,16011
Kab. Rejang Lebong	2019	Rp	76.387.626.754,44	25,05909
Kab. Seluma	2017	Rp	54.153.900.889,18	24,7151
Kab. Seluma	2018	Rp	58.028.361.578,40	24,7842
Kab. Seluma	2019	Rp	67.231.277.665,72	24,9314
Kota Bengkulu	2017	Rp	170.921.364.205,39	25,86447
Kota Bengkulu	2018	Rp	182.884.786.441,88	25,93212
Kota Bengkulu	2019	Rp	182.798.143.645,88	25,93165
Kab. Lampung Barat	2017	Rp	46.789.226.369,18	24,56892
Kab. Lampung Barat	2018	Rp	50.471.541.308,65	24,64468
Kab. Lampung Barat	2019	Rp	65.267.416.664,56	24,90176
Kab. Lampung Selatan	2017	Rp	206.061.231.195,83	26,05144
Kab. Lampung Selatan	2018	Rp	215.411.464.185,87	26,09582
Kab. Lampung Selatan	2019	Rp	275.464.317.224,17	26,34172
Kab. Lampung Tengah	2017	Rp	147.048.201.164,38	25,71403
Kab. Lampung Tengah	2018	Rp	165.414.825.485,54	25,83172
Kab. Lampung Tengah	2019	Rp	193.634.175.310,21	25,98924
Kab. Lampung Timur	2017	Rp	111.886.192.443,77	25,44075

Kab. Lampung Timur	2018	Rp	125.035.523.317,06	25,55186
Kab. Lampung Timur	2019	Rp	147.527.535.828,35	25,71728
Kab. Lampung Utara	2017	Rp	103.970.703.713,71	25,36738
Kab. Lampung Utara	2018	Rp	102.289.605.031,63	25,35107
Kab. Lampung Utara	2019	Rp	102.587.471.150,03	25,35398
Kab. Mesuji	2017	Rp	22.114.016.973,55	23,81948
Kab. Mesuji	2018	Rp	33.206.360.523,68	24,22601
Kab. Mesuji	2019	Rp	45.620.663.051,80	24,54363
Kab. Pesawaran	2017	Rp	50.154.096.623,87	24,63837
Kab. Pesawaran	2018	Rp	58.265.161.928,88	24,78827
Kab. Pesawaran	2019	Rp	65.693.842.719,43	24,90827
Kab. Pesisir Barat	2017	Rp	42.895.150.220,64	24,48202
Kab. Pesisir Barat	2018	Rp	23.481.041.773,29	23,87946
Kab. Pesisir Barat	2019	Rp	29.323.369.726,21	24,10165
Kab. Pringsewu	2017	Rp	117.629.412.763,65	25,4908
Kab. Pringsewu	2018	Rp	71.824.582.142,41	24,99749
Kab. Pringsewu	2019	Rp	86.313.480.515,97	25,18125
Kab. Tanggamus	2017	Rp	60.338.632.813,86	24,82324
Kab. Tanggamus	2018	Rp	61.714.421.073,25	24,84578
Kab. Tanggamus	2019	Rp	76.050.778.580,12	25,05467
Kab. Tulang Bawang	2017	Rp	40.931.506.761,84	24,43517
Kab. Tulang Bawang	2018	Rp	67.129.955.994,70	24,9299
Kab. Tulang Bawang	2019	Rp	82.379.613.623,11	25,1346
Kab. Tulang Bawang Barat	2017	Rp	23.142.474.247,15	23,86494
Kab. Tulang Bawang Barat	2018	Rp	27.613.469.635,77	24,04157
Kab. Tulang Bawang Barat	2019	Rp	32.410.517.401,12	24,20175
Kab. Way Kanan	2017	Rp	49.551.283.407,98	24,62627
Kab. Way Kanan	2018	Rp	56.764.985.088,23	24,76219
Kab. Way Kanan	2019	Rp	62.353.560.983,81	24,85609
Kota Bandar Lampung	2017	Rp	612.809.680.623,87	27,14132
Kota Bandar Lampung	2018	Rp	550.275.048.130,32	27,03368
Kota Bandar Lampung	2019	Rp	627.296.544.826,64	27,16469
Kota Metro	2017	Rp	138.839.408.334,45	25,65658
Kota Metro	2018	Rp	132.202.276.039,19	25,6076
Kota Metro	2019	Rp	176.199.324.166,39	25,89488
Kab. Bangka	2017	Rp	196.070.486.772,76	26,00174
Kab. Bangka	2018	Rp	173.056.934.828,79	25,87689
Kab. Bangka	2019	Rp	144.668.128.852,62	25,69771
Kab. Bangka Barat	2017	Rp	78.486.881.529,45	25,0862

Kab. Bangka Barat	2018	Rp	69.765.373.034,63	24,9684
Kab. Bangka Barat	2019	Rp	67.746.468.419,01	24,93904
Kab. Bangka Selatan	2017	Rp	84.707.727.750,31	25,16247
Kab. Bangka Selatan	2018	Rp	49.427.844.307,14	24,62378
Kab. Bangka Selatan	2019	Rp	62.941.444.714,19	24,86547
Kab. Bangka Tengah	2017	Rp	97.375.136.679,82	25,30184
Kab. Bangka Tengah	2018	Rp	75.995.335.730,86	25,05394
Kab. Bangka Tengah	2019	Rp	88.848.500.111,92	25,2102
Kab. Belitung	2017	Rp	193.196.265.848,73	25,98697
Kab. Belitung	2018	Rp	191.938.969.495,04	25,98044
Kab. Belitung	2019	Rp	177.674.823.550,42	25,90322
Kab. Belitung Timur	2017	Rp	109.657.373.539,57	25,42063
Kab. Belitung Timur	2018	Rp	109.456.286.246,75	25,41879
Kab. Belitung Timur	2019	Rp	111.247.802.604,87	25,43503
Kota Pangkal Pinang	2017	Rp	173.947.112.861,17	25,88202
Kota Pangkal Pinang	2018	Rp	167.131.991.665,98	25,84205
Kota Pangkal Pinang	2019	Rp	155.116.318.111,20	25,76744
Kab. Bintan	2017	Rp	257.000.773.231,86	26,27234
Kab. Bintan	2018	Rp	286.602.276.549,94	26,38136
Kab. Bintan	2019	Rp	372.155.030.107,70	26,64258
Kab. Karimun	2017	Rp	391.618.720.927,70	26,69355
Kab. Karimun	2018	Rp	349.015.269.518,49	26,57838
Kab. Karimun	2019	Rp	356.972.035.839,26	26,60092
Kab. Kepulauan Anambas	2017	Rp	43.788.185.055,54	24,50263
Kab. Kepulauan Anambas	2018	Rp	35.178.837.743,93	24,28371
Kab. Kepulauan Anambas	2019	Rp	36.560.321.314,96	24,32223
Kab. Lingga	2017	Rp	22.146.867.684,09	23,82096
Kab. Lingga	2018	Rp	30.072.594.172,00	24,12688
Kab. Lingga	2019	Rp	37.492.637.246,28	24,34741
Kab. Natuna	2017	Rp	68.704.602.094,55	24,95308
Kab. Natuna	2018	Rp	47.952.668.664,58	24,59348
Kab. Natuna	2019	Rp	56.417.450.262,53	24,75604
Kota Batam	2017	Rp	974.124.203.684,08	27,6048
Kota Batam	2018	Rp	1.084.640.559.852,99	27,71227
Kota Batam	2019	Rp	1.147.685.950.193,30	27,76877
Kota Tanjung Pinang	2017	Rp	161.711.370.675,54	25,80908
Kota Tanjung Pinang	2018	Rp	160.470.588.593,64	25,80138
Kota Tanjung Pinang	2019	Rp	148.494.445.011,70	25,72381

LAMPIRAN 3: Rekap data Dana Perimbangan

Nama Kabupaten dan Kota	Tahun	Dana Perimbangan	Ln Dana Perimbangan
Kab. Aceh Barat	2017	Rp 768.955.867.896,00	27,3682994
Kab. Aceh Barat	2018	Rp 781.868.536.239,00	27,3849525
Kab. Aceh Barat	2019	Rp 814.507.507.903,00	27,4258495
Kab. Aceh Barat Daya	2017	Rp 616.172.642.987,00	27,146793
Kab. Aceh Barat Daya	2018	Rp 656.379.749.204,00	27,2100053
Kab. Aceh Barat Daya	2019	Rp 616.293.166.060,00	27,1469886
Kab. Aceh Besar	2017	Rp 944.271.107.790,00	27,5736792
Kab. Aceh Besar	2018	Rp 930.010.592.141,00	27,5584618
Kab. Aceh Besar	2019	Rp 1.012.163.249.230,00	27,643111
Kab. Aceh Jaya	2017	Rp 565.133.361.976,00	27,0603276
Kab. Aceh Jaya	2018	Rp 584.376.272.078,00	27,0938109
Kab. Aceh Jaya	2019	Rp 561.610.964.978,00	27,0540752
Kab. Aceh Selatan	2017	Rp 951.220.993.078,00	27,5810123
Kab. Aceh Selatan	2018	Rp 965.371.745.516,00	27,5957791
Kab. Aceh Selatan	2019	Rp 931.637.089.659,00	27,5602092
Kab. Aceh Singkil	2017	Rp 589.766.359.602,00	27,1029923
Kab. Aceh Singkil	2018	Rp 576.956.207.571,00	27,0810322
Kab. Aceh Singkil	2019	Rp 582.727.132.406,00	27,0909849
Kab. Aceh Tamiang	2017	Rp 772.295.722.888,00	27,3726334
Kab. Aceh Tamiang	2018	Rp 781.786.995.632,00	27,3848482
Kab. Aceh Tamiang	2019	Rp 794.905.901.151,00	27,4014896
Kab. Aceh Tengah	2017	Rp 875.816.161.614,00	27,498422
Kab. Aceh Tengah	2018	Rp 829.534.775.825,00	27,4441309
Kab. Aceh Tengah	2019	Rp 821.300.806.452,00	27,4341553
Kab. Aceh Tenggara	2017	Rp 790.800.082.057,00	27,396311
Kab. Aceh Tenggara	2018	Rp 743.756.855.653,00	27,33498
Kab. Aceh Tenggara	2019	Rp 785.308.359.305,00	27,3893423
Kab. Aceh Timur	2017	Rp 1.043.156.637.656,00	27,6732725
Kab. Aceh Timur	2018	Rp 1.027.652.921.597,00	27,6582986
Kab. Aceh Timur	2019	Rp 1.106.529.214.868,00	27,7322494
Kab. Aceh Utara	2017	Rp 1.328.605.892.782,00	27,9151513
Kab. Aceh Utara	2018	Rp 1.342.423.755.687,00	27,9254979
Kab. Aceh Utara	2019	Rp 1.454.869.953.193,00	28,0059376
Kab. Bener Meriah	2017	Rp 571.579.093.355,00	27,0716687
Kab. Bener Meriah	2018	Rp 580.388.983.190,00	27,0869644
Kab. Bener Meriah	2019	Rp 609.708.370.154,00	27,1362466

Kab. Bireun	2017	Rp 1.156.115.277.116,00	27,7760866
Kab. Bireun	2018	Rp 1.064.479.927.363,00	27,6935075
Kab. Bireun	2019	Rp 1.107.652.778.543,00	27,7332643
Kab. Gayo Lues	2017	Rp 571.558.575.124,00	27,0716328
Kab. Gayo Lues	2018	Rp 649.955.059.479,00	27,2001691
Kab. Gayo Lues	2019	Rp 592.151.985.612,00	27,1070292
Kab. Nagan Raya	2017	Rp 579.125.407.276,00	27,0847849
Kab. Nagan Raya	2018	Rp 667.610.847.884,00	27,2269713
Kab. Nagan Raya	2019	Rp 673.321.655.285,00	27,235489
Kab. Pidie	2017	Rp 1.072.658.698.773,00	27,7011614
Kab. Pidie	2018	Rp 1.098.033.955.156,00	27,7245424
Kab. Pidie	2019	Rp 1.066.925.649.561,00	27,6958024
Kab. Pidie Jaya	2017	Rp 593.660.765.518,85	27,1095739
Kab. Pidie Jaya	2018	Rp 610.014.885.166,00	27,1367492
Kab. Pidie Jaya	2019	Rp 608.460.391.748,00	27,1341977
Kab. Simeulue	2017	Rp 604.618.275.744,00	27,1278631
Kab. Simeulue	2018	Rp 588.843.953.598,00	27,1014271
Kab. Simeulue	2019	Rp 623.903.270.175,00	27,1592612
Kota Banda Aceh	2017	Rp 737.750.392.419,00	27,3268714
Kota Banda Aceh	2018	Rp 748.380.228.413,00	27,341177
Kota Banda Aceh	2019	Rp 752.795.789.176,00	27,3470598
Kota Langsa	2017	Rp 677.192.132.793,00	27,2412209
Kota Langsa	2018	Rp 593.621.554.571,00	27,1095078
Kota Langsa	2019	Rp 617.782.373.399,00	27,1494021
Kota Lhokseumawe	2017	Rp 644.213.912.781,00	27,1912967
Kota Lhokseumawe	2018	Rp 586.255.868.918,00	27,0970222
Kota Lhokseumawe	2019	Rp 607.297.641.452,00	27,1322849
Kota Sabang	2017	Rp 436.019.489.449,00	26,8009528
Kota Sabang	2018	Rp 489.653.789.249,00	26,9169644
Kota Sabang	2019	Rp 478.978.998.625,00	26,8949226
Kota Subulussalam	2017	Rp 494.792.042.493,00	26,9274034
Kota Subulussalam	2018	Rp 432.614.060.638,00	26,7931119
Kota Subulussalam	2019	Rp 459.031.906.513,00	26,8523856
Kab. Asahan	2017	Rp 1.137.299.069.609,00	27,7596773
Kab. Asahan	2018	Rp 1.176.621.457.467,00	27,7936683
Kab. Asahan	2019	Rp 1.198.101.351.385,00	27,8117592
Kab. Batubara	2017	Rp 781.997.824.280,00	27,3851178
Kab. Batubara	2018	Rp 784.874.225.863,00	27,3887893
Kab. Batubara	2019	Rp 800.268.552.172,00	27,4082132

Kab. Dairi	2017	Rp 790.001.519.650,00	27,3953007
Kab. Dairi	2018	Rp 790.001.519.650,00	27,3953007
Kab. Dairi	2019	Rp 826.507.837.823,00	27,4404752
Kab. Deli Serdang	2017	Rp 1.987.560.013.808,00	28,3179289
Kab. Deli Serdang	2018	Rp 1.992.298.798.336,00	28,3203103
Kab. Deli Serdang	2019	Rp 2.000.833.953.938,00	28,3245852
Kab. Humbang Hasundutan	2017	Rp 719.933.211.876,00	27,3024243
Kab. Humbang Hasundutan	2018	Rp 681.797.476.833,00	27,2479985
Kab. Humbang Hasundutan	2019	Rp 707.685.265.766,00	27,2852653
Kab. Karo	2017	Rp 888.960.603.173,00	27,5133188
Kab. Karo	2018	Rp 941.257.217.088,00	27,5704823
Kab. Karo	2019	Rp 977.630.358.355,00	27,6083975
Kab. Labuhanbatu	2017	Rp 908.583.176.239,00	27,5351523
Kab. Labuhanbatu	2018	Rp 928.906.312.239,00	27,5572737
Kab. Labuhanbatu	2019	Rp 925.148.005.724,00	27,5532196
Kab. Labuhanbatu Selatan	2017	Rp 692.535.739.210,00	27,2636257
Kab. Labuhanbatu Selatan	2018	Rp 713.753.018.665,00	27,2938028
Kab. Labuhanbatu Selatan	2019	Rp 714.150.631.492,00	27,2943597
Kab. Labuhanbatu Utara	2017	Rp 839.472.606.186,00	27,4560397
Kab. Labuhanbatu Utara	2018	Rp 864.256.204.242,00	27,4851351
Kab. Labuhanbatu Utara	2019	Rp 817.231.451.960,00	27,4291882
Kab. Langkat	2017	Rp 1.774.515.682.680,00	28,2045486
Kab. Langkat	2018	Rp 1.722.928.314.875,00	28,1750465
Kab. Langkat	2019	Rp 1.732.852.882.496,00	28,1807902
Kab. Mandailing Natal	2017	Rp 1.045.563.864.478,00	27,6755774
Kab. Mandailing Natal	2018	Rp 1.064.375.456.777,00	27,6934093
Kab. Mandailing Natal	2019	Rp 1.139.343.819.991,00	27,7614736
Kab. Nias	2017	Rp 599.493.520.084,00	27,119351
Kab. Nias	2018	Rp 608.250.693.290,00	27,133853
Kab. Nias	2019	Rp 621.468.917.081,00	27,1553517
Kab. Nias Barat	2017	Rp 506.809.585.092,00	26,9514012
Kab. Nias Barat	2018	Rp 568.007.188.680,00	27,0653999
Kab. Nias Barat	2019	Rp 564.638.256.423,00	27,0594511
Kab. Nias Selatan	2017	Rp 768.617.877.771,00	27,3678598
Kab. Nias Selatan	2018	Rp 771.694.298.994,00	27,3718543
Kab. Nias Selatan	2019	Rp 859.504.478.763,00	27,4796219
Kab. Nias Utara	2017	Rp 555.706.647.346,00	27,0435064
Kab. Nias Utara	2018	Rp 564.777.933.815,00	27,0596985
Kab. Nias Utara	2019	Rp 659.120.965.664,00	27,2141729

Kab. Padang Lawas	2017	Rp 696.290.830.464,00	27,2690333
Kab. Padang Lawas	2018	Rp 706.290.658.171,00	27,2832927
Kab. Padang Lawas	2019	Rp 759.871.292.490,00	27,3564149
Kab. Padang Lawas Utara	2017	Rp 709.333.080.176,00	27,287591
Kab. Padang Lawas Utara	2018	Rp 700.703.635.068,00	27,2753509
Kab. Padang Lawas Utara	2019	Rp 763.032.737.308,00	27,3605668
Kab. Pakpak Bharat	2017	Rp 428.721.693.525,00	26,7840738
Kab. Pakpak Bharat	2018	Rp 425.088.931.780,00	26,7755642
Kab. Pakpak Bharat	2019	Rp 462.549.741.238,00	26,8600199
Kab. Samosir	2017	Rp 634.006.321.459,00	27,1753248
Kab. Samosir	2018	Rp 608.164.685.810,00	27,1337115
Kab. Samosir	2019	Rp 634.879.083.291,00	27,1767004
Kab. Serdang Bedagai	2017	Rp 1.024.148.170.383,00	27,6548823
Kab. Serdang Bedagai	2018	Rp 1.118.880.330.379,00	27,7433496
Kab. Serdang Bedagai	2019	Rp 1.077.175.098.960,00	27,7053631
Kab. Simalungun	2017	Rp 1.651.913.534.467,00	28,1329554
Kab. Simalungun	2018	Rp 1.595.373.952.344,00	28,0981293
Kab. Simalungun	2019	Rp 1.638.140.548.143,00	28,1245829
Kab. Tapanuli Selatan	2017	Rp 833.027.848.924,00	27,4483329
Kab. Tapanuli Selatan	2018	Rp 940.110.738.096,00	27,5692635
Kab. Tapanuli Selatan	2019	Rp 976.668.586.417,00	27,6074132
Kab. Tapanuli Tengah	2017	Rp 849.775.743.869,00	27,4682383
Kab. Tapanuli Tengah	2018	Rp 887.237.071.769,00	27,5113781
Kab. Tapanuli Tengah	2019	Rp 863.854.168.332,00	27,4846698
Kab. Tapanuli Utara	2017	Rp 828.361.615.959,00	27,4427156
Kab. Tapanuli Utara	2018	Rp 868.012.988.517,00	27,4894725
Kab. Tapanuli Utara	2019	Rp 898.881.627.467,00	27,5244172
Kab. Toba Samosir	2017	Rp 753.482.194.833,00	27,3479712
Kab. Toba Samosir	2018	Rp 705.931.756.689,00	27,2827844
Kab. Toba Samosir	2019	Rp 735.587.572.963,00	27,3239354
Kota Binjai	2017	Rp 689.450.970.673,00	27,2591614
Kota Binjai	2018	Rp 714.374.160.938,00	27,2946727
Kota Binjai	2019	Rp 722.172.307.255,00	27,3055296
Kota Gunungsitoli	2017	Rp 546.848.082.574,00	27,0274369
Kota Gunungsitoli	2018	Rp 552.039.778.301,00	27,0368859
Kota Gunungsitoli	2019	Rp 559.094.823.827,00	27,0495849
Kota Medan	2017	Rp 2.122.769.416.793,00	28,3837427
Kota Medan	2018	Rp 2.157.180.424.946,00	28,3998231
Kota Medan	2019	Rp 2.156.807.334.247,00	28,3996502

Kota Padangsidimpuan	2017	Rp 673.189.397.118,00	27,2352925
Kota Padangsidimpuan	2018	Rp 641.431.373.569,00	27,186968
Kota Padangsidimpuan	2019	Rp 693.704.664.371,00	27,2653122
Kota Pematangsiantar	2017	Rp 727.984.049.610,00	27,313545
Kota Pematangsiantar	2018	Rp 796.804.963.671,00	27,4038758
Kota Pematangsiantar	2019	Rp 786.015.109.363,00	27,3902419
Kota Sibolga	2017	Rp 490.499.639.818,00	26,9186904
Kota Sibolga	2018	Rp 512.639.624.901,00	26,9628389
Kota Sibolga	2019	Rp 502.391.227.055,00	26,942645
Kota Tanjung Balai	2017	Rp 511.282.786.918,00	26,9601887
Kota Tanjung Balai	2018	Rp 524.827.102.453,00	26,9863347
Kota Tanjung Balai	2019	Rp 547.449.083.975,00	27,0285353
Kota Tebing Tinggi	2017	Rp 566.917.829.684,00	27,0634802
Kota Tebing Tinggi	2018	Rp 540.901.919.396,00	27,0165038
Kota Tebing Tinggi	2019	Rp 547.285.111.940,00	27,0282357
Kab. Agam	2017	Rp 1.078.038.915.777,00	27,7061647
Kab. Agam	2018	Rp 1.092.066.030.986,00	27,7190925
Kab. Agam	2019	Rp 1.143.589.671.865,00	27,7651933
Kab. Dharmasraya	2017	Rp 696.906.890.931,00	27,2699177
Kab. Dharmasraya	2018	Rp 659.599.246.162,00	27,2148983
Kab. Dharmasraya	2019	Rp 826.079.695.880,00	27,4399571
Kab. Kepulauan Mentawai	2017	Rp 731.385.235.582,00	27,3182062
Kab. Kepulauan Mentawai	2018	Rp 776.846.474.070,00	27,3785086
Kab. Kepulauan Mentawai	2019	Rp 818.830.711.081,00	27,4311432
Kab. Limapuluh Kota	2017	Rp 992.052.782.677,00	27,6230422
Kab. Limapuluh Kota	2018	Rp 997.618.221.045,00	27,6286365
Kab. Limapuluh Kota	2019	Rp 1.016.024.131.816,00	27,6469182
Kab. Padang Pariaman	2017	Rp 1.059.564.099.184,00	27,6888787
Kab. Padang Pariaman	2018	Rp 1.087.008.037.363,00	27,7144501
Kab. Padang Pariaman	2019	Rp 1.139.643.299.241,00	27,7617364
Kab. Pasaman	2017	Rp 767.064.865.457,00	27,3658372
Kab. Pasaman	2018	Rp 755.591.287.380,00	27,3507664
Kab. Pasaman	2019	Rp 785.186.900.144,00	27,3891876
Kab. Pasaman Barat	2017	Rp 835.170.390.501,00	27,4509016
Kab. Pasaman Barat	2018	Rp 887.119.463.273,00	27,5112455
Kab. Pasaman Barat	2019	Rp 919.575.539.335,00	27,547178
Kab. Pesisir Selatan	2017	Rp 1.109.254.189.839,00	27,734709
Kab. Pesisir Selatan	2018	Rp 1.120.389.365.019,00	27,7446974
Kab. Pesisir Selatan	2019	Rp 1.213.725.540.008,00	27,8247157

Kab. Sijunjung	2017	Rp 710.605.073.934,00	27,2893827
Kab. Sijunjung	2018	Rp 700.524.757.858,00	27,2750955
Kab. Sijunjung	2019	Rp 737.765.488.567,00	27,3268918
Kab. Solok	2017	Rp 911.897.537.818,00	27,5387935
Kab. Solok	2018	Rp 936.193.160.458,00	27,5650877
Kab. Solok	2019	Rp 980.735.199.266,00	27,6115683
Kab. Solok Selatan	2017	Rp 641.966.526.857,00	27,187802
Kab. Solok Selatan	2018	Rp 636.215.119.814,00	27,1788026
Kab. Solok Selatan	2019	Rp 695.366.633.765,00	27,2677051
Kab. Tanah Datar	2017	Rp 928.980.499.474,00	27,5573536
Kab. Tanah Datar	2018	Rp 944.906.738.207,00	27,5743521
Kab. Tanah Datar	2019	Rp 984.486.247.225,00	27,6153858
Kota Bukit Tinggi	2017	Rp 516.228.868.598,00	26,969816
Kota Bukit Tinggi	2018	Rp 523.061.869.776,00	26,9829656
Kota Bukit Tinggi	2019	Rp 552.063.924.512,00	27,0369297
Kota Padang	2017	Rp 1.360.290.810.177,00	27,9387196
Kota Padang	2018	Rp 1.427.929.632.546,00	27,9872467
Kota Padang	2019	Rp 1.524.369.871.667,00	28,0526022
Kota Padang Panjang	2017	Rp 439.519.041.267,00	26,8089469
Kota Padang Panjang	2018	Rp 442.112.700.653,00	26,8148307
Kota Padang Panjang	2019	Rp 453.085.922.598,00	26,8393476
Kota Pariaman	2017	Rp 515.176.988.201,00	26,9677763
Kota Pariaman	2018	Rp 509.927.165.546,00	26,9575337
Kota Pariaman	2019	Rp 526.506.564.742,00	26,9895296
Kota Payakumbuh	2017	Rp 545.291.941.107,00	27,0245872
Kota Payakumbuh	2018	Rp 555.756.233.988,00	27,0435956
Kota Payakumbuh	2019	Rp 609.589.230.923,00	27,1360512
Kota Sawahlunto	2017	Rp 467.157.187.329,00	26,8699316
Kota Sawahlunto	2018	Rp 458.504.259.105,00	26,8512354
Kota Sawahlunto	2019	Rp 495.141.841.033,00	26,9281101
Kota Solok	2017	Rp 472.503.110.300,00	26,8813102
Kota Solok	2018	Rp 481.477.263.215,00	26,9001248
Kota Solok	2019	Rp 508.925.258.581,00	26,955567
Kab. Bengkalis	2017	Rp 2.591.358.516.446,00	28,5832034
Kab. Bengkalis	2018	Rp 2.783.227.694.772,00	28,6546324
Kab. Bengkalis	2019	Rp 3.192.463.207.633,00	28,7918139
Kab. Indragiri Hilir	2017	Rp 1.283.445.095.586,00	27,8805691
Kab. Indragiri Hilir	2018	Rp 1.363.810.136.635,00	27,9413035
Kab. Indragiri Hilir	2019	Rp 1.482.961.894.630,00	28,0250625

Kab. Indragiri Hulu	2017	Rp 1.052.046.321.546,00	27,6817583
Kab. Indragiri Hulu	2018	Rp 1.057.923.905.130,00	27,6873295
Kab. Indragiri Hulu	2019	Rp 1.209.058.944.326,00	27,8208634
Kab. Kampar	2017	Rp 1.525.027.088.899,00	28,0530333
Kab. Kampar	2018	Rp 1.700.587.583.417,00	28,1619949
Kab. Kampar	2019	Rp 1.957.011.119.683,00	28,3024395
Kab. Kepulauan Meranti	2017	Rp 724.244.592.606,00	27,308395
Kab. Kepulauan Meranti	2018	Rp 781.602.610.877,00	27,3846123
Kab. Kepulauan Meranti	2019	Rp 884.353.281.057,00	27,5081225
Kab. Kuantan Singingi	2017	Rp 962.852.753.994,00	27,5931663
Kab. Kuantan Singingi	2018	Rp 1.020.439.473.404,25	27,6512545
Kab. Kuantan Singingi	2019	Rp 1.089.904.306.784,00	27,7171111
Kab. Pelalawan	2017	Rp 1.076.802.235.591,00	27,7050169
Kab. Pelalawan	2018	Rp 1.088.778.596.712,00	27,7160776
Kab. Pelalawan	2019	Rp 1.219.439.285.252,00	27,8294123
Kab. Rokan Hilir	2017	Rp 1.093.461.055.498,00	27,7203691
Kab. Rokan Hilir	2018	Rp 1.568.825.512.037,26	28,0813484
Kab. Rokan Hilir	2019	Rp 1.660.077.683.238,00	28,1378855
Kab. Rokan Hulu	2017	Rp 1.012.398.394.269,00	27,6433433
Kab. Rokan Hulu	2018	Rp 1.119.942.706.465,00	27,7442986
Kab. Rokan Hulu	2019	Rp 1.233.000.357.963,00	27,8404716
Kab. Siak	2017	Rp 1.156.043.825.678,00	27,7760248
Kab. Siak	2018	Rp 1.388.860.212.601,00	27,9595045
Kab. Siak	2019	Rp 1.617.648.976.879,00	28,111995
Kota Dumai	2017	Rp 755.592.886.590,00	27,3507686
Kota Dumai	2018	Rp 810.190.491.050,00	27,4205352
Kota Dumai	2019	Rp 856.129.356.781,00	27,4756873
Kota Pekanbaru	2017	Rp 1.222.248.651.620,00	27,8317134
Kota Pekanbaru	2018	Rp 1.277.237.744.503,00	27,8757208
Kota Pekanbaru	2019	Rp 1.304.793.092.679,00	27,8970656
Kab. Batanghari	2017	Rp 928.625.426.992,00	27,5569713
Kab. Batanghari	2018	Rp 888.246.032.876,00	27,5125146
Kab. Batanghari	2019	Rp 963.265.456.033,00	27,5935949
Kab. Bungo	2017	Rp 909.063.377.858,00	27,5356807
Kab. Bungo	2018	Rp 917.465.257.753,00	27,5448805
Kab. Bungo	2019	Rp 961.103.622.312,00	27,5913481
Kab. Kerinci	2017	Rp 799.918.426.092,00	27,4077756
Kab. Kerinci	2018	Rp 802.840.678.513,00	27,4114221
Kab. Kerinci	2019	Rp 849.466.651.198,00	27,4678745

Kab. Merangin	2017	Rp 979.514.011.117,00	27,6103224
Kab. Merangin	2018	Rp 978.236.523.005,00	27,6090173
Kab. Merangin	2019	Rp 1.039.700.153.727,00	27,6699535
Kab. Muaro Jambi	2017	Rp 859.324.679.526,00	27,4794127
Kab. Muaro Jambi	2018	Rp 978.668.219.537,00	27,6094585
Kab. Muaro Jambi	2019	Rp 1.042.395.593.185,00	27,6725426
Kab. Sarolangun	2017	Rp 768.388.109.947,00	27,3675608
Kab. Sarolangun	2018	Rp 771.255.321.376,00	27,3712853
Kab. Sarolangun	2019	Rp 972.212.674.454,00	27,6028404
Kab. Tanjung Jabung Barat	2017	Rp 1.037.376.490.573,00	27,667716
Kab. Tanjung Jabung Barat	2018	Rp 1.096.229.881.989,00	27,722898
Kab. Tanjung Jabung Barat	2019	Rp 1.306.126.943.112,00	27,8980873
Kab. Tanjung Jabung Timur	2017	Rp 896.259.003.727,00	27,5214953
Kab. Tanjung Jabung Timur	2018	Rp 905.488.095.447,00	27,53174
Kab. Tanjung Jabung Timur	2019	Rp 959.088.814.692,00	27,5892495
Kab. Tebo	2017	Rp 780.757.475.197,00	27,3835304
Kab. Tebo	2018	Rp 806.443.699.184,00	27,4158999
Kab. Tebo	2019	Rp 842.319.739.490,00	27,4594255
Kota Jambi	2017	Rp 1.013.005.895.282,00	27,6439432
Kota Jambi	2018	Rp 1.110.714.904.091,00	27,736025
Kota Jambi	2019	Rp 1.110.177.033.331,00	27,7355406
Kota Sungai Penuh	2017	Rp 561.309.821.992,00	27,0535389
Kota Sungai Penuh	2018	Rp 571.604.008.621,00	27,0717123
Kota Sungai Penuh	2019	Rp 608.668.101.595,00	27,134539
Kab. Banyuasin	2017	Rp 1.438.187.888.419,00	27,994405
Kab. Banyuasin	2018	Rp 1.449.491.756.245,00	28,0022341
Kab. Banyuasin	2019	Rp 1.593.797.202.353,00	28,0971405
Kab. Empat Lawang	2017	Rp 681.697.460.037,00	27,2478518
Kab. Empat Lawang	2018	Rp 745.236.496.901,00	27,3369675
Kab. Empat Lawang	2019	Rp 708.650.914.858,00	27,2866289
Kab. Lahat	2017	Rp 1.211.669.907.270,00	27,8230206
Kab. Lahat	2018	Rp 1.377.663.737.906,00	27,9514102
Kab. Lahat	2019	Rp 1.609.981.025.056,00	28,1072435
Kab. Muara Enim	2017	Rp 1.749.209.635.325,00	28,1901852
Kab. Muara Enim	2018	Rp 1.792.510.139.858,00	28,2146381
Kab. Muara Enim	2019	Rp 2.155.493.438.671,00	28,3990408
Kab. Musi Banyuasin	2017	Rp 2.284.442.011.973,00	28,4571429
Kab. Musi Banyuasin	2018	Rp 2.399.445.440.610,00	28,5062588
Kab. Musi Banyuasin	2019	Rp 3.103.333.197.302,00	28,7634979

Kab. Musi Rawas	2017	Rp 1.159.387.392.934,00	27,7789129
Kab. Musi Rawas	2018	Rp 1.330.725.122.188,00	27,9167451
Kab. Musi Rawas	2019	Rp 1.422.659.685.092,00	27,9835493
Kab. Musi Rawas Utara	2017	Rp 611.766.876.193,00	27,1396171
Kab. Musi Rawas Utara	2018	Rp 735.356.800.546,00	27,3236217
Kab. Musi Rawas Utara	2019	Rp 763.422.881.315,00	27,3610779
Kab. Ogan Ilir	2017	Rp 1.011.195.133.612,00	27,642154
Kab. Ogan Ilir	2018	Rp 1.049.790.700.966,00	27,6796119
Kab. Ogan Ilir	2019	Rp 1.162.384.119.643,00	27,7814943
Kab. Ogan Komering Ilir	2017	Rp 1.493.738.924.948,00	28,0323034
Kab. Ogan Komering Ilir	2018	Rp 1.603.716.516.140,00	28,1033449
Kab. Ogan Komering Ilir	2019	Rp 1.643.930.143.459,00	28,1281109
Kab. Ogan Komering Ulu	2017	Rp 1.031.818.532.773,00	27,6623439
Kab. Ogan Komering Ulu	2018	Rp 1.030.583.563.489,00	27,6611463
Kab. Ogan Komering Ulu	2019	Rp 1.116.968.931.247,00	27,7416398
Kab. OKU Selatan	2017	Rp 871.408.759.446,00	27,493377
Kab. OKU Selatan	2018	Rp 910.648.906.804,00	27,5374233
Kab. OKU Selatan	2019	Rp 946.979.470.007,00	27,5765433
Kab. OKU Timur	2017	Rp 1.109.643.390.143,00	27,7350598
Kab. OKU Timur	2018	Rp 1.170.665.910.633,00	27,7885939
Kab. OKU Timur	2019	Rp 1.224.659.839.616,00	27,8336842
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2017	Rp 801.951.800.923,00	27,4103143
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2018	Rp 1.022.376.727.650,00	27,6531512
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2019	Rp 914.755.584.675,00	27,5419227
Kota Lubuk Linggau	2017	Rp 715.153.298.144,00	27,2957628
Kota Lubuk Linggau	2018	Rp 706.155.116.266,00	27,2831008
Kota Lubuk Linggau	2019	Rp 763.615.315.295,00	27,36133
Kota Pagar Alam	2017	Rp 680.367.025.766,00	27,2458982
Kota Pagar Alam	2018	Rp 636.317.733.383,00	27,1789639
Kota Pagar Alam	2019	Rp 640.693.974.903,00	27,1858178
Kota Palembang	2017	Rp 1.908.214.621.886,00	28,2771892
Kota Palembang	2018	Rp 1.990.567.989.526,00	28,3194411
Kota Palembang	2019	Rp 1.968.123.627.878,00	28,3081017
Kota Prabumulih	2017	Rp 674.043.091.251,00	27,2365599
Kota Prabumulih	2018	Rp 738.071.836.484,00	27,327307
Kota Prabumulih	2019	Rp 861.847.458.222,00	27,4823441
Kab. Bengkulu Selatan	2017	Rp 745.167.788.456,00	27,3368752

Kab. Bengkulu Selatan	2018	Rp 719.220.826.108,00	27,3014343
Kab. Bengkulu Selatan	2019	Rp 788.676.766.319,00	27,3936224
Kab. Bengkulu Tengah	2017	Rp 572.387.809.559,00	27,0730826
Kab. Bengkulu Tengah	2018	Rp 586.359.625.485,00	27,0971991
Kab. Bengkulu Tengah	2019	Rp 633.940.942.801,00	27,1752216
Kab. Bengkulu Utara	2017	Rp 860.808.178.427,00	27,4811375
Kab. Bengkulu Utara	2018	Rp 853.289.964.881,00	27,4723653
Kab. Bengkulu Utara	2019	Rp 919.909.777.851,00	27,5475414
Kab. Kaur	2017	Rp 564.143.955.247,00	27,0585753
Kab. Kaur	2018	Rp 553.043.371.446,00	27,0387023
Kab. Kaur	2019	Rp 619.239.550.927,00	27,151758
Kab. Kepahiang	2017	Rp 546.319.382.894,00	27,0264696
Kab. Kepahiang	2018	Rp 534.765.881.190,00	27,0050949
Kab. Kepahiang	2019	Rp 574.572.735.472,00	27,0768925
Kab. Lebong	2017	Rp 527.121.099.549,00	26,9906961
Kab. Lebong	2018	Rp 516.194.934.411,00	26,9697503
Kab. Lebong	2019	Rp 552.195.531.297,00	27,037168
Kab. Mukomuko	2017	Rp 628.409.397.390,00	27,1664577
Kab. Mukomuko	2018	Rp 631.956.479.607,00	27,1720864
Kab. Mukomuko	2019	Rp 687.515.759.917,00	27,2563506
Kab. Rejang Lebong	2017	Rp 798.906.326.653,00	27,4065095
Kab. Rejang Lebong	2018	Rp 808.906.267.137,00	27,4189489
Kab. Rejang Lebong	2019	Rp 843.469.395.927,00	27,4607895
Kab. Seluma	2017	Rp 680.669.597.104,00	27,2463429
Kab. Seluma	2018	Rp 681.198.579.525,00	27,2471197
Kab. Seluma	2019	Rp 774.851.169.399,00	27,3759368
Kota Bengkulu	2017	Rp 860.321.381.362,00	27,4805719
Kota Bengkulu	2018	Rp 856.865.595.899,00	27,4765469
Kota Bengkulu	2019	Rp 913.742.634.220,00	27,5408148
Kab. Lampung Barat	2017	Rp 773.064.817.356,00	27,3736287
Kab. Lampung Barat	2018	Rp 854.830.511.647,00	27,4741691
Kab. Lampung Barat	2019	Rp 791.712.917.260,00	27,3974647
Kab. Lampung Selatan	2017	Rp 1.286.922.564.041,00	27,8832749
Kab. Lampung Selatan	2018	Rp 1.203.772.824.191,00	27,8164818
Kab. Lampung Selatan	2019	Rp 1.398.455.089.730,00	27,9663892
Kab. Lampung Tengah	2017	Rp 1.722.465.741.922,00	28,174778
Kab. Lampung Tengah	2018	Rp 1.808.254.062.561,00	28,2233829
Kab. Lampung Tengah	2019	Rp 1.797.258.034.498,00	28,2172833
Kab. Lampung Timur	2017	Rp 1.489.412.947.931,00	28,0294032

Kab. Lampung Timur	2018	Rp 1.494.906.155.709,00	28,0330845
Kab. Lampung Timur	2019	Rp 1.475.128.391.944,00	28,0197661
Kab. Lampung Utara	2017	Rp 1.246.229.672.491,00	27,8511438
Kab. Lampung Utara	2018	Rp 1.206.059.795.860,00	27,8183798
Kab. Lampung Utara	2019	Rp 1.244.666.930.848,00	27,8498891
Kab. Mesuji	2017	Rp 577.752.823.934,00	27,082412
Kab. Mesuji	2018	Rp 615.640.647.754,00	27,1459293
Kab. Mesuji	2019	Rp 632.875.492.470,00	27,1735395
Kab. Pesawaran	2017	Rp 930.162.730.630,00	27,5586254
Kab. Pesawaran	2018	Rp 946.460.223.996,00	27,5759948
Kab. Pesawaran	2019	Rp 895.181.485.501,00	27,5202923
Kab. Pesisir Barat	2017	Rp 596.175.229.649,00	27,1138005
Kab. Pesisir Barat	2018	Rp 573.283.931.025,00	27,0746469
Kab. Pesisir Barat	2019	Rp 587.653.782.034,00	27,0994038
Kab. Pringsewu	2017	Rp 860.970.139.909,00	27,4813257
Kab. Pringsewu	2018	Rp 842.346.040.377,00	27,4594567
Kab. Pringsewu	2019	Rp 859.198.408.361,00	27,4792657
Kab. Tanggamus	2017	Rp 1.130.001.624.786,00	27,7532402
Kab. Tanggamus	2018	Rp 1.074.909.696.931,00	27,7032578
Kab. Tanggamus	2019	Rp 1.131.249.311.788,00	27,7543437
Kab. Tulang Bawang	2017	Rp 825.407.650.779,00	27,4391432
Kab. Tulang Bawang	2018	Rp 903.489.249.205,00	27,52953
Kab. Tulang Bawang	2019	Rp 823.127.374.731,00	27,4363768
Kab. Tulang Bawang Barat	2017	Rp 674.301.172.719,09	27,2369427
Kab. Tulang Bawang Barat	2018	Rp 725.406.877.464,00	27,3099985
Kab. Tulang Bawang Barat	2019	Rp 674.827.807.842,00	27,2377234
Kab. Way Kanan	2017	Rp 1.034.484.642.816,00	27,6649245
Kab. Way Kanan	2018	Rp 1.023.173.721.974,00	27,6539304
Kab. Way Kanan	2019	Rp 990.355.064.471,00	27,6213294
Kota Bandar Lampung	2017	Rp 1.408.084.149.250,00	27,9732511
Kota Bandar Lampung	2018	Rp 1.364.968.467.075,00	27,9421524
Kota Bandar Lampung	2019	Rp 1.400.623.202.255,00	27,9679384
Kota Metro	2017	Rp 680.266.516.198,00	27,2457505
Kota Metro	2018	Rp 624.067.025.412,00	27,1595236
Kota Metro	2019	Rp 641.899.006.676,00	27,1876968
Kab. Bangka	2017	Rp 759.272.723.048,00	27,3556269
Kab. Bangka	2018	Rp 788.382.450.432,00	27,3932492
Kab. Bangka	2019	Rp 853.236.403.540,00	27,4723025
Kab. Bangka Barat	2017	Rp 615.426.059.715,00	27,1455806

Kab. Bangka Barat	2018	Rp 655.801.168.744,00	27,2091235
Kab. Bangka Barat	2019	Rp 702.774.160.567,00	27,2783014
Kab. Bangka Selatan	2017	Rp 595.946.369.147,00	27,1134165
Kab. Bangka Selatan	2018	Rp 702.514.968.717,00	27,2779325
Kab. Bangka Selatan	2019	Rp 744.491.729.022,00	27,3359676
Kab. Bangka Tengah	2017	Rp 573.265.595.148,00	27,074615
Kab. Bangka Tengah	2018	Rp 638.457.033.565,00	27,1823202
Kab. Bangka Tengah	2019	Rp 686.141.367.426,00	27,2543495
Kab. Belitung	2017	Rp 637.653.274.085,00	27,1810605
Kab. Belitung	2018	Rp 689.269.042.160,00	27,2588975
Kab. Belitung	2019	Rp 735.509.551.933,00	27,3238294
Kab. Belitung Timur	2017	Rp 554.464.898.167,00	27,0412693
Kab. Belitung Timur	2018	Rp 622.466.388.030,00	27,1569555
Kab. Belitung Timur	2019	Rp 664.882.063.775,00	27,2228755
Kota Pangkal Pinang	2017	Rp 571.588.810.635,00	27,0716857
Kota Pangkal Pinang	2018	Rp 665.149.903.809,00	27,2232783
Kota Pangkal Pinang	2019	Rp 631.622.884.858,00	27,1715584
Kab. Bintan	2017	Rp 712.750.581.449,00	27,2923974
Kab. Bintan	2018	Rp 740.417.202.564,00	27,3304797
Kab. Bintan	2019	Rp 805.321.051.217,00	27,4145069
Kab. Karimun	2017	Rp 666.919.062.821,00	27,2259345
Kab. Karimun	2018	Rp 782.262.123.753,00	27,3854557
Kab. Karimun	2019	Rp 777.012.011.114,00	27,3787216
Kab. Kepulauan Anambas	2017	Rp 657.349.246.866,00	27,2114813
Kab. Kepulauan Anambas	2018	Rp 716.579.765.314,00	27,2977554
Kab. Kepulauan Anambas	2019	Rp 985.056.008.411,00	27,6159643
Kab. Lingga	2017	Rp 615.990.804.716,00	27,1464979
Kab. Lingga	2018	Rp 704.376.691.007,00	27,2805791
Kab. Lingga	2019	Rp 724.084.270.767,00	27,3081736
Kab. Natuna	2017	Rp 792.799.529.965,00	27,3988362
Kab. Natuna	2018	Rp 813.630.180.398,00	27,4247718
Kab. Natuna	2019	Rp 1.145.678.638.470,00	27,7670183
Kota Batam	2017	Rp 962.500.055.668,00	27,5928
Kota Batam	2018	Rp 897.475.587.149,00	27,5228518
Kota Batam	2019	Rp 1.047.591.586.828,00	27,6775149
Kota Tanjung Pinang	2017	Rp 692.248.533.572,00	27,2632109
Kota Tanjung Pinang	2018	Rp 699.727.386.819,00	27,2739566
Kota Tanjung Pinang	2019	Rp 704.171.158.156,00	27,2802873

LAMPIRAN 4: Rekap data Luas Wilayah

Nama Kabupaten dan kota	Tahun	Luas Wilayah (KM2)	Ln Luas Wilayah
Kab. Aceh Barat	2017	2927,95	7,982058
Kab. Aceh Barat	2018	2927,95	7,982058
Kab. Aceh Barat	2019	2927,95	7,982058
Kab. Aceh Barat Daya	2017	1490,60	7,306934
Kab. Aceh Barat Daya	2018	1490,60	7,306934
Kab. Aceh Barat Daya	2019	1490,60	7,306934
Kab. Aceh Besar	2017	2969,00	7,99598
Kab. Aceh Besar	2018	2969,00	7,99598
Kab. Aceh Besar	2019	2969,00	7,99598
Kab. Aceh Jaya	2017	3812,99	8,246169
Kab. Aceh Jaya	2018	3812,99	8,246169
Kab. Aceh Jaya	2019	3812,99	8,246169
Kab. Aceh Selatan	2017	3841,60	8,253644
Kab. Aceh Selatan	2018	3841,60	8,253644
Kab. Aceh Selatan	2019	3841,60	8,253644
Kab. Aceh Singkil	2017	2185,00	7,689371
Kab. Aceh Singkil	2018	2185,00	7,689371
Kab. Aceh Singkil	2019	2185,00	7,689371
Kab. Aceh Tamiang	2017	1956,72	7,579025
Kab. Aceh Tamiang	2018	1956,72	7,579025
Kab. Aceh Tamiang	2019	1956,72	7,579025
Kab. Aceh Tengah	2017	4318,39	8,370638
Kab. Aceh Tengah	2018	4318,39	8,370638
Kab. Aceh Tengah	2019	4318,39	8,370638
Kab. Aceh Tenggara	2017	4231,43	8,350295
Kab. Aceh Tenggara	2018	4231,43	8,350295
Kab. Aceh Tenggara	2019	4231,43	8,350295
Kab. Aceh Timur	2017	6286,01	8,746082
Kab. Aceh Timur	2018	6286,01	8,746082
Kab. Aceh Timur	2019	6286,01	8,746082
Kab. Aceh Utara	2017	3236,86	8,082359
Kab. Aceh Utara	2018	3236,86	8,082359
Kab. Aceh Utara	2019	3236,86	8,082359
Kab. Bener Meriah	2017	1454,72	7,282569
Kab. Bener Meriah	2018	1454,72	7,282569

Kab. Bener Meriah	2019	1454,72	7,282569
Kab. Bireun	2017	1901,20	7,550241
Kab. Bireun	2018	1901,20	7,550241
Kab. Bireun	2019	1901,20	7,550241
Kab. Gayo Lues	2017	5719,58	8,651651
Kab. Gayo Lues	2018	5719,58	8,651651
Kab. Gayo Lues	2019	5719,58	8,651651
Kab. Nagan Raya	2017	3363,72	8,120803
Kab. Nagan Raya	2018	3363,72	8,120803
Kab. Nagan Raya	2019	3363,72	8,120803
Kab. Pidie	2017	3086,95	8,034939
Kab. Pidie	2018	3086,95	8,034939
Kab. Pidie	2019	3086,95	8,034939
Kab. Pidie Jaya	2017	1073,60	6,978773
Kab. Pidie Jaya	2018	1073,60	6,978773
Kab. Pidie Jaya	2019	1073,60	6,978773
Kab. Simeulue	2017	2051,48	7,626317
Kab. Simeulue	2018	2051,48	7,626317
Kab. Simeulue	2019	2051,48	7,626317
Kota Banda Aceh	2017	61,36	4,116758
Kota Banda Aceh	2018	61,36	4,116758
Kota Banda Aceh	2019	61,36	4,116758
Kota Langsa	2017	262,41	5,569908
Kota Langsa	2018	262,41	5,569908
Kota Langsa	2019	262,41	5,569908
Kota Lhokseumawe	2017	181,06	5,198828
Kota Lhokseumawe	2018	181,06	5,198828
Kota Lhokseumawe	2019	181,06	5,198828
Kota Sabang	2017	153,00	5,030438
Kota Sabang	2018	153,00	5,030438
Kota Sabang	2019	153,00	5,030438
Kota Subulussalam	2017	1391,00	7,237778
Kota Subulussalam	2018	1391,00	7,237778
Kota Subulussalam	2019	1391,00	7,237778
Kab. Asahan	2017	3702,21	8,216685
Kab. Asahan	2018	3702,21	8,216685
Kab. Asahan	2019	3702,21	8,216685
Kab. Batubara	2017	922,20	6,826762
Kab. Batubara	2018	922,20	6,826762

Kab. Batubara	2019	922,20	6,826762
Kab. Dairi	2017	1927,80	7,564135
Kab. Dairi	2018	1927,80	7,564135
Kab. Dairi	2019	1927,80	7,564135
Kab. Deli Serdang	2017	2241,68	7,714981
Kab. Deli Serdang	2018	2241,68	7,714981
Kab. Deli Serdang	2019	2241,68	7,714981
Kab. Humbang Hasundutan	2017	2335,33	7,755908
Kab. Humbang Hasundutan	2018	2335,33	7,755908
Kab. Humbang Hasundutan	2019	2335,33	7,755908
Kab. Karo	2017	2127,00	7,662468
Kab. Karo	2018	2127,00	7,662468
Kab. Karo	2019	2127,00	7,662468
Kab. Labuhanbatu	2017	2156,02	7,676019
Kab. Labuhanbatu	2018	2156,02	7,676019
Kab. Labuhanbatu	2019	2156,02	7,676019
Kab. Labuhanbatu Selatan	2017	3596,00	8,187577
Kab. Labuhanbatu Selatan	2018	3596,00	8,187577
Kab. Labuhanbatu Selatan	2019	3596,00	8,187577
Kab. Labuhanbatu Utara	2017	3570,98	8,180595
Kab. Labuhanbatu Utara	2018	3570,98	8,180595
Kab. Labuhanbatu Utara	2019	3570,98	8,180595
Kab. Langkat	2017	6262,00	8,742255
Kab. Langkat	2018	6262,00	8,742255
Kab. Langkat	2019	6262,00	8,742255
Kab. Mandailing Natal	2017	6134,00	8,721602
Kab. Mandailing Natal	2018	6134,00	8,721602
Kab. Mandailing Natal	2019	6134,00	8,721602
Kab. Nias	2017	1842,51	7,518884
Kab. Nias	2018	1842,51	7,518884
Kab. Nias	2019	1842,51	7,518884
Kab. Nias Barat	2017	473,73	6,160638
Kab. Nias Barat	2018	473,73	6,160638
Kab. Nias Barat	2019	473,73	6,160638
Kab. Nias Selatan	2017	1825,20	7,509445
Kab. Nias Selatan	2018	1825,20	7,509445
Kab. Nias Selatan	2019	1825,20	7,509445
Kab. Nias Utara	2017	1202,78	7,092391
Kab. Nias Utara	2018	1202,78	7,092391

Kab. Nias Utara	2019	1202,78	7,092391
Kab. Padang Lawas	2017	3892,74	8,266869
Kab. Padang Lawas	2018	3892,74	8,266869
Kab. Padang Lawas	2019	3892,74	8,266869
Kab. Padang Lawas Utara	2017	3918,05	8,273349
Kab. Padang Lawas Utara	2018	3918,05	8,273349
Kab. Padang Lawas Utara	2019	3918,05	8,273349
Kab. Pakpak Bharat	2017	1218,30	7,105212
Kab. Pakpak Bharat	2018	1218,30	7,105212
Kab. Pakpak Bharat	2019	1218,30	7,105212
Kab. Samosir	2017	2069,05	7,634845
Kab. Samosir	2018	2069,05	7,634845
Kab. Samosir	2019	2069,05	7,634845
Kab. Serdang Bedagai	2017	1900,22	7,549725
Kab. Serdang Bedagai	2018	1900,22	7,549725
Kab. Serdang Bedagai	2019	1900,22	7,549725
Kab. Simalungun	2017	4369,00	8,382289
Kab. Simalungun	2018	4369,00	8,382289
Kab. Simalungun	2019	4369,00	8,382289
Kab. Tapanuli Selatan	2017	6030,47	8,70458
Kab. Tapanuli Selatan	2018	6030,47	8,70458
Kab. Tapanuli Selatan	2019	6030,47	8,70458
Kab. Tapanuli Tengah	2017	2188,00	7,690743
Kab. Tapanuli Tengah	2018	2188,00	7,690743
Kab. Tapanuli Tengah	2019	2188,00	7,690743
Kab. Tapanuli Utara	2017	3791,64	8,240554
Kab. Tapanuli Utara	2018	3791,64	8,240554
Kab. Tapanuli Utara	2019	3791,64	8,240554
Kab. Toba Samosir	2017	2328,89	7,753147
Kab. Toba Samosir	2018	2328,89	7,753147
Kab. Toba Samosir	2019	2328,89	7,753147
Kota Binjai	2017	59,19	4,080753
Kota Binjai	2018	59,19	4,080753
Kota Binjai	2019	59,19	4,080753
Kota Gunungsitoli	2017	280,78	5,637571
Kota Gunungsitoli	2018	280,78	5,637571
Kota Gunungsitoli	2019	280,78	5,637571
Kota Medan	2017	265,00	5,57973
Kota Medan	2018	265,00	5,57973

Kota Medan	2019	265,00	5,57973
Kota Padangsidempuan	2017	114,66	4,741971
Kota Padangsidempuan	2018	114,66	4,741971
Kota Padangsidempuan	2019	114,66	4,741971
Kota Pematangsiantar	2017	55,66	4,019262
Kota Pematangsiantar	2018	55,66	4,019262
Kota Pematangsiantar	2019	55,66	4,019262
Kota Sibolga	2017	41,31	3,721105
Kota Sibolga	2018	41,31	3,721105
Kota Sibolga	2019	41,31	3,721105
Kota Tanjung Balai	2017	107,83	4,680556
Kota Tanjung Balai	2018	107,83	4,680556
Kota Tanjung Balai	2019	107,83	4,680556
Kota Tebing Tinggi	2017	31,00	3,433987
Kota Tebing Tinggi	2018	31,00	3,433987
Kota Tebing Tinggi	2019	31,00	3,433987
Kab. Agam	2017	1804,30	7,497928
Kab. Agam	2018	1804,30	7,497928
Kab. Agam	2019	1804,30	7,497928
Kab. Dharmasraya	2017	2961,13	7,993326
Kab. Dharmasraya	2018	2961,13	7,993326
Kab. Dharmasraya	2019	2961,13	7,993326
Kab. Kepulauan Mentawai	2017	6011,35	8,701405
Kab. Kepulauan Mentawai	2018	6011,35	8,701405
Kab. Kepulauan Mentawai	2019	6011,35	8,701405
Kab. Limapuluh Kota	2017	3571,14	8,18064
Kab. Limapuluh Kota	2018	3571,14	8,18064
Kab. Limapuluh Kota	2019	3571,14	8,18064
Kab. Padang Pariaman	2017	1332,51	7,19482
Kab. Padang Pariaman	2018	1332,51	7,19482
Kab. Padang Pariaman	2019	1332,51	7,19482
Kab. Pasaman	2017	3947,63	8,280871
Kab. Pasaman	2018	3947,63	8,280871
Kab. Pasaman	2019	3947,63	8,280871
Kab. Pasaman Barat	2017	3887,77	8,265591
Kab. Pasaman Barat	2018	3887,77	8,265591
Kab. Pasaman Barat	2019	3887,77	8,265591
Kab. Pesisir Selatan	2017	5749,89	8,656936
Kab. Pesisir Selatan	2018	5749,89	8,656936

Kab. Pesisir Selatan	2019	5749,89	8,656936
Kab. Sijunjung	2017	3130,40	8,048916
Kab. Sijunjung	2018	3130,40	8,048916
Kab. Sijunjung	2019	3130,40	8,048916
Kab. Solok	2017	3738,00	8,226306
Kab. Solok	2018	3738,00	8,226306
Kab. Solok	2019	3738,00	8,226306
Kab. Solok Selatan	2017	3346,20	8,115581
Kab. Solok Selatan	2018	3346,20	8,115581
Kab. Solok Selatan	2019	3346,20	8,115581
Kab. Tanah Datar	2017	1336,10	7,19751
Kab. Tanah Datar	2018	1336,10	7,19751
Kab. Tanah Datar	2019	1336,10	7,19751
Kota Bukit Tinggi	2017	25,24	3,22843
Kota Bukit Tinggi	2018	25,24	3,22843
Kota Bukit Tinggi	2019	25,24	3,22843
Kota Padang	2017	693,66	6,541982
Kota Padang	2018	693,66	6,541982
Kota Padang	2019	693,66	6,541982
Kota Padang Panjang	2017	23,00	3,135494
Kota Padang Panjang	2018	23,00	3,135494
Kota Padang Panjang	2019	23,00	3,135494
Kota Pariaman	2017	66,13	4,191623
Kota Pariaman	2018	66,13	4,191623
Kota Pariaman	2019	66,13	4,191623
Kota Payakumbuh	2017	85,22	4,445236
Kota Payakumbuh	2018	85,22	4,445236
Kota Payakumbuh	2019	85,22	4,445236
Kota Sawahlunto	2017	231,93	5,446436
Kota Sawahlunto	2018	231,93	5,446436
Kota Sawahlunto	2019	231,93	5,446436
Kota Solok	2017	71,29	4,266756
Kota Solok	2018	71,29	4,266756
Kota Solok	2019	71,29	4,266756
Kab. Bengkalis	2017	6975,41	8,850146
Kab. Bengkalis	2018	6975,41	8,850146
Kab. Bengkalis	2019	6975,41	8,850146
Kab. Indragiri Hilir	2017	12614,78	9,442624
Kab. Indragiri Hilir	2018	12614,78	9,442624

Kab. Indragiri Hilir	2019	12614,78	9,442624
Kab. Indragiri Hulu	2017	7723,80	8,952062
Kab. Indragiri Hulu	2018	7723,80	8,952062
Kab. Indragiri Hulu	2019	7723,80	8,952062
Kab. Kampar	2017	10983,47	9,304147
Kab. Kampar	2018	10983,47	9,304147
Kab. Kampar	2019	10983,47	9,304147
Kab. Kepulauan Meranti	2017	3707,84	8,218205
Kab. Kepulauan Meranti	2018	3707,84	8,218205
Kab. Kepulauan Meranti	2019	3707,84	8,218205
Kab. Kuantan Singingi	2017	5259,36	8,567765
Kab. Kuantan Singingi	2018	5259,36	8,567765
Kab. Kuantan Singingi	2019	5259,36	8,567765
Kab. Pelalawan	2017	12758,45	9,453949
Kab. Pelalawan	2018	12758,45	9,453949
Kab. Pelalawan	2019	12758,45	9,453949
Kab. Rokan Hilir	2017	8881,59	9,091736
Kab. Rokan Hilir	2018	8881,59	9,091736
Kab. Rokan Hilir	2019	8881,59	9,091736
Kab. Rokan Hulu	2017	7588,13	8,93434
Kab. Rokan Hulu	2018	7588,13	8,93434
Kab. Rokan Hulu	2019	7588,13	8,93434
Kab. Siak	2017	8275,18	9,021016
Kab. Siak	2018	8275,18	9,021016
Kab. Siak	2019	8275,18	9,021016
Kota Dumai	2017	1623,38	7,392266
Kota Dumai	2018	1623,38	7,392266
Kota Dumai	2019	1623,38	7,392266
Kota Pekanbaru	2017	632,27	6,449317
Kota Pekanbaru	2018	632,27	6,449317
Kota Pekanbaru	2019	632,27	6,449317
Kab. Batanghari	2017	5804,00	8,666303
Kab. Batanghari	2018	5804,00	8,666303
Kab. Batanghari	2019	5804,00	8,666303
Kab. Bungo	2017	4659,00	8,446556
Kab. Bungo	2018	4659,00	8,446556
Kab. Bungo	2019	4659,00	8,446556
Kab. Kerinci	2017	3355,27	8,118288
Kab. Kerinci	2018	3355,27	8,118288

Kab. Kerinci	2019	3355,27	8,118288
Kab. Merangin	2017	7679,00	8,946245
Kab. Merangin	2018	7679,00	8,946245
Kab. Merangin	2019	7679,00	8,946245
Kab. Muaro Jambi	2017	5326,00	8,580356
Kab. Muaro Jambi	2018	5326,00	8,580356
Kab. Muaro Jambi	2019	5326,00	8,580356
Kab. Sarolangun	2017	6184,00	8,729721
Kab. Sarolangun	2018	6184,00	8,729721
Kab. Sarolangun	2019	6184,00	8,729721
Kab. Tanjung Jabung Barat	2017	4649,85	8,44459
Kab. Tanjung Jabung Barat	2018	4649,85	8,44459
Kab. Tanjung Jabung Barat	2019	4649,85	8,44459
Kab. Tanjung Jabung Timur	2017	5445,00	8,602453
Kab. Tanjung Jabung Timur	2018	5445,00	8,602453
Kab. Tanjung Jabung Timur	2019	5445,00	8,602453
Kab. Tebo	2017	6461,00	8,773539
Kab. Tebo	2018	6461,00	8,773539
Kab. Tebo	2019	6461,00	8,773539
Kota Jambi	2017	103,54	4,639958
Kota Jambi	2018	103,54	4,639958
Kota Jambi	2019	103,54	4,639958
Kota Sungai Penuh	2017	391,50	5,969986
Kota Sungai Penuh	2018	391,50	5,969986
Kota Sungai Penuh	2019	391,50	5,969986
Kab. Banyuasin	2017	11832,99	9,378647
Kab. Banyuasin	2018	11832,99	9,378647
Kab. Banyuasin	2019	11832,99	9,378647
Kab. Empat Lawang	2017	2256,44	7,721544
Kab. Empat Lawang	2018	2256,44	7,721544
Kab. Empat Lawang	2019	2256,44	7,721544
Kab. Lahat	2017	5311,74	8,577675
Kab. Lahat	2018	5311,74	8,577675
Kab. Lahat	2019	5311,74	8,577675
Kab. Muara Enim	2017	7383,90	8,907057
Kab. Muara Enim	2018	7383,90	8,907057
Kab. Muara Enim	2019	7383,90	8,907057
Kab. Musi Banyuasin	2017	14266,26	9,565653
Kab. Musi Banyuasin	2018	14266,26	9,565653

Kab. Musi Banyuasin	2019	14266,26	9,565653
Kab. Musi Rawas	2017	6350,10	8,756226
Kab. Musi Rawas	2018	6350,10	8,756226
Kab. Musi Rawas	2019	6350,10	8,756226
Kab. Musi Rawas Utara	2017	6008,55	8,700939
Kab. Musi Rawas Utara	2018	6008,55	8,700939
Kab. Musi Rawas Utara	2019	6008,55	8,700939
Kab. Ogan Ilir	2017	2666,09	7,888368
Kab. Ogan Ilir	2018	2666,09	7,888368
Kab. Ogan Ilir	2019	2666,09	7,888368
Kab. Ogan Komering Ilir	2017	18359,04	9,817877
Kab. Ogan Komering Ilir	2018	18359,04	9,817877
Kab. Ogan Komering Ilir	2019	18359,04	9,817877
Kab. Ogan Komering Ulu	2017	4797,06	8,475759
Kab. Ogan Komering Ulu	2018	4797,06	8,475759
Kab. Ogan Komering Ulu	2019	4797,06	8,475759
Kab. OKU Selatan	2017	5493,94	8,611401
Kab. OKU Selatan	2018	5493,94	8,611401
Kab. OKU Selatan	2019	5493,94	8,611401
Kab. OKU Timur	2017	3370,00	8,122668
Kab. OKU Timur	2018	3370,00	8,122668
Kab. OKU Timur	2019	3370,00	8,122668
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2017	1840,00	7,517521
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2018	1840,00	7,517521
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2019	1840,00	7,517521
Kota Lubuk Linggau	2017	401,50	5,995208
Kota Lubuk Linggau	2018	401,50	5,995208
Kota Lubuk Linggau	2019	401,50	5,995208
Kota Pagar Alam	2017	633,66	6,451513
Kota Pagar Alam	2018	633,66	6,451513
Kota Pagar Alam	2019	633,66	6,451513
Kota Palembang	2017	369,22	5,911393
Kota Palembang	2018	369,22	5,911393
Kota Palembang	2019	369,22	5,911393
Kota Prabumulih	2017	251,94	5,529191
Kota Prabumulih	2018	251,94	5,529191
Kota Prabumulih	2019	251,94	5,529191

Kab. Bengkulu Selatan	2017	1186,10	7,078426
Kab. Bengkulu Selatan	2018	1186,10	7,078426
Kab. Bengkulu Selatan	2019	1186,10	7,078426
Kab. Bengkulu Tengah	2017	1223,94	7,10983
Kab. Bengkulu Tengah	2018	1223,94	7,10983
Kab. Bengkulu Tengah	2019	1223,94	7,10983
Kab. Bengkulu Utara	2017	4324,60	8,372075
Kab. Bengkulu Utara	2018	4324,60	8,372075
Kab. Bengkulu Utara	2019	4324,60	8,372075
Kab. Kaur	2017	2369,05	7,770244
Kab. Kaur	2018	2369,05	7,770244
Kab. Kaur	2019	2369,05	7,770244
Kab. Kepahiang	2017	665,00	6,499787
Kab. Kepahiang	2018	665,00	6,499787
Kab. Kepahiang	2019	665,00	6,499787
Kab. Lebong	2017	1921,82	7,561028
Kab. Lebong	2018	1921,82	7,561028
Kab. Lebong	2019	1921,82	7,561028
Kab. Mukomuko	2017	4036,70	8,303183
Kab. Mukomuko	2018	4036,70	8,303183
Kab. Mukomuko	2019	4036,70	8,303183
Kab. Rejang Lebong	2017	1639,98	7,402439
Kab. Rejang Lebong	2018	1639,98	7,402439
Kab. Rejang Lebong	2019	1639,98	7,402439
Kab. Seluma	2017	2400,44	7,783407
Kab. Seluma	2018	2400,44	7,783407
Kab. Seluma	2019	2400,44	7,783407
Kota Bengkulu	2017	151,70	5,021905
Kota Bengkulu	2018	151,70	5,021905
Kota Bengkulu	2019	151,70	5,021905
Kab. Lampung Barat	2017	2142,78	7,669859
Kab. Lampung Barat	2018	2142,78	7,669859
Kab. Lampung Barat	2019	2142,78	7,669859
Kab. Lampung Selatan	2017	700,32	6,551537
Kab. Lampung Selatan	2018	700,32	6,551537
Kab. Lampung Selatan	2019	700,32	6,551537
Kab. Lampung Tengah	2017	3802,68	8,243461
Kab. Lampung Tengah	2018	3802,68	8,243461
Kab. Lampung Tengah	2019	3802,68	8,243461

Kab. Lampung Timur	2017	5325,03	8,580174
Kab. Lampung Timur	2018	5325,03	8,580174
Kab. Lampung Timur	2019	5325,03	8,580174
Kab. Lampung Utara	2017	2725,87	7,910543
Kab. Lampung Utara	2018	2725,87	7,910543
Kab. Lampung Utara	2019	2725,87	7,910543
Kab. Mesuji	2017	2184,00	7,688913
Kab. Mesuji	2018	2184,00	7,688913
Kab. Mesuji	2019	2184,00	7,688913
Kab. Pesawaran	2017	2243,51	7,715797
Kab. Pesawaran	2018	2243,51	7,715797
Kab. Pesawaran	2019	2243,51	7,715797
Kab. Pesisir Barat	2017	2907,23	7,974956
Kab. Pesisir Barat	2018	2907,23	7,974956
Kab. Pesisir Barat	2019	2907,23	7,974956
Kab. Pringsewu	2017	625,00	6,437752
Kab. Pringsewu	2018	625,00	6,437752
Kab. Pringsewu	2019	625,00	6,437752
Kab. Tanggamus	2017	3020,64	8,013224
Kab. Tanggamus	2018	3020,64	8,013224
Kab. Tanggamus	2019	3020,64	8,013224
Kab. Tulang Bawang	2017	3466,32	8,150849
Kab. Tulang Bawang	2018	3466,32	8,150849
Kab. Tulang Bawang	2019	3466,32	8,150849
Kab. Tulang Bawang Barat	2017	1201,00	7,09091
Kab. Tulang Bawang Barat	2018	1201,00	7,09091
Kab. Tulang Bawang Barat	2019	1201,00	7,09091
Kab. Way Kanan	2017	3921,63	8,274263
Kab. Way Kanan	2018	3921,63	8,274263
Kab. Way Kanan	2019	3921,63	8,274263
Kota Bandar Lampung	2017	296,00	5,690359
Kota Bandar Lampung	2018	296,00	5,690359
Kota Bandar Lampung	2019	296,00	5,690359
Kota Metro	2017	61,79	4,123742
Kota Metro	2018	61,79	4,123742
Kota Metro	2019	61,79	4,123742
Kab. Bangka	2017	2950,68	7,989791
Kab. Bangka	2018	2950,68	7,989791
Kab. Bangka	2019	2950,68	7,989791

Kab. Bangka Barat	2017	2820,61	7,944708
Kab. Bangka Barat	2018	2820,61	7,944708
Kab. Bangka Barat	2019	2820,61	7,944708
Kab. Bangka Selatan	2017	3607,08	8,190654
Kab. Bangka Selatan	2018	3607,08	8,190654
Kab. Bangka Selatan	2019	3607,08	8,190654
Kab. Bangka Tengah	2017	2155,77	7,675903
Kab. Bangka Tengah	2018	2155,77	7,675903
Kab. Bangka Tengah	2019	2155,77	7,675903
Kab. Belitung	2017	2293,61	7,737882
Kab. Belitung	2018	2293,61	7,737882
Kab. Belitung	2019	2293,61	7,737882
Kab. Belitung Timur	2017	2506,91	7,826806
Kab. Belitung Timur	2018	2506,91	7,826806
Kab. Belitung Timur	2019	2506,91	7,826806
Kota Pangkal Pinang	2017	89,40	4,493121
Kota Pangkal Pinang	2018	89,40	4,493121
Kota Pangkal Pinang	2019	89,40	4,493121
Kab. Bintan	2017	1318,21	7,18403
Kab. Bintan	2018	1318,21	7,18403
Kab. Bintan	2019	1318,21	7,18403
Kab. Karimun	2017	912,75	6,816462
Kab. Karimun	2018	912,75	6,816462
Kab. Karimun	2019	912,75	6,816462
Kab. Kepulauan Anambas	2017	590,14	6,38036
Kab. Kepulauan Anambas	2018	590,14	6,38036
Kab. Kepulauan Anambas	2019	590,14	6,38036
Kab. Lingga	2017	2266,77	7,726111
Kab. Lingga	2018	2266,77	7,726111
Kab. Lingga	2019	2266,77	7,726111
Kab. Natuna	2017	2009,04	7,605412
Kab. Natuna	2018	2009,04	7,605412
Kab. Natuna	2019	2009,04	7,605412
Kota Batam	2017	960,25	6,867194
Kota Batam	2018	960,25	6,867194
Kota Batam	2019	960,25	6,867194
Kota Tanjung Pinang	2017	144,56	4,973695
Kota Tanjung Pinang	2018	144,56	4,973695
Kota Tanjung Pinang	2019	144,56	4,973695

LAMPIRAN 5: Rekap Data Belanja Modal

Nama kabupaten dan kota	Tahun	Belanja Modal	Ln Belanja Modal
Kab. Aceh Barat	2017	Rp 313.210.843.762,00	26,47014
Kab. Aceh Barat	2018	Rp 192.424.908.404,00	25,98297
Kab. Aceh Barat	2019	Rp 263.508.924.061,00	26,29735
Kab. Aceh Barat Daya	2017	Rp 235.332.275.223,58	26,18426
Kab. Aceh Barat Daya	2018	Rp 172.541.445.155,00	25,8739
Kab. Aceh Barat Daya	2019	Rp 270.575.998.759,00	26,32382
Kab. Aceh Besar	2017	Rp 284.528.814.314,50	26,3741
Kab. Aceh Besar	2018	Rp 256.173.868.995,79	26,26912
Kab. Aceh Besar	2019	Rp 285.173.934.327,00	26,37637
Kab. Aceh Jaya	2017	Rp 278.769.053.653,50	26,35365
Kab. Aceh Jaya	2018	Rp 127.300.475.591,60	25,56982
Kab. Aceh Jaya	2019	Rp 159.307.117.025,05	25,7941
Kab. Aceh Selatan	2017	Rp 389.951.814.488,00	26,68929
Kab. Aceh Selatan	2018	Rp 229.929.481.062,00	26,16104
Kab. Aceh Selatan	2019	Rp 265.839.014.498,01	26,30616
Kab. Aceh Singkil	2017	Rp 194.341.402.778,00	25,99288
Kab. Aceh Singkil	2018	Rp 103.786.508.547,37	25,3656
Kab. Aceh Singkil	2019	Rp 181.738.205.043,00	25,92583
Kab. Aceh Tamiang	2017	Rp 292.204.311.693,00	26,40072
Kab. Aceh Tamiang	2018	Rp 177.269.500.709,00	25,90094
Kab. Aceh Tamiang	2019	Rp 242.626.987.790,75	26,21479
Kab. Aceh Tengah	2017	Rp 411.264.451.094,00	26,7425
Kab. Aceh Tengah	2018	Rp 180.831.285.122,00	25,92083
Kab. Aceh Tengah	2019	Rp 278.734.275.752,00	26,35352
Kab. Aceh Tenggara	2017	Rp 364.232.905.006,00	26,62106
Kab. Aceh Tenggara	2018	Rp 147.848.275.220,00	25,71945
Kab. Aceh Tenggara	2019	Rp 229.640.623.656,97	26,15978
Kab. Aceh Timur	2017	Rp 412.595.321.227,51	26,74573
Kab. Aceh Timur	2018	Rp 140.278.407.457,61	25,66689
Kab. Aceh Timur	2019	Rp 390.860.852.229,32	26,69162
Kab. Aceh Utara	2017	Rp 374.745.385.004,14	26,64951
Kab. Aceh Utara	2018	Rp 223.274.922.405,56	26,13167
Kab. Aceh Utara	2019	Rp 420.688.048.415,98	26,76516
Kab. Bener Meriah	2017	Rp 245.579.059.469,50	26,22688
Kab. Bener Meriah	2018	Rp 164.511.557.740,00	25,82625
Kab. Bener Meriah	2019	Rp 189.876.743.313,26	25,96964

Kab. Bireun	2017	Rp	410.280.091.319,50	26,74011
Kab. Bireun	2018	Rp	160.789.859.916,00	25,80336
Kab. Bireun	2019	Rp	295.399.475.653,00	26,41159
Kab. Gayo Lues	2017	Rp	241.994.974.893,00	26,21218
Kab. Gayo Lues	2018	Rp	182.929.286.128,00	25,93237
Kab. Gayo Lues	2019	Rp	189.666.012.327,68	25,96853
Kab. Nagan Raya	2017	Rp	336.680.572.689,00	26,5424
Kab. Nagan Raya	2018	Rp	186.621.969.989,00	25,95235
Kab. Nagan Raya	2019	Rp	293.442.563.407,05	26,40495
Kab. Pidie	2017	Rp	307.261.418.844,67	26,45096
Kab. Pidie	2018	Rp	271.087.485.994,00	26,32571
Kab. Pidie	2019	Rp	304.246.473.051,15	26,4411
Kab. Pidie Jaya	2017	Rp	234.170.955.195,00	26,17932
Kab. Pidie Jaya	2018	Rp	178.921.414.604,00	25,91021
Kab. Pidie Jaya	2019	Rp	205.016.682.808,10	26,04636
Kab. Simeulue	2017	Rp	243.806.652.872,00	26,21964
Kab. Simeulue	2018	Rp	137.450.686.403,01	25,64653
Kab. Simeulue	2019	Rp	202.986.400.858,74	26,0364
Kota Banda Aceh	2017	Rp	227.594.104.789,00	26,15083
Kota Banda Aceh	2018	Rp	100.757.750.369,00	25,33598
Kota Banda Aceh	2019	Rp	148.964.382.238,55	25,72697
Kota Langsa	2017	Rp	333.296.714.479,35	26,5323
Kota Langsa	2018	Rp	115.478.103.942,00	25,47235
Kota Langsa	2019	Rp	198.592.250.990,61	26,01452
Kota Lhokseumawe	2017	Rp	223.594.518.755,00	26,1331
Kota Lhokseumawe	2018	Rp	143.082.398.156,00	25,68669
Kota Lhokseumawe	2019	Rp	203.875.275.990,00	26,04077
Kota Sabang	2017	Rp	129.331.095.257,93	25,58564
Kota Sabang	2018	Rp	113.657.122.720,43	25,45645
Kota Sabang	2019	Rp	178.521.527.380,25	25,90798
Kota Subulussalam	2017	Rp	267.086.647.323,00	26,31084
Kota Subulussalam	2018	Rp	110.046.462.273,00	25,42417
Kota Subulussalam	2019	Rp	182.336.942.860,02	25,92912
Kab. Asahan	2017	Rp	350.146.028.219,80	26,58162
Kab. Asahan	2018	Rp	230.200.116.402,29	26,16221
Kab. Asahan	2019	Rp	304.478.575.304,52	26,44187
Kab. Batubara	2017	Rp	164.420.002.646,00	25,82569
Kab. Batubara	2018	Rp	139.977.493.680,00	25,66475
Kab. Batubara	2019	Rp	222.600.369.777,00	26,12864

Kab. Dairi	2017	Rp	260.705.968.964,00	26,28666
Kab. Dairi	2018	Rp	260.705.968.964,00	26,28666
Kab. Dairi	2019	Rp	197.567.865.963,00	26,00935
Kab. Deli Serdang	2017	Rp	741.456.897.032,63	27,33188
Kab. Deli Serdang	2018	Rp	670.584.193.040,91	27,23142
Kab. Deli Serdang	2019	Rp	703.280.070.640,29	27,27902
Kab. Humbang Hasundutan	2017	Rp	224.702.953.707,00	26,13805
Kab. Humbang Hasundutan	2018	Rp	168.860.963.829,00	25,85234
Kab. Humbang Hasundutan	2019	Rp	177.278.522.408,31	25,90099
Kab. Karo	2017	Rp	335.935.240.977,00	26,54018
Kab. Karo	2018	Rp	222.116.791.413,00	26,12647
Kab. Karo	2019	Rp	196.427.858.443,54	26,00356
Kab. Labuhanbatu	2017	Rp	277.921.020.653,00	26,3506
Kab. Labuhanbatu	2018	Rp	139.178.414.287,00	25,65902
Kab. Labuhanbatu	2019	Rp	238.729.009.917,30	26,19859
Kab. Labuhanbatu Selatan	2017	Rp	273.152.742.667,85	26,3333
Kab. Labuhanbatu Selatan	2018	Rp	219.379.315.619,00	26,11407
Kab. Labuhanbatu Selatan	2019	Rp	220.503.868.788,16	26,11918
Kab. Labuhanbatu Utara	2017	Rp	204.563.138.008,00	26,04414
Kab. Labuhanbatu Utara	2018	Rp	223.037.632.087,73	26,13061
Kab. Labuhanbatu Utara	2019	Rp	258.116.878.081,37	26,27668
Kab. Langkat	2017	Rp	492.637.835.308,16	26,92304
Kab. Langkat	2018	Rp	380.576.043.929,00	26,66495
Kab. Langkat	2019	Rp	346.035.976.277,09	26,56981
Kab. Mandailing Natal	2017	Rp	251.821.891.758,00	26,25199
Kab. Mandailing Natal	2018	Rp	199.849.014.896,85	26,02083
Kab. Mandailing Natal	2019	Rp	206.392.843.127,87	26,05305
Kab. Nias	2017	Rp	239.523.860.631,00	26,20192
Kab. Nias	2018	Rp	207.016.876.762,79	26,05607
Kab. Nias	2019	Rp	190.454.026.585,49	25,97268
Kab. Nias Barat	2017	Rp	199.747.992.745,80	26,02032
Kab. Nias Barat	2018	Rp	247.896.475.505,00	26,23628
Kab. Nias Barat	2019	Rp	180.915.741.154,38	25,9213
Kab. Nias Selatan	2017	Rp	187.946.733.162,50	25,95942
Kab. Nias Selatan	2018	Rp	221.305.834.645,40	26,12281
Kab. Nias Selatan	2019	Rp	238.978.343.319,41	26,19964
Kab. Nias Utara	2017	Rp	251.675.869.175,00	26,25141
Kab. Nias Utara	2018	Rp	192.092.726.869,00	25,98124
Kab. Nias Utara	2019	Rp	258.215.519.657,00	26,27706

Kab. Padang Lawas	2017	Rp	221.963.650.130,00	26,12578
Kab. Padang Lawas	2018	Rp	204.458.003.516,00	26,04363
Kab. Padang Lawas	2019	Rp	241.420.449.752,03	26,20981
Kab. Padang Lawas Utara	2017	Rp	312.571.172.200,00	26,4681
Kab. Padang Lawas Utara	2018	Rp	196.036.175.259,00	26,00157
Kab. Padang Lawas Utara	2019	Rp	247.484.629.027,00	26,23461
Kab. Pakpak Bharat	2017	Rp	138.363.427.366,76	25,65315
Kab. Pakpak Bharat	2018	Rp	118.336.626.935,31	25,4968
Kab. Pakpak Bharat	2019	Rp	145.937.021.774,00	25,70644
Kab. Samosir	2017	Rp	224.240.859.126,61	26,13599
Kab. Samosir	2018	Rp	186.281.849.902,00	25,95053
Kab. Samosir	2019	Rp	164.093.834.379,00	25,8237
Kab. Serdang Bedagai	2017	Rp	238.604.911.311,00	26,19807
Kab. Serdang Bedagai	2018	Rp	349.104.338.217,00	26,57864
Kab. Serdang Bedagai	2019	Rp	313.357.351.130,91	26,47061
Kab. Simalungun	2017	Rp	293.713.450.618,00	26,40587
Kab. Simalungun	2018	Rp	405.283.313.970,00	26,72785
Kab. Simalungun	2019	Rp	381.344.591.277,00	26,66697
Kab. Tapanuli Selatan	2017	Rp	277.231.852.741,00	26,34812
Kab. Tapanuli Selatan	2018	Rp	363.140.233.295,10	26,61805
Kab. Tapanuli Selatan	2019	Rp	420.660.057.834,89	26,76509
Kab. Tapanuli Tengah	2017	Rp	167.521.314.403,09	25,84438
Kab. Tapanuli Tengah	2018	Rp	220.747.371.092,42	26,12028
Kab. Tapanuli Tengah	2019	Rp	219.450.399.719,63	26,11439
Kab. Tapanuli Utara	2017	Rp	155.844.953.910,11	25,77213
Kab. Tapanuli Utara	2018	Rp	181.662.031.463,90	25,92541
Kab. Tapanuli Utara	2019	Rp	194.947.102.074,73	25,99599
Kab. Toba Samosir	2017	Rp	199.230.031.160,25	26,01773
Kab. Toba Samosir	2018	Rp	152.970.216.966,00	25,75351
Kab. Toba Samosir	2019	Rp	135.339.350.834,00	25,63105
Kota Binjai	2017	Rp	154.059.962.293,96	25,76061
Kota Binjai	2018	Rp	214.254.227.112,98	26,09043
Kota Binjai	2019	Rp	127.213.320.411,42	25,56913
Kota Gunungsitoli	2017	Rp	249.617.598.852,50	26,2432
Kota Gunungsitoli	2018	Rp	183.521.284.315,40	25,9356
Kota Gunungsitoli	2019	Rp	156.757.286.042,00	25,77796
Kota Medan	2017	Rp	997.475.991.902,00	27,62849
Kota Medan	2018	Rp	753.996.886.210,07	27,34865
Kota Medan	2019	Rp	992.661.245.694,74	27,62366

Kota Padangsidimpuan	2017	Rp	184.093.967.563,00	25,93871
Kota Padangsidimpuan	2018	Rp	113.072.061.373,90	25,45129
Kota Padangsidimpuan	2019	Rp	137.812.393.423,59	25,64916
Kota Pematangsiantar	2017	Rp	262.835.986.784,00	26,2948
Kota Pematangsiantar	2018	Rp	287.958.994.695,02	26,38608
Kota Pematangsiantar	2019	Rp	204.959.071.624,44	26,04608
Kota Sibolga	2017	Rp	124.824.374.936,52	25,55017
Kota Sibolga	2018	Rp	142.467.823.362,00	25,68238
Kota Sibolga	2019	Rp	81.569.259.159,00	25,12472
Kota Tanjung Balai	2017	Rp	124.950.579.564,00	25,55118
Kota Tanjung Balai	2018	Rp	120.913.101.870,00	25,51834
Kota Tanjung Balai	2019	Rp	96.299.502.045,52	25,29073
Kota Tebing Tinggi	2017	Rp	184.156.162.478,00	25,93905
Kota Tebing Tinggi	2018	Rp	203.340.069.232,71	26,03815
Kota Tebing Tinggi	2019	Rp	153.577.322.071,69	25,75747
Kab. Agam	2017	Rp	270.015.746.556,00	26,32175
Kab. Agam	2018	Rp	212.319.559.024,40	26,08136
Kab. Agam	2019	Rp	280.827.672.997,34	26,36101
Kab. Dharmasraya	2017	Rp	270.152.051.057,00	26,32225
Kab. Dharmasraya	2018	Rp	216.736.942.017,14	26,10195
Kab. Dharmasraya	2019	Rp	226.598.089.916,65	26,14644
Kab. Kepulauan Mentawai	2017	Rp	313.680.549.806,00	26,47164
Kab. Kepulauan Mentawai	2018	Rp	222.209.809.952,23	26,12689
Kab. Kepulauan Mentawai	2019	Rp	297.673.042.276,97	26,41926
Kab. Limapuluh Kota	2017	Rp	233.117.426.709,00	26,17481
Kab. Limapuluh Kota	2018	Rp	232.636.603.714,00	26,17274
Kab. Limapuluh Kota	2019	Rp	252.910.521.752,00	26,2563
Kab. Padang Pariaman	2017	Rp	367.120.206.951,00	26,62896
Kab. Padang Pariaman	2018	Rp	262.953.914.380,00	26,29524
Kab. Padang Pariaman	2019	Rp	263.182.047.537,00	26,29611
Kab. Pasaman	2017	Rp	184.936.891.009,00	25,94328
Kab. Pasaman	2018	Rp	140.813.280.729,00	25,6707
Kab. Pasaman	2019	Rp	125.911.245.748,00	25,55884
Kab. Pasaman Barat	2017	Rp	263.065.434.073,00	26,29567
Kab. Pasaman Barat	2018	Rp	327.268.292.281,70	26,51405
Kab. Pasaman Barat	2019	Rp	261.167.537.747,55	26,28843
Kab. Pesisir Selatan	2017	Rp	256.914.361.733,00	26,27201
Kab. Pesisir Selatan	2018	Rp	257.286.726.595,00	26,27346
Kab. Pesisir Selatan	2019	Rp	324.875.576.584,00	26,50671

Kab. Sijunjung	2017	Rp	189.756.100.095,00	25,96901
Kab. Sijunjung	2018	Rp	205.818.505.036,00	26,05026
Kab. Sijunjung	2019	Rp	204.210.889.586,00	26,04242
Kab. Solok	2017	Rp	204.616.665.888,00	26,04444
Kab. Solok	2018	Rp	167.162.730.043,65	25,84223
Kab. Solok	2019	Rp	194.815.396.237,56	25,99532
Kab. Solok Selatan	2017	Rp	223.535.583.229,00	26,13284
Kab. Solok Selatan	2018	Rp	196.414.321.045,00	26,00349
Kab. Solok Selatan	2019	Rp	210.375.471.214,00	26,07216
Kab. Tanah Datar	2017	Rp	197.916.990.531,23	26,01111
Kab. Tanah Datar	2018	Rp	165.134.741.678,80	25,83003
Kab. Tanah Datar	2019	Rp	202.885.384.184,50	26,03591
Kota Bukit Tinggi	2017	Rp	115.736.552.854,00	25,47458
Kota Bukit Tinggi	2018	Rp	178.010.817.194,00	25,90511
Kota Bukit Tinggi	2019	Rp	187.986.455.096,79	25,95964
Kota Padang	2017	Rp	397.843.408.958,00	26,70932
Kota Padang	2018	Rp	419.839.593.968,00	26,76314
Kota Padang	2019	Rp	491.009.055.949,84	26,91973
Kota Padang Panjang	2017	Rp	211.509.246.179,23	26,07753
Kota Padang Panjang	2018	Rp	125.026.313.035,21	25,55179
Kota Padang Panjang	2019	Rp	98.188.781.547,97	25,31016
Kota Pariaman	2017	Rp	153.293.150.203,72	25,75562
Kota Pariaman	2018	Rp	132.430.598.581,11	25,60932
Kota Pariaman	2019	Rp	156.394.642.681,03	25,77565
Kota Payakumbuh	2017	Rp	176.632.639.124,00	25,89734
Kota Payakumbuh	2018	Rp	164.577.121.565,00	25,82665
Kota Payakumbuh	2019	Rp	182.218.048.171,00	25,92847
Kota Sawahlunto	2017	Rp	123.743.149.829,33	25,54147
Kota Sawahlunto	2018	Rp	77.527.748.798,00	25,0739
Kota Sawahlunto	2019	Rp	94.384.258.018,50	25,27064
Kota Solok	2017	Rp	140.483.121.184,34	25,66835
Kota Solok	2018	Rp	159.588.101.391,00	25,79586
Kota Solok	2019	Rp	115.013.289.927,69	25,46831
Kab. Bengkulu	2017	Rp	982.284.446.696,00	27,61315
Kab. Bengkulu	2018	Rp	903.407.348.786,32	27,52944
Kab. Bengkulu	2019	Rp	1.108.175.580.894,99	27,73374
Kab. Indragiri Hilir	2017	Rp	353.139.989.071,66	26,59013
Kab. Indragiri Hilir	2018	Rp	213.660.286.725,74	26,08765
Kab. Indragiri Hilir	2019	Rp	257.568.468.820,75	26,27455

Kab. Indragiri Hulu	2017	Rp	247.686.767.181,26	26,23543
Kab. Indragiri Hulu	2018	Rp	138.092.690.423,58	25,65119
Kab. Indragiri Hulu	2019	Rp	339.388.263.703,27	26,55041
Kab. Kampar	2017	Rp	352.062.836.537,00	26,58708
Kab. Kampar	2018	Rp	315.557.219.865,74	26,47761
Kab. Kampar	2019	Rp	578.995.850.174,00	27,08456
Kab. Kepulauan Meranti	2017	Rp	173.835.960.831,88	25,88138
Kab. Kepulauan Meranti	2018	Rp	169.802.769.846,94	25,8579
Kab. Kepulauan Meranti	2019	Rp	290.696.070.450,30	26,39554
Kab. Kuantan Singingi	2017	Rp	203.273.640.916,05	26,03782
Kab. Kuantan Singingi	2018	Rp	196.801.855.381,60	26,00546
Kab. Kuantan Singingi	2019	Rp	327.963.804.578,00	26,51617
Kab. Pelalawan	2017	Rp	254.665.598.182,60	26,26322
Kab. Pelalawan	2018	Rp	161.281.235.359,71	25,80642
Kab. Pelalawan	2019	Rp	255.820.334.183,06	26,26774
Kab. Rokan Hilir	2017	Rp	339.735.033.995,68	26,55143
Kab. Rokan Hilir	2018	Rp	217.557.275.315,94	26,10573
Kab. Rokan Hilir	2019	Rp	315.944.465.620,38	26,47883
Kab. Rokan Hulu	2017	Rp	330.432.257.917,00	26,52367
Kab. Rokan Hulu	2018	Rp	353.287.341.468,24	26,59055
Kab. Rokan Hulu	2019	Rp	400.078.364.592,16	26,71493
Kab. Siak	2017	Rp	216.462.854.438,87	26,10068
Kab. Siak	2018	Rp	179.484.354.899,99	25,91335
Kab. Siak	2019	Rp	371.026.006.545,65	26,63954
Kota Dumai	2017	Rp	272.620.881.157,83	26,33135
Kota Dumai	2018	Rp	174.224.234.182,00	25,88361
Kota Dumai	2019	Rp	265.822.240.193,35	26,30609
Kota Pekanbaru	2017	Rp	466.573.845.628,18	26,86868
Kota Pekanbaru	2018	Rp	531.148.865.175,09	26,99831
Kota Pekanbaru	2019	Rp	529.533.719.916,67	26,99526
Kab. Batanghari	2017	Rp	206.581.778.664,37	26,05396
Kab. Batanghari	2018	Rp	148.206.782.170,20	25,72187
Kab. Batanghari	2019	Rp	251.118.803.752,82	26,24919
Kab. Bungo	2017	Rp	156.057.609.902,00	25,77349
Kab. Bungo	2018	Rp	203.211.813.790,00	26,03751
Kab. Bungo	2019	Rp	234.629.991.486,67	26,18128
Kab. Kerinci	2017	Rp	218.905.091.227,00	26,1119
Kab. Kerinci	2018	Rp	191.868.186.331,56	25,98007
Kab. Kerinci	2019	Rp	293.806.785.964,39	26,40619

Kab. Merangin	2017	Rp	301.758.120.676,00	26,43289
Kab. Merangin	2018	Rp	207.241.385.868,00	26,05715
Kab. Merangin	2019	Rp	226.728.661.842,69	26,14702
Kab. Muaro Jambi	2017	Rp	368.236.687.926,00	26,63199
Kab. Muaro Jambi	2018	Rp	292.728.025.309,63	26,40251
Kab. Muaro Jambi	2019	Rp	322.194.053.216,00	26,49842
Kab. Sarolangun	2017	Rp	247.349.222.340,15	26,23407
Kab. Sarolangun	2018	Rp	215.169.066.764,00	26,09469
Kab. Sarolangun	2019	Rp	414.970.363.981,05	26,75147
Kab. Tanjung Jabung Barat	2017	Rp	418.013.170.912,85	26,75878
Kab. Tanjung Jabung Barat	2018	Rp	419.657.879.438,25	26,76271
Kab. Tanjung Jabung Barat	2019	Rp	697.230.245.558,73	27,27038
Kab. Tanjung Jabung Timur	2017	Rp	275.104.187.921,00	26,34042
Kab. Tanjung Jabung Timur	2018	Rp	312.956.563.764,00	26,46933
Kab. Tanjung Jabung Timur	2019	Rp	328.872.997.320,00	26,51894
Kab. Tebo	2017	Rp	233.688.059.239,33	26,17725
Kab. Tebo	2018	Rp	258.990.826.316,86	26,28006
Kab. Tebo	2019	Rp	269.093.691.375,69	26,31833
Kota Jambi	2017	Rp	419.316.595.968,50	26,76189
Kota Jambi	2018	Rp	445.809.162.048,96	26,82316
Kota Jambi	2019	Rp	432.100.003.926,32	26,79192
Kota Sungai Penuh	2017	Rp	173.331.166.027,80	25,87847
Kota Sungai Penuh	2018	Rp	194.683.207.113,80	25,99464
Kota Sungai Penuh	2019	Rp	176.535.574.208,97	25,89679
Kab. Banyuasin	2017	Rp	303.104.686.231,60	26,43734
Kab. Banyuasin	2018	Rp	266.429.179.608,94	26,30837
Kab. Banyuasin	2019	Rp	424.906.574.189,48	26,77514
Kab. Empat Lawang	2017	Rp	202.980.530.869,11	26,03638
Kab. Empat Lawang	2018	Rp	248.436.146.175,13	26,23845
Kab. Empat Lawang	2019	Rp	253.146.607.390,00	26,25723
Kab. Lahat	2017	Rp	341.994.209.461,05	26,55806
Kab. Lahat	2018	Rp	309.562.329.259,38	26,45843
Kab. Lahat	2019	Rp	396.808.861.445,88	26,70672
Kab. Muara Enim	2017	Rp	530.346.575.503,08	26,9968
Kab. Muara Enim	2018	Rp	556.628.833.664,46	27,04516
Kab. Muara Enim	2019	Rp	888.469.027.756,92	27,51277
Kab. Musi Banyuasin	2017	Rp	699.529.017.374,46	27,27367
Kab. Musi Banyuasin	2018	Rp	871.952.810.972,96	27,494
Kab. Musi Banyuasin	2019	Rp	1.102.419.234.360,91	27,72853

Kab. Musi Rawas	2017	Rp	317.467.274.462,45	26,48364
Kab. Musi Rawas	2018	Rp	361.982.548.504,84	26,61486
Kab. Musi Rawas	2019	Rp	430.926.194.698,00	26,7892
Kab. Musi Rawas Utara	2017	Rp	279.488.044.078,14	26,35623
Kab. Musi Rawas Utara	2018	Rp	323.942.165.957,00	26,50383
Kab. Musi Rawas Utara	2019	Rp	394.412.850.373,03	26,70066
Kab. Ogan Ilir	2017	Rp	345.998.047.710,00	26,5697
Kab. Ogan Ilir	2018	Rp	275.666.163.928,36	26,34246
Kab. Ogan Ilir	2019	Rp	323.235.226.236,00	26,50165
Kab. Ogan Komering Ilir	2017	Rp	473.963.601.892,00	26,8844
Kab. Ogan Komering Ilir	2018	Rp	302.186.496.005,00	26,43431
Kab. Ogan Komering Ilir	2019	Rp	626.423.290.261,00	27,16329
Kab. Ogan Komering Ulu	2017	Rp	338.867.463.782,12	26,54887
Kab. Ogan Komering Ulu	2018	Rp	328.753.610.069,21	26,51857
Kab. Ogan Komering Ulu	2019	Rp	348.992.623.346,00	26,57832
Kab. OKU Selatan	2017	Rp	292.933.440.940,00	26,40321
Kab. OKU Selatan	2018	Rp	311.605.526.135,88	26,465
Kab. OKU Selatan	2019	Rp	381.552.391.906,06	26,66751
Kab. OKU Timur	2017	Rp	291.446.226.750,29	26,39812
Kab. OKU Timur	2018	Rp	278.116.679.110,08	26,35131
Kab. OKU Timur	2019	Rp	508.497.584.654,80	26,95473
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2017	Rp	393.154.584.868,00	26,69747
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2018	Rp	622.813.258.525,60	27,15751
Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	2019	Rp	764.119.060.809,70	27,36199
Kota Lubuk Linggau	2017	Rp	237.003.593.139,46	26,19134
Kota Lubuk Linggau	2018	Rp	209.920.267.732,24	26,06999
Kota Lubuk Linggau	2019	Rp	254.283.952.721,00	26,26172
Kota Pagar Alam	2017	Rp	195.241.879.541,38	25,99751
Kota Pagar Alam	2018	Rp	92.576.062.279,00	25,2513
Kota Pagar Alam	2019	Rp	216.250.532.960,62	26,0997
Kota Palembang	2017	Rp	857.095.134.848,37	27,47681
Kota Palembang	2018	Rp	851.367.126.023,84	27,47011
Kota Palembang	2019	Rp	1.115.910.029.299,30	27,74069
Kota Prabumulih	2017	Rp	162.394.102.450,27	25,81329
Kota Prabumulih	2018	Rp	119.551.241.841,43	25,50701
Kota Prabumulih	2019	Rp	311.715.302.708,00	26,46536
Kab. Bengkulu Selatan	2017	Rp	128.090.331.284,53	25,576

Kab. Bengkulu Selatan	2018	Rp	95.543.597.570,00	25,28285
Kab. Bengkulu Selatan	2019	Rp	157.410.440.157,91	25,78212
Kab. Bengkulu Tengah	2017	Rp	132.015.699.392,92	25,60619
Kab. Bengkulu Tengah	2018	Rp	134.526.244.615,32	25,62503
Kab. Bengkulu Tengah	2019	Rp	150.447.028.082,61	25,73688
Kab. Bengkulu Utara	2017	Rp	83.916.032.630,00	25,15308
Kab. Bengkulu Utara	2018	Rp	176.492.356.710,61	25,89654
Kab. Bengkulu Utara	2019	Rp	231.872.339.504,45	26,16945
Kab. Kaur	2017	Rp	161.056.923.761,00	25,80502
Kab. Kaur	2018	Rp	91.067.708.601,34	25,23487
Kab. Kaur	2019	Rp	125.026.593.617,00	25,55179
Kab. Kepahiang	2017	Rp	148.289.579.963,20	25,72243
Kab. Kepahiang	2018	Rp	102.985.195.324,00	25,35785
Kab. Kepahiang	2019	Rp	98.486.748.260,73	25,31319
Kab. Lebong	2017	Rp	180.758.660.635,00	25,92043
Kab. Lebong	2018	Rp	141.122.921.327,25	25,6729
Kab. Lebong	2019	Rp	146.615.691.556,99	25,71108
Kab. Mukomuko	2017	Rp	294.368.052.103,38	26,4081
Kab. Mukomuko	2018	Rp	208.860.630.772,00	26,06493
Kab. Mukomuko	2019	Rp	214.624.217.028,21	26,09215
Kab. Rejang Lebong	2017	Rp	158.824.674.926,55	25,79107
Kab. Rejang Lebong	2018	Rp	170.608.442.315,00	25,86264
Kab. Rejang Lebong	2019	Rp	197.149.751.384,00	26,00723
Kab. Seluma	2017	Rp	128.734.499.848,00	25,58102
Kab. Seluma	2018	Rp	121.010.535.778,00	25,51914
Kab. Seluma	2019	Rp	171.383.319.240,00	25,86717
Kota Bengkulu	2017	Rp	319.314.281.878,72	26,48944
Kota Bengkulu	2018	Rp	168.786.330.090,00	25,8519
Kota Bengkulu	2019	Rp	232.479.490.743,31	26,17207
Kab. Lampung Barat	2017	Rp	399.975.479.972,00	26,71467
Kab. Lampung Barat	2018	Rp	193.419.766.707,00	25,98813
Kab. Lampung Barat	2019	Rp	120.762.726.596,46	25,51709
Kab. Lampung Selatan	2017	Rp	348.669.021.804,71	26,57739
Kab. Lampung Selatan	2018	Rp	290.210.246.282,46	26,39387
Kab. Lampung Selatan	2019	Rp	220.878.333.553,99	26,12088
Kab. Lampung Tengah	2017	Rp	539.655.355.206,50	27,0142
Kab. Lampung Tengah	2018	Rp	383.352.881.955,00	26,67222
Kab. Lampung Tengah	2019	Rp	374.849.892.710,47	26,64979
Kab. Lampung Timur	2017	Rp	255.811.217.544,00	26,26771

Kab. Lampung Timur	2018	Rp	230.920.819.353,80	26,16534
Kab. Lampung Timur	2019	Rp	137.579.608.309,00	25,64747
Kab. Lampung Utara	2017	Rp	454.948.982.528,90	26,84345
Kab. Lampung Utara	2018	Rp	372.907.489.489,70	26,6446
Kab. Lampung Utara	2019	Rp	347.461.051.828,15	26,57392
Kab. Mesuji	2017	Rp	327.545.967.014,00	26,51489
Kab. Mesuji	2018	Rp	331.911.625.554,00	26,52813
Kab. Mesuji	2019	Rp	196.558.843.875,05	26,00423
Kab. Pesawaran	2017	Rp	489.541.674.474,00	26,91674
Kab. Pesawaran	2018	Rp	425.199.203.338,51	26,77582
Kab. Pesawaran	2019	Rp	310.725.158.722,69	26,46217
Kab. Pesisir Barat	2017	Rp	168.470.345.705,00	25,85003
Kab. Pesisir Barat	2018	Rp	240.570.374.861,91	26,20628
Kab. Pesisir Barat	2019	Rp	215.958.059.150,26	26,09835
Kab. Pringsewu	2017	Rp	224.898.840.669,00	26,13892
Kab. Pringsewu	2018	Rp	224.461.297.229,80	26,13697
Kab. Pringsewu	2019	Rp	209.524.948.200,28	26,06811
Kab. Tanggamus	2017	Rp	248.756.394.921,93	26,23974
Kab. Tanggamus	2018	Rp	172.288.692.875,00	25,87244
Kab. Tanggamus	2019	Rp	241.692.701.030,00	26,21093
Kab. Tulang Bawang	2017	Rp	321.795.859.200,90	26,49718
Kab. Tulang Bawang	2018	Rp	285.430.669.667,64	26,37726
Kab. Tulang Bawang	2019	Rp	204.551.856.450,54	26,04409
Kab. Tulang Bawang Barat	2017	Rp	275.362.556.865,00	26,34135
Kab. Tulang Bawang Barat	2018	Rp	210.461.061.230,85	26,07257
Kab. Tulang Bawang Barat	2019	Rp	188.979.432.215,60	25,9649
Kab. Way Kanan	2017	Rp	356.898.424.719,00	26,60072
Kab. Way Kanan	2018	Rp	465.984.737.871,00	26,86742
Kab. Way Kanan	2019	Rp	297.966.565.126,00	26,42025
Kota Bandar Lampung	2017	Rp	296.453.517.914,00	26,41516
Kota Bandar Lampung	2018	Rp	381.114.574.622,00	26,66637
Kota Bandar Lampung	2019	Rp	269.914.779.195,54	26,32137
Kota Metro	2017	Rp	314.242.247.261,14	26,47343
Kota Metro	2018	Rp	229.701.445.859,06	26,16005
Kota Metro	2019	Rp	177.051.033.935,24	25,8997
Kab. Bangka	2017	Rp	217.323.362.126,11	26,10465
Kab. Bangka	2018	Rp	105.761.514.640,23	25,38445
Kab. Bangka	2019	Rp	189.666.012.344,71	25,96853
Kab. Bangka Barat	2017	Rp	133.785.470.433,38	25,6195

Kab. Bangka Barat	2018	Rp	191.736.832.391,42	25,97939
Kab. Bangka Barat	2019	Rp	158.207.344.738,92	25,78717
Kab. Bangka Selatan	2017	Rp	251.133.514.443,26	26,24925
Kab. Bangka Selatan	2018	Rp	227.828.669.835,00	26,15186
Kab. Bangka Selatan	2019	Rp	251.115.588.574,03	26,24918
Kab. Bangka Tengah	2017	Rp	174.751.750.969,20	25,88663
Kab. Bangka Tengah	2018	Rp	229.146.316.423,00	26,15763
Kab. Bangka Tengah	2019	Rp	222.521.223.058,00	26,12829
Kab. Belitung	2017	Rp	211.153.077.500,40	26,07585
Kab. Belitung	2018	Rp	206.964.619.779,86	26,05581
Kab. Belitung	2019	Rp	235.897.605.042,56	26,18666
Kab. Belitung Timur	2017	Rp	143.440.621.219,80	25,68919
Kab. Belitung Timur	2018	Rp	147.130.908.044,88	25,71459
Kab. Belitung Timur	2019	Rp	173.350.973.546,48	25,87858
Kota Pangkal Pinang	2017	Rp	107.105.745.023,27	25,39708
Kota Pangkal Pinang	2018	Rp	173.681.140.534,33	25,88049
Kota Pangkal Pinang	2019	Rp	149.642.796.105,00	25,73152
Kab. Bintan	2017	Rp	200.892.894.479,62	26,02604
Kab. Bintan	2018	Rp	206.336.691.231,73	26,05278
Kab. Bintan	2019	Rp	298.841.322.599,93	26,42318
Kab. Karimun	2017	Rp	196.100.353.722,00	26,00189
Kab. Karimun	2018	Rp	255.276.200.412,00	26,26561
Kab. Karimun	2019	Rp	207.289.544.956,00	26,05738
Kab. Kepulauan Anambas	2017	Rp	154.191.110.789,00	25,76146
Kab. Kepulauan Anambas	2018	Rp	227.140.347.224,00	26,14883
Kab. Kepulauan Anambas	2019	Rp	362.803.238.000,76	26,61713
Kab. Lingga	2017	Rp	109.462.096.698,00	25,41884
Kab. Lingga	2018	Rp	110.204.554.632,00	25,4256
Kab. Lingga	2019	Rp	176.165.610.666,49	25,89469
Kab. Natuna	2017	Rp	237.328.152.378,00	26,19271
Kab. Natuna	2018	Rp	133.685.213.166,00	25,61875
Kab. Natuna	2019	Rp	265.671.982.005,55	26,30553
Kota Batam	2017	Rp	556.926.371.276,39	27,0457
Kota Batam	2018	Rp	613.438.215.481,25	27,14235
Kota Batam	2019	Rp	655.137.393.960,15	27,20811
Kota Tanjung Pinang	2017	Rp	154.761.518.954,05	25,76515
Kota Tanjung Pinang	2018	Rp	106.106.337.058,81	25,38771
Kota Tanjung Pinang	2019	Rp	178.785.660.348,00	25,90945

DAFTAR PUSTAKA

- Erlis, Nola. “Pengaruh pertumbuhan ekonomi dan SilPA terhadap belanja modal dengan PAD dan DAU sebagai variabel moderasi”. **Jurnal Fakultas Ekonomi**. Universitas Bung Hatta. 2014.
- Ghozali, Imam. **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS**. Jakarta: Penerbit Universitas Diponegoro. 2011.
- Jensen, M and Mecking, W. “Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure”. **Journal of financial Economics** 3 (4). 1976. Page 305-360
- Kuncoro, M. Metode **Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. Edisis kedua**. Erlangga. Jakarta. 2007.
- Mawarni, Darwanis dan Abdullah, Syukriy, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh)”. **Jurnal Akuntansi Universitas Syah Kuala**, 2013, hal 80-90.
- Panji, Putu Ngurah, dan A.A.N.B Dwirandra. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Pemoderasi”, **E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana**, 2014, 9, hal 79-92.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 137 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan.
- Peraturan Menteri Keuangan No 101 2011 tentang Klasifikasi anggaran
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 tentang Peraturan Dana Perimbangan.
- Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Putra, Pande Putu Maesa Eka, dan Made Heny Urmila Dewi, “Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Karangasem Provinsi Bali”, **E-Jurnal EP Unud**, 2018, hal 2163-2189.
- Priatna, Husaeri, dan Jaya Purwadinata, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung”, **Jurnal Ilmu Sosial dan Poitik**, 2019, hal 62-74.
- Nufus, Hayatun, dan Jhon Andra Asmara, “Pengaruh Pendapatan Sendiri dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modal dengan Dana Otonomi Khusus sebagai Pemoderasi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh”, **Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)**, 2017, hal 1-9.
- Nugraeni, “Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah Studi pada Pemerintah Daerahn Kabupaten/Kota di Indonesia”. **Jurnal Akademika UPY**, 2011.
- Rahman, Herlina. **Pendapatan Asli Daerah**. Jakarta: Arifgosita. 2005
- Sekaran, Uma dan Roger Bougie. **Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian**. Jakarta: Penerbit Salemba Empat. 2017.
- Sugiyono. **Metode Penelitian Bisnis**. Bandung: Penerbit Alfabet. 2009
- Wibisono, Nurharihbnu, dan Arini Wildaniati, “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD, DAU, SilPA, dan Luas Wilayah terhadap Alokasi Anggaran Belanja Modal”, **Jurnal Ilmu Ekonomi**, 2016, hal 12-20.
- Widiagma, Aditya Putra. “Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur”. **Jurnal Ekonomi**. Universitas Jember. 2015.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah
- <http://www.ksap.org/> (Diakses tanggal 5 April 2020)
- <http://sda.pu.go.id/bbwssumatera8/2017/03/25/pemprov-bahas-13-proyek-strategis-nasional-di-sumsel/> (Diakses tanggal 23 Agustus 2020)
- <https://beritasumut.com/politik-pemerintahan/Ada-17-Proyek-Strategis-Nasional-untuk-Pemprov-Sumut-Tahun-2018> (Diakses Tanggal 24 Agustus 2020)

